

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKELANJUTAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN MAKRO PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik

Kalimantan Timur, 27 Januari 2022



Outline

Konsep dan Mekanisme Perencanaan Pembangunan

- Konsep Perencanaan Pembangunan Nasional
- Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Perkembangan Ekonomi Terkini Provinsi dan Prognosa 2023

- Perkembangan Ekonomi Terkini Nasional dan Provinsi
- Outlook 2021, Sasaran 2022, dan Rancangan Awal 2023

Pandangan terhadap Indikator Makro Kaltim dalam RPJMD Kaltim 2019-2023

- Indikator Pembangunan (IPM, NTP, Tingkat Kemiskinan, TPT, Indeks Gini)
- Indikator Ekonomi (LPE, LPE Non Migas dan Batubara, PDRB per Kapita)
- Kalimantan Timur dalam Perspektif *Growth Diagnostic*

Catatan Penutup : Visi 2045 dan Pemerataan Pembangunan

3

6

17

43



VISI
INDONESIA
2045

KONSEP DAN MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

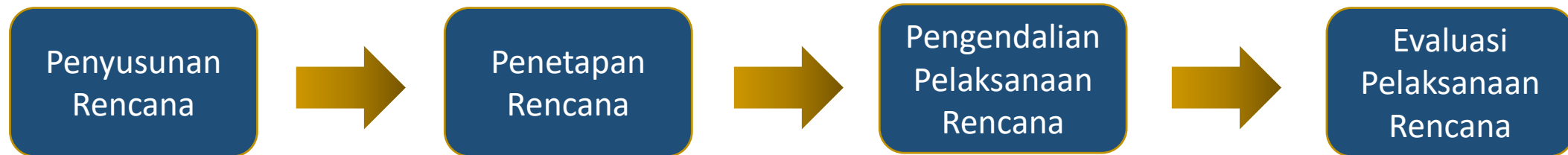
Pengertian Perencanaan

- **Conyers & Hills (1994)** mendefinisikan perencanaan sebagai suatu **proses yang bersinambungan** yang mencakup keputusan-keputusan atau **pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya** untuk **mencapai tujuan-tujuan tertentu** pada masa yang akan datang.
- **UU No 25 tahun 2004 tentang SPPN** mendefinisikan perencanaan sebagai suatu **proses untuk menentukan tindakan masa depan** yang tepat, melalui **urutan pilihan**, dengan **memperhitungkan sumber daya yang tersedia**.

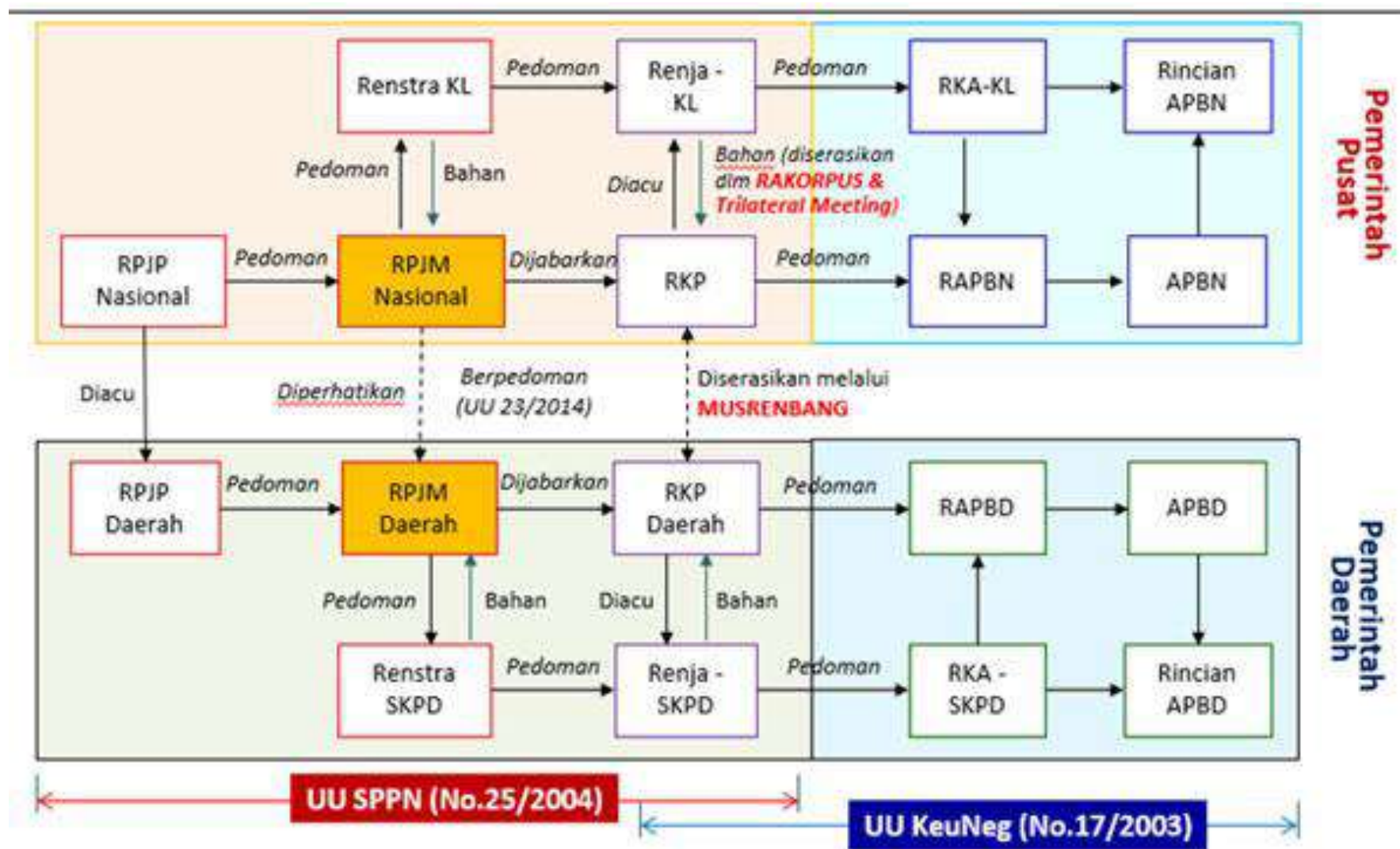
Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional

- **UU No 25 tahun 2004 tentang SPPN pasal 3** menjelaskan ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional **mencakup**
 - **penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan** yang meliputi **semua bidang kehidupan secara terpadu** dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
 - **disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga** dan **perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah** sesuai dengan kewenangannya.

Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional (Pasal 8 Undang-Undang No 25 Tahun 2004)



SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RKP – RKPD



HIGHLIGHT

- UU SPPN mengatur bahwa perencanaan pembangunan yang tertuang dalam **RPJP Daerah** perlu mengacu kepada **RPJP Nasional**.
- RPJP kemudian dijadikan sebagai pedoman untuk pembuatan RPJMN baik pada level pusat maupun level daerah
- RPJM dijabarkan dalam bentuk RKP dan menjadi pedoman untuk penyusunan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja
- Lebih teknis, **RPJM** menjadi pedoman bagi kementerian / Lembaga baik pada level nasional maupun daerah untuk membuat Rencana Strategis dan Rencana Kerja.

KERANGKA EKONOMI MAKRO SEBAGAI DASAR PERENCANAAN

UU No. 25/2004 tentang SPPN

Pasal 4 ayat 2

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden... yang memuat... , serta **kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal...**”

Pasal 4 ayat 3

“RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat... , **rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, ...**”

PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Pasal 9

- 1) Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional **bersama-sama menentukan besaran indikator ekonomi makro.**
- 2) Indikator ekonomi makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyusunan kerangka ekonomi makro dalam:
 - 1) **dokumen RKP; dan**
 - 2) **dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal.**
- 3) Menteri Keuangan dalam menyusun rancangan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal mempertimbangkan usulan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 4) Rancangan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas oleh Menteri Keuangan dengan melibatkan Menteri Koordinator Bidang perekonomian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan instansi terkait lainnya.
- 5) Menteri Keuangan dan Menteri perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama menyusun ketersediaan anggaran dengan mempertimbangkan Kerangka Ekonomi Makro dan pokok-pokok Kebijakan Fiskal.

Mengapa Penting



Merupakan Kesepakatan Asumsi Makro digunakan:

1. Sebagai dasar penetapan **kewilayahan** dan **sektoral**
2. Sebagai dasar penentuan **kapasitas fiskal** (resource envelope) dan bahan perumusan **RAPBN** serta penyesuaian APBN tahun berjalan




Sebagai Asumsi Dalam Target Makro Pembangunan:

- Sasaran pembangunan lainnya: **tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, rasio gini, dan IPM, serta penurunan emisi GRK**

Penetapan Arah Kebijakan Ekonomi Indonesia

- **Arah Kebijakan** ditetapkan berdasarkan rancangan perhitungan Kerangka Ekonomi Makro











KERANGKA EKONOMI MAKRO: KONSISTENSI ANTAR BLOK DALAM EKONOMI

ASUMSI	EKONOMI MAKRO	20xx	20xx
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,2-5,6
	Inflasi (%)	4,5	2,5-4,5
	Nilai Tukar (Rp/USD)	13.500	13.300-13.500
	ICP (USD/barrel)	50	45-60
	Lifting Minyak Mentah (rb barel/hr)	815	771-815
	Lifting Gas Bumi (rb barel/hr)	1.150	1.194-1.235

Sisi Pengeluaran

	Konsumsi RT	: 5,1 – 5,2%
	Konsumsi LNPRT	: 5,8 – 5,9%
	Kons. Pemerintah	: 3,8 – 4,0%
	Investasi (PMTB)	: 6,0 – 6,6%
	Ekspor	: 5,0 – 5,5%
	Impor	: 4,4 – 4,8%

Sisi Produksi

	Industri	: 4,8 – 5,3%
	Pengolahan	
	Konstruksi	: 6,5 – 6,9%
	Perdagangan	: 5,3 – 5,8%
	Infokom	: 10,1 – 11,0%
	Jasa Keuangan	: 9,9 – 10,5%
	Pertanian	: 3,5 – 3,8%
	Transportasi	: 8,0 – 8,5%
	Pertambangan	: 1,3 – 1,6%
	Listrik dan Gas	: 5,2 – 6,1%

Neraca Pembayaran

- Pertumbuhan Ekspor Non Migas : 4,7 – 6,3%
- Pertumbuhan Impor Non Migas : 4,3 – 6,0%
- Cadangan Devisa (USD Miliar) : 133,2 – 135,0
- dalam bulan impor : 8,6 – 8,7
- Defisit transaksi berjalan (% PDB) : 1,6 - 2,0%

Keuangan Negara

- Penerimaan Perpajakan (% PDB) : 11,0 – 12,0
- Belanja Modal (% PDB) : 1,7 – 2,2
- Subsidi Energi ((% PDB) : 0,6 – 0,7
- Defisit APBN (% PDB) : 1,9 – 2,3
- Stok Utang Pemerintah (% PDB) : 27,0 – 29,0

Investasi

- Investasi Pemerintah : 8,5 %
- Investasi BUMN : 9,5 %
- Investasi swasta (PMA/PMDN & Lainnya) : 82 (14 & 68) %



Tingkat Kemiskinan:
9,8% (9 – 10%)



Tingkat Pengangguran Terbuka:
5,2% (5,1 – 5,4%)



Gini Rasio:
0,38

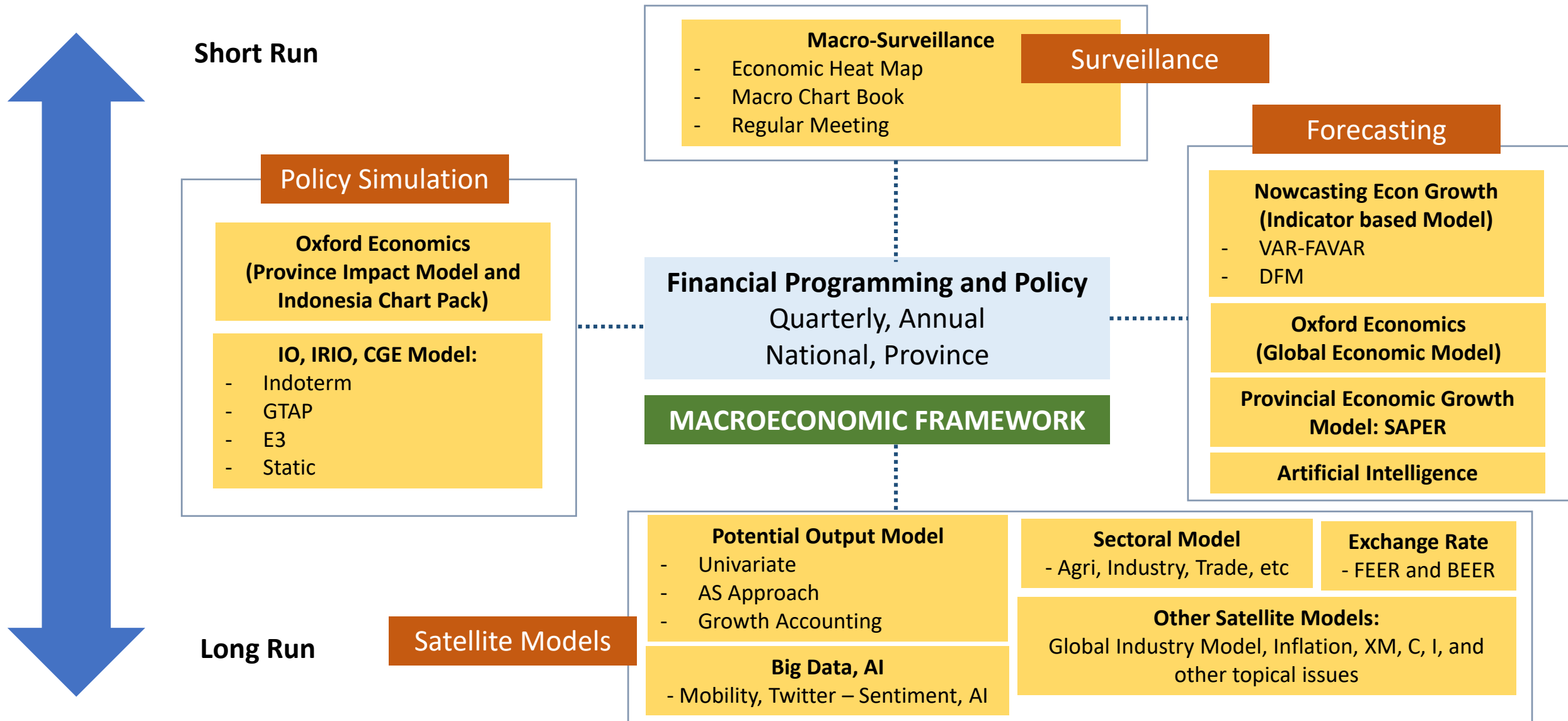


IPM:
71,38



Emisi Gas Rumah Kaca (GHG)
Pengurangan menuju target 29%
pada 2030 (Perjanjian Paris)

TOOLS: KERANGKA MODEL EKONOMI



KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Highlight

- Esensi dari pembangunan berkelanjutan adalah internalisasi dampak setiap tindakan sosial dan ekonomi terhadap lingkungan hidup.
 - setiap kegiatan sosial dan ekonomi perlu menghindari/mencegah atau memperhitungkan dampaknya terhadap kondisi lingkungan hidup,
 - agar lingkungan hidup tetap dapat menjalankan fungsinya untuk menopang kehidupan saat ini dan di masa mendatang.
- Selama ini, dampak lingkungan ditanggung atau menjadi beban masyarakat, bukan menjadi beban biaya pelaku ekonomi dan bukan menjadi kebiasaan dan perilaku sosial masyarakat Indonesia.
- Selayaknya, setiap tindakan harus memperkirakan dan memperhitungkan dampak dari tindakan terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.
 - Langkah ini sering disebut dengan “internalisasi” dampak lingkungan ke dalam kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

PILAR SOSIAL:

- Pemerataan
- Kesehatan
- Pendidikan
- Keamanan
- Perumahan
- Kependudukan

PILAR EKONOMI:

- Struktur Ekonomi
- Pola Konsumsi dan Produksi

PILAR LINGKUNGAN:

- Atmosfir
- Tanah
- Pesisir dan Laut
- Air Bersih
- Keanekaragaman Hayati

Sumber: Armida Salsiah Alisjahbana dan Endah Murniningtyas (2018)
dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target
dan Strategi Implementasi



VISI
INDONESIA
2045

PERKEMBANGAN EKONOMI TERKINI PROVINSI KALTIM DAN PROGNOSIS 2023

PERKEMBANGAN EKONOMI **KALIMANTAN TIMUR** TW-III 2021

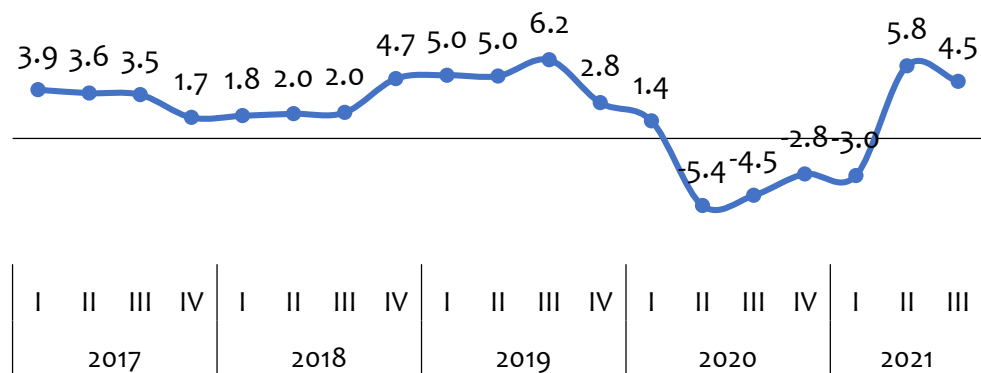
Ekonomi Kaltim triwulan III 2021 tumbuh lebih lambat dari triwulan sebelumnya, tercatat tumbuh 4,5 % yoy, dan secara kumulatif tumbuh sebesar 2,3% ctc.

Melihat pola triwulannya, pertumbuhan Q3 tercatat tumbuh 1,1% qtoq lebih rendah dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan nilai, terlihat bahwa ekonomi baru pulih kembali ke level 2019 pada triwulan III 2021.

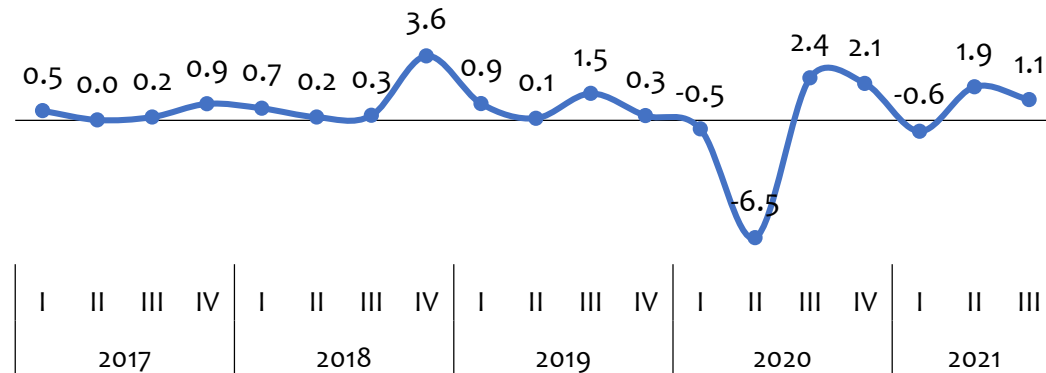
Pertumbuhan Triwulanan PDRB Provinsi

(persen,YoY)



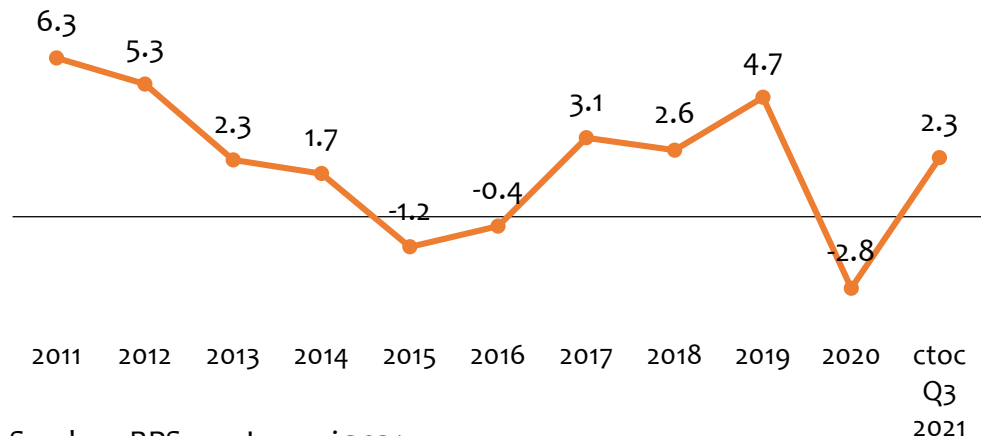
Pertumbuhan Triwulanan PDRB Provinsi

(persen,QtoQ)



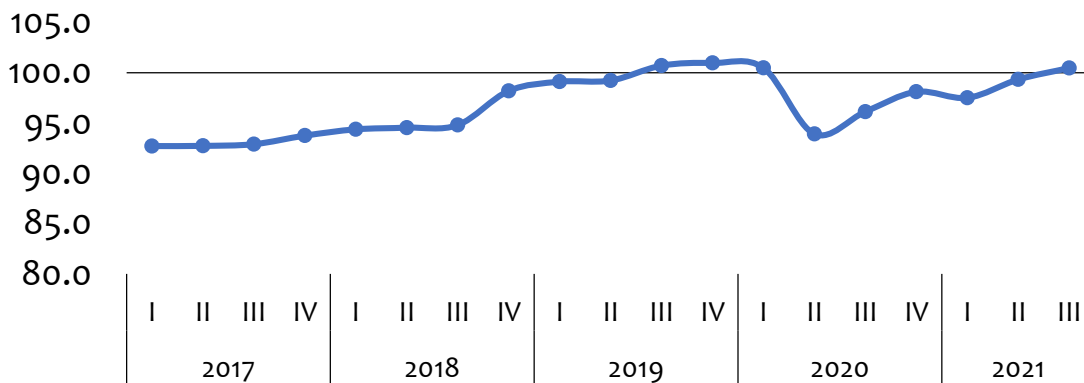
Pertumbuhan Tahunan PDRB

(persen,YoY)



PDRB ADHK Provinsi

(rata-rata 2019 = 100)



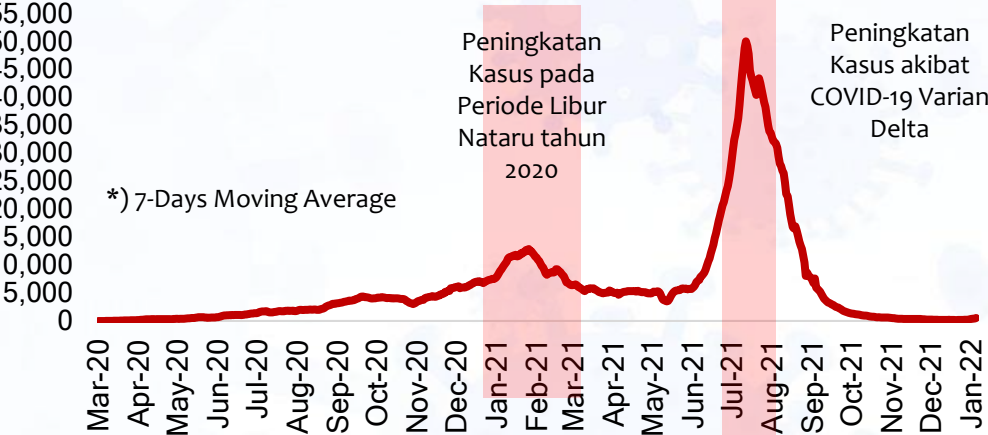
Sumber: BPS per Januari 2021

PERKEMBANGAN PANDEMI COVID-19

Kurva penambahan kasus harian baru semakin melandai dan terus bertahan. Adapun per tanggal 18 Januari 2021, sebagian besar kabupaten/kota keluar dari PPKM level 2. Di Provinsi Kaltim tercatat kabupaten/kota berada pada PPKM Level 2 dan Level 1 masing-masing sebanyak 7 kabupaten/kota dan 3 kabupaten/kota.

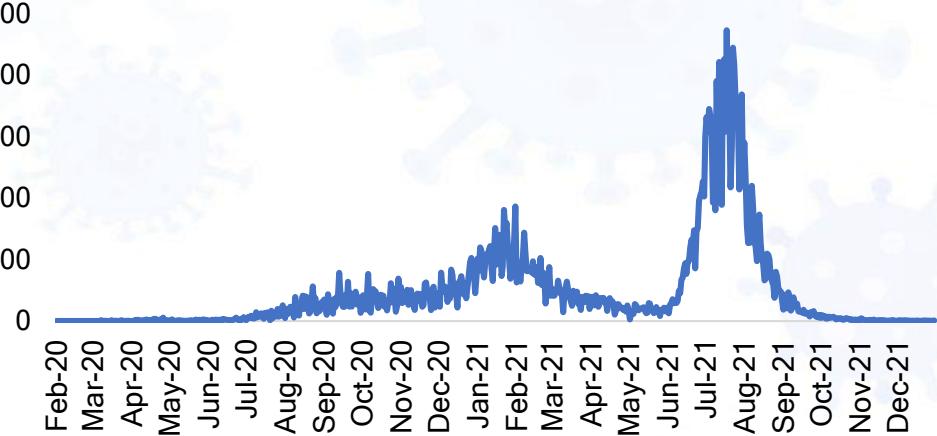
Penambahan Kasus Harian Baru

Indonesia



Penambahan Kasus Harian Baru

Kalimantan Timur



Sumber: Our World in Data per 13 Januari 2022, Imendagri No 1/2022 dan 2/2022, CEIC

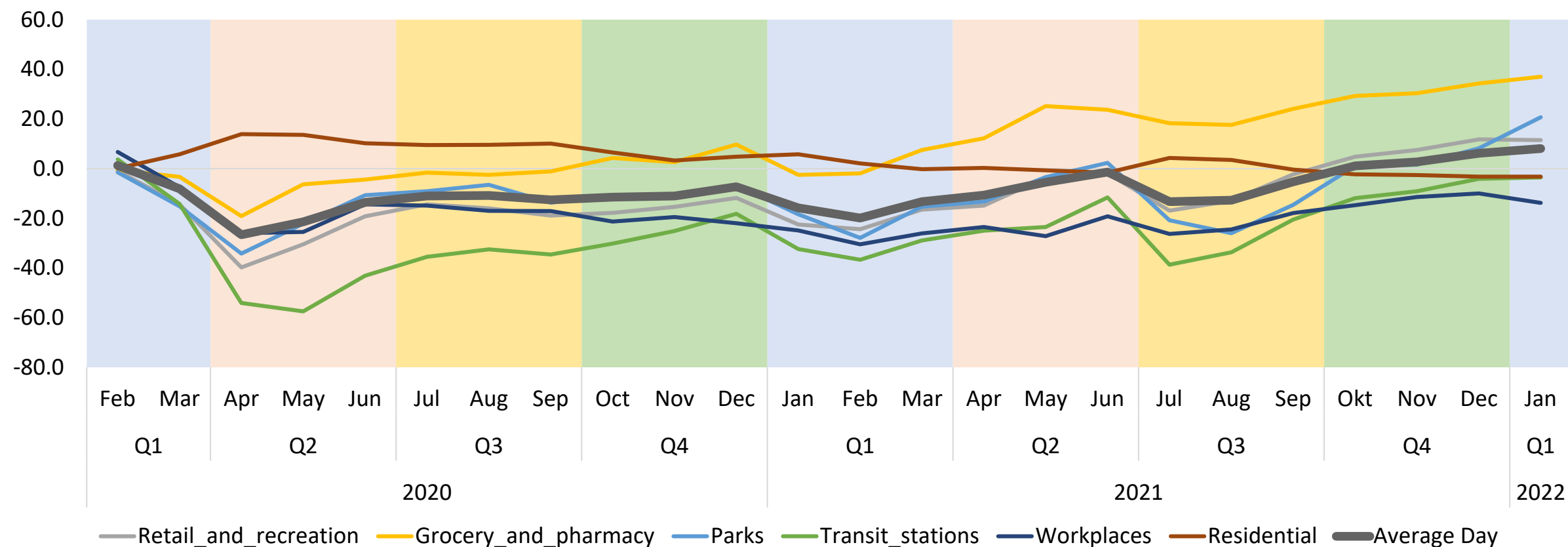
Provinsi	Jumlah Kota/Kabupaten (Per 18 – 31 Januari 2022)			
	PPKM Level 4	PPKM Level 3	PPKM Level 2	PPKM Level 1
Aceh	0	0	13	9
Sumatera Utara	0	0	7	26
Sumatera Barat	0	1	2	15
Riau	0	0	4	8
Jambi	0	0	2	9
Sumatera Selatan	0	0	6	11
Bengkulu	0	0	1	9
Lampung	0	0	3	12
Kep. Bangka Belitung	0	0	3	4
Kepulauan Riau	0	0	2	5
DKI Jakarta	0	0	6	0
Jawa Barat	0	0	14	13
Jawa Tengah	0	0	23	12
D.I. Yogyakarta	0	0	5	0
Jawa Timur	0	1	15	22
Banten	0	0	8	0
Bali	0	0	9	0
Nusa Tenggara Barat	0	0	1	9
Nusa Tenggara Timur	0	0	12	10
Kalimantan Barat	0	0	7	7
Kalimantan Tengah	0	0	5	8
Kalimantan Selatan	0	0	3	10
Kalimantan Timur	0	0	7	3
Kalimantan Utara	0	0	2	3
Sulawesi Utara	0	0	6	9
Sulawesi Tengah	0	0	7	6
Sulawesi Selatan	0	0	11	13
Sulawesi Tenggara	0	0	2	15
Gorontalo	0	0	0	6
Sulawesi Barat	0	0	1	5
Maluku	0	0	4	7
Maluku Utara	0	0	1	9
Papua Barat	0	2	8	3
Papua	0	7	17	5

MOBILITAS MASYARAKAT **KALIMANTAN TIMUR**

Pergerakan masyarakat **Kalimantan Timur** telah meningkat sejak Triwulan II 2021, namun kembali sedikit menurun pada awal Triwulan III 2021 akibat kebijakan Pembatasan Pergerakan Masyarakat (PPKM) Darurat sejalan dengan peningkatan kasus yang terjadi. Pada Triwulan IV 2021 dan awal tahun 2022 pergerakan sudah mulai meningkat dan secara rata-rata sudah berada di atas baseline, sementara komponen workplaces masih berada di bawah baseline

Mobilitas Masyarakat

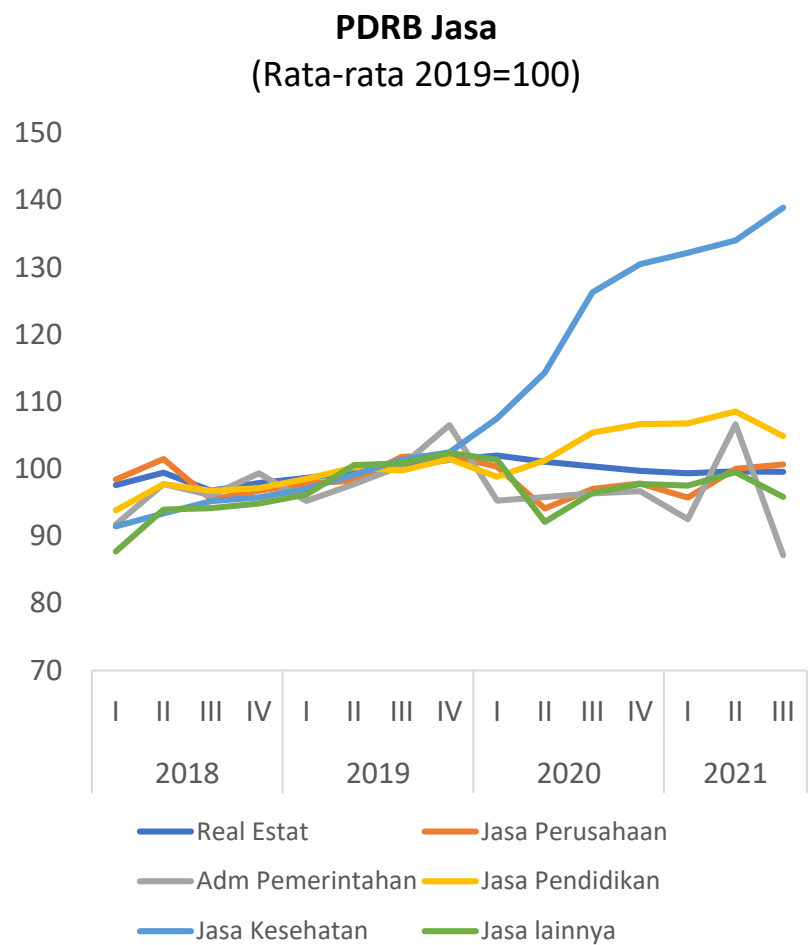
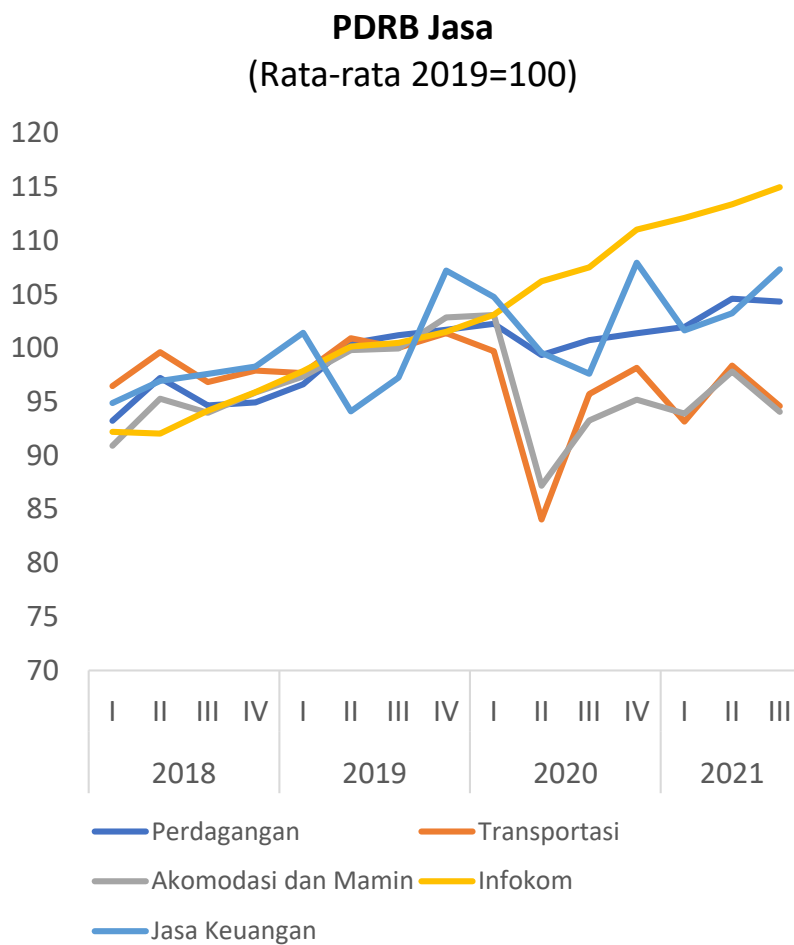
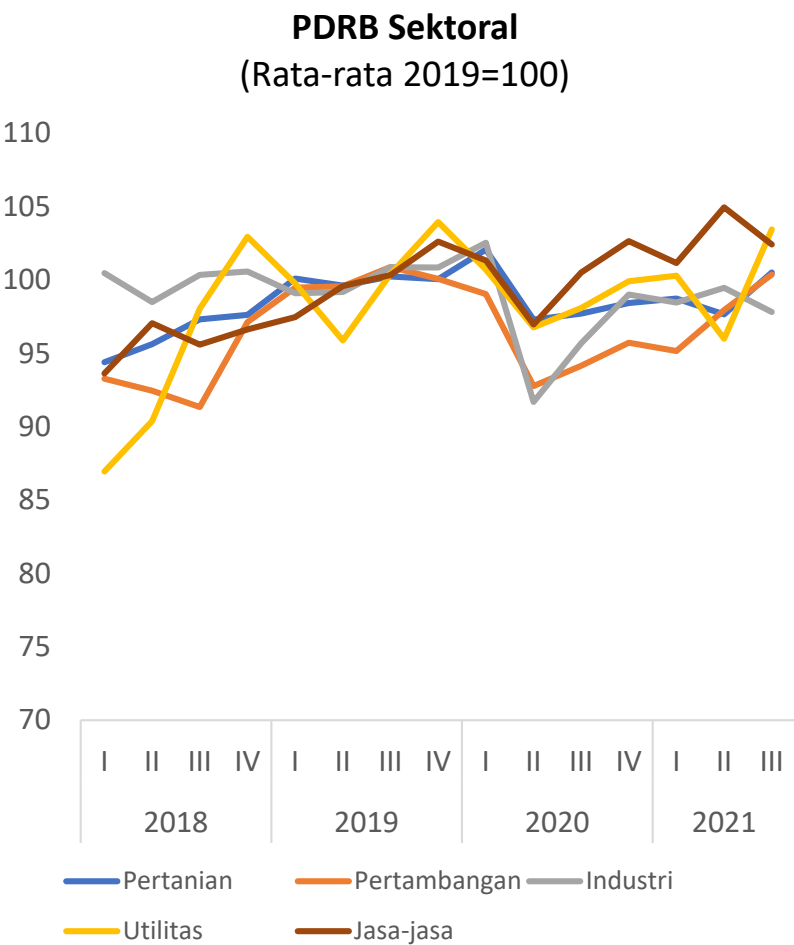
Deviasi terhadap Baseline (%)



Sumber: Google Mobility Report (diolah), per 10 Januari 2022

RECOVERY PATH EKONOMI KALIMANTAN TIMUR

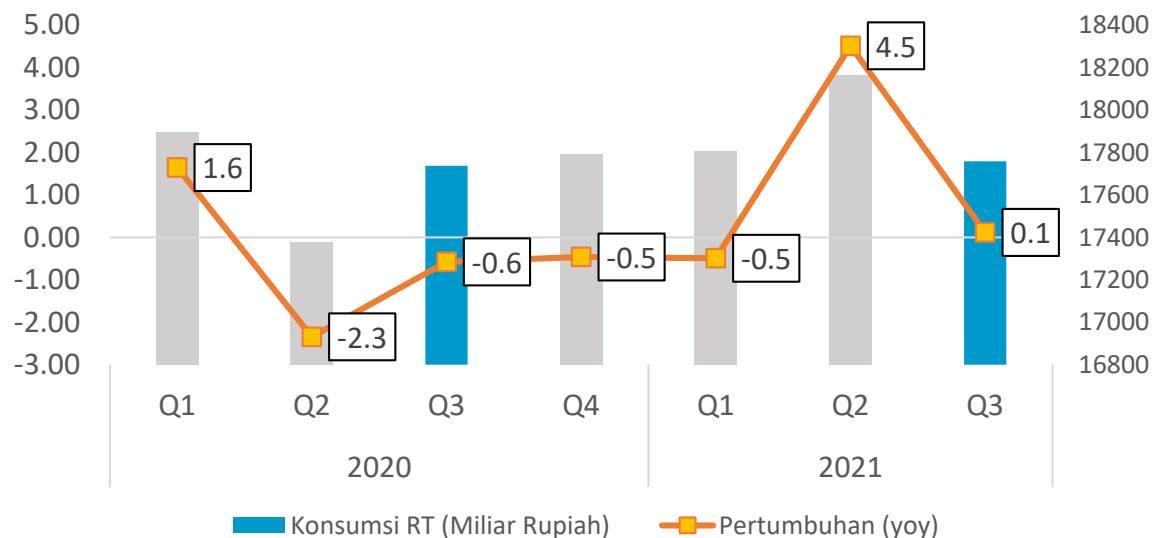
Secara sektoral, Ekonomi Kalimantan Timur memiliki perbedaan kecepatan pemulihan. Pertanian masih tercatat tumbuh lambat dan belum pulih, pertambangan membentuk pola *W-shaped*, dan jasa memiliki pola pertumbuhan lebih cepat dibandingkan sektor lain. Lebih dalam, transportasi, dan akomodasi mamin terlihat memiliki pola *L-shaped* dan lebih lama pulih. Di sisi lain, sektor infokom dan jasa kesehatan tidak menunjukkan *gangguan* dan tumbuh cepat.



Sumber: BPS (diolah), exercise internal dit PMAS

PERKEMBANGAN KONSUMSI RT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Q3-2021

Konsumsi Rumah Tangga



- Konsumsi RT tumbuh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2020
 - daya beli masyarakat yang meningkat
 - indeks keyakinan konsumen, inflasi dan tingkat hunian kamar hotel berbintang
- Sementara, pertumbuhan simpanan masyarakat masih tinggi menandakan masyarakat masih menahan untuk konsumsi.

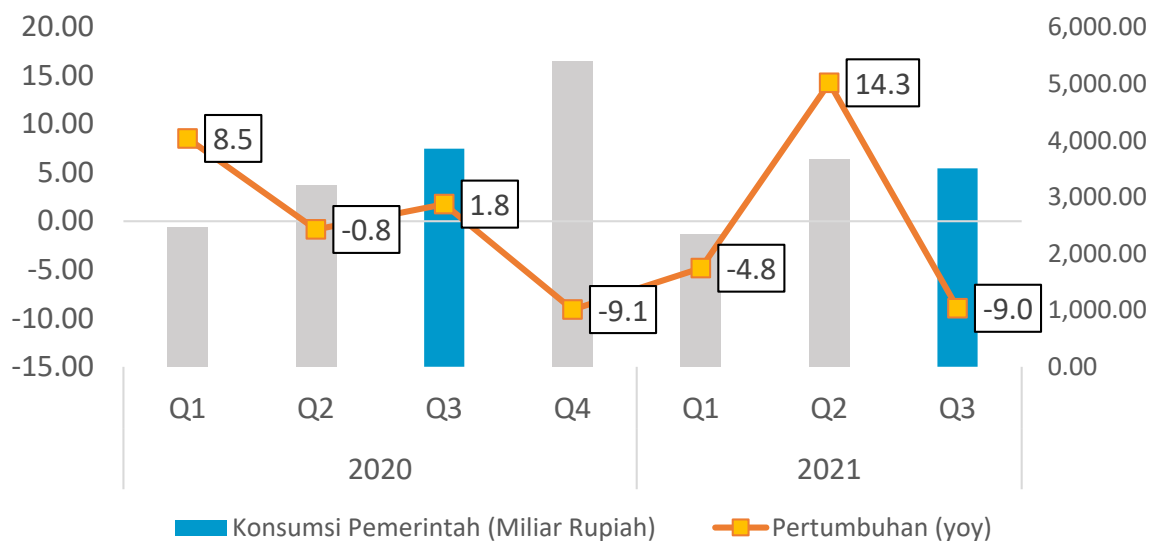
- Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, konsumsi RT pada Q3 tumbuh lebih lambat dipengaruhi oleh adanya kebijakan PPKM darurat.
 - Hal tersebut tercermin dari penurunan tingkat hunian kamar hotel berbintang

Sumber: BPS, diolah

Indikator	2019												2020												2021															
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des				
Konsumsi Rumah Tangga																																								
Indeks Keyakinan Konsumsi	117,8	113,4	112,5	106,4	107,8	111,3	115,8	111,7	113,1	115,4	108,2	114,2	110,3	109,9	107,3	72,5	75,0	89,0	94,9	90,3	82,2	73,2	95,9	92,9	99,1	107,1	106,8	117,0	105,8	103,8	94,4	94,3	104,4	125,8	113,9	124,8				
Pertumbuhan Kredit Konsumsi (yoy)	5,9	5,9	4,9	4,9	4,7	4,4	3,9	3,8	3,8	4,1	4,8	5,1	5,5	5,7	5,7	4,4	2,7	1,8	1,5	0,6	-0,3	-1,3	-0,2	-1,1	-1,6	-2,1	-2,2	-1,2	-0,2	0,2	0,2	0,4	2,5	2,3	-0,7					
Pertumbuhan Simpanan Masyarakat (yoy)	11,1	12,8	13,3	12,6	13,9	17,8	14,8	16,5	16,6	11,4	13,7	7,9	9,6	9,1	8,8	9,3	8,7	5,6	4,7	9,0	8,2	10,4	9,0	9,6	8,9	6,4	7,6	10,4	6,7	9,2	9,4	5,4	12,3	6,8	9,3					
Non Performing Loan (%Kredit)	3,9	3,6	3,5	3,8	4,0	2,9	2,9	3,0	2,9	2,9	2,9	2,7	3,0	2,8	2,7	3,3	3,3	3,5	3,7	3,8	3,7	3,7	3,9	3,3	3,5	3,3	3,2	3,4	3,7	3,4	3,3	2,9	3,1	2,6						
Tingkat Hunian Kamar Hotel Berbintang	47,9	49,1	59,1	55,7	49,9	53,0	57,8	56,6	58,0	61,1	64,4	63,9	50,8	61,3	39,9	26,3	26,3	34,6	38,6	39,1	51,2	51,3	54,8	59,8	43,0	43,8	49,4	47,4	46,8	57,7	39,0	42,0	52,7	62,4	63,5					
Inflasi (yoy)	3,48	3,21	2,89	2,67	2,93	2,34	2,20	2,05	1,92	1,91	2,19	1,88	1,64	2,08	2,19	1,96	1,54	1,52	0,81	0,62	0,62	0,60	0,76	0,77	0,59	0,38	0,74	1,05	1,07	1,21	1,12	1,13	1,68	1,91	1,71	2,15				

PERKEMBANGAN KONSUMSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Q3-2021

Konsumsi Pemerintah

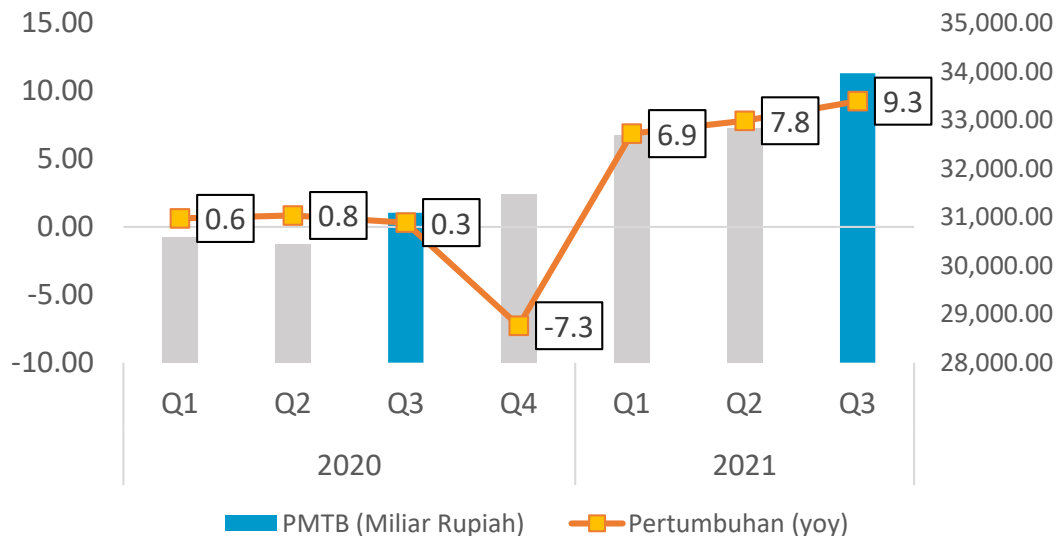


- Konsumsi pemerintah tumbuh lambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan dari triwulan sebelumnya. Konsumsi pemerintah tercatat kontraksi hingga 9,0 persen (yoy)
- Penurunan belanja pemerintah pada Triwulan III-2021 disebabkan pencairan THR PNS dan Gaji Ketiga belas yang sudah dicairkan pada triwulan sebelumnya.
- Masih terdapat belanja pemerintah untuk pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya penanganan sektor kesehatan dan dukungan UMKM.

Sumber: BPS, diolah

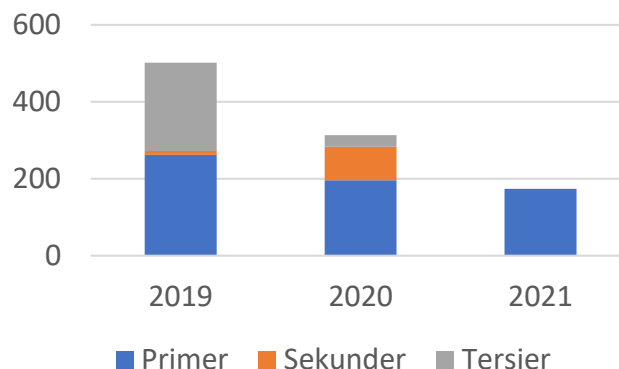
PERKEMBANGAN INVESTASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Q3-2021

Perkembangan Investasi



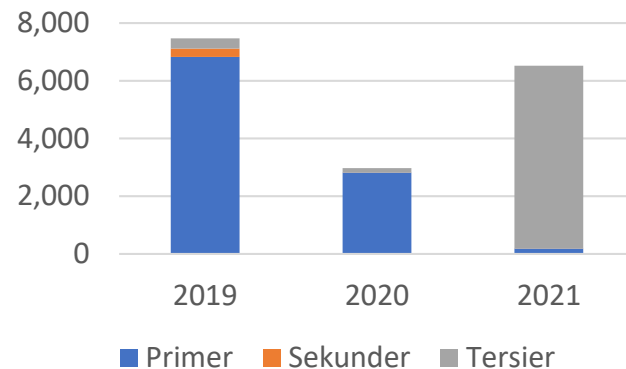
PMA Q1-Q3 2019 – 2020

US\$ Juta



PMDN Q1-Q3 2019 – 2020

Rp Miliar



Sumber: BPS, diolah

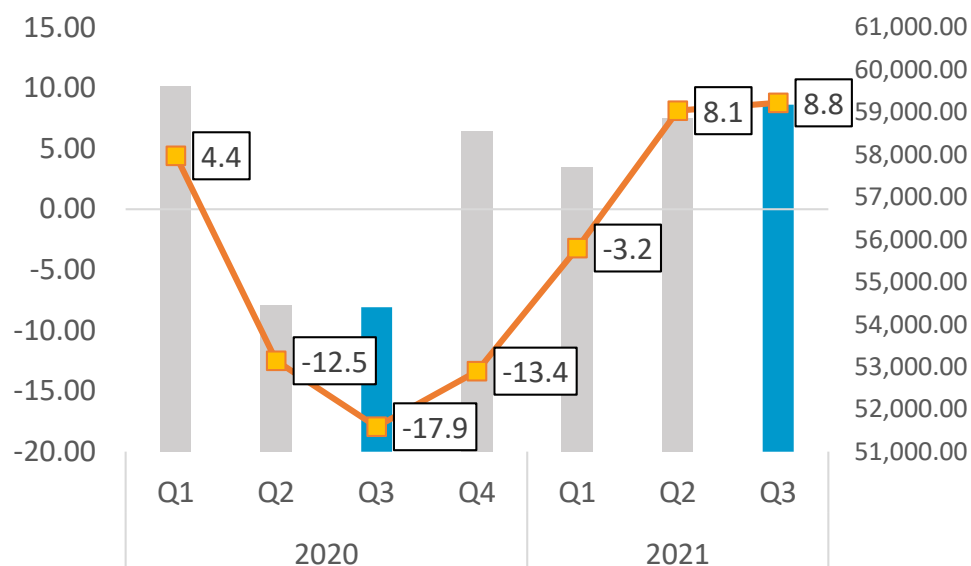
- Investasi pada Q3-2021 terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya.
 - tercermin dari pertumbuhan realisasi pengadaan semen dan kredit investasi yang lebih tinggi

- Selain itu, perkembangan investasi luar negeri kumulatif hingga Q3-2021 menunjukkan masih lemah. Di sisi lain investasi dalam negeri tercatat tinggi
- Investasi luar negeri didominasi oleh sektor primer yaitu Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan. Investasi dalam negeri didominasi oleh sektor tersier khususnya Listrik, Gas dan Air

Indikator	2019												2020												2021												
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
Investasi																																					
Pertumbuhan Kredit Investasi (yoy)	15,7	9,8	12,2	12,2	17,5	12,9	14,1	12,2	11,4	10,6	12,1	17,1	18,1	22,2	26,2	22,1	15,8	15,4	13,8	12,2	13,8	12,1	7,6	2,5	1,1	-3,0	-6,5	-3,9	-5,8	-3,7	4,2	23,3	-8,2	20,0	25,2		
Pertumbuhan Kredit Modal Kerja (yoy)	10,1	3,2	1,0	2,3	5,5	8,7	12,9	9,7	7,8	18,6	11,8	12,9	23,7	18,0	17,4	14,7	12,7	4,0	2,6	2,0	-2,0	-4,9	-5,4	-10,8	-7,0	-2,0	-4,9	-1,2	-3,2	-2,4	-6,5	-4,9	-9,7	2,2	4,8		
Pertumbuhan Realisasi Pengadaan Semen (yoy)	42,4	41,5	79,4	9,8	4,2	-19,1	21,5	2,9	-3,5	9,0	27,6	36,5	-16,4	6,9	-29,2	-9,9	-32,3	81,8	-16,4	-18,2	-7,0	-5,2	1,4	-19,7	6,7	-26,6	8,7	-8,8	1,7	4,8	-0,1	6,1	11,0	8,6	-7,3	-1,7	

PERKEMBANGAN EKSPOR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Q3-2021

PDRB – Komponen Ekspor



Ekspor (Miliar Rupiah) Pertumbuhan (yoy)
Sumber: BPS, diolah

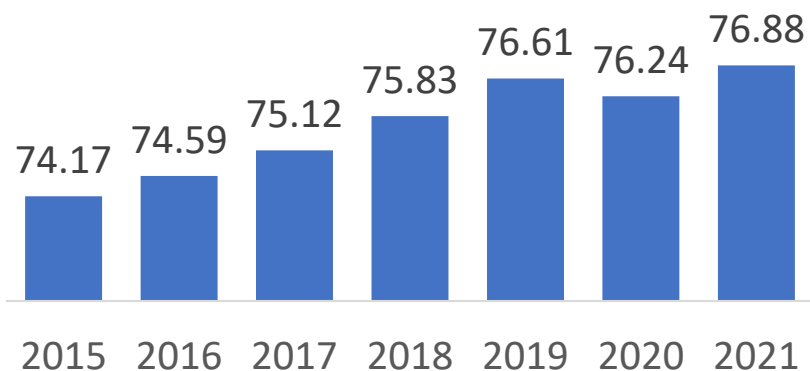
Perkembangan Nilai Ekspor



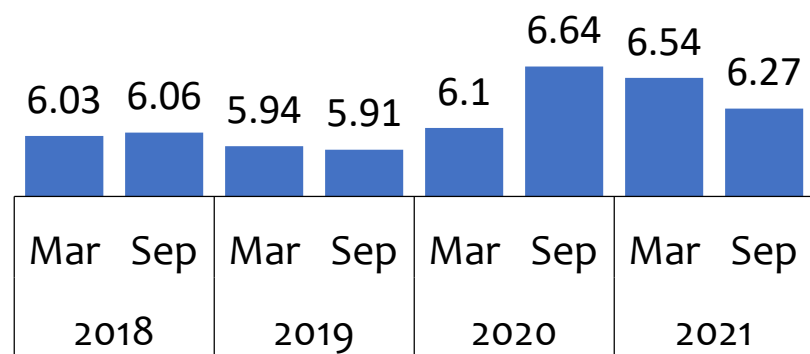
- Komponen ekspor tumbuh lebih cepat dibandingkan periode yang sama tahun 2020
 - Adanya peningkatan permintaan terhadap bahan bakar mineral terutama batubara.
 - Hal ini sejalan dengan nilai ekspor bulanan Kalimantan Timur pada Q3-2021.
- Pertumbuhan ekspor didorong oleh peningkatan ekspor komoditas utama yaitu bahan bakar mineral yang memiliki kontribusi sebesar 79 persen dari total ekspor

PERKEMBANGAN INDIKATOR PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

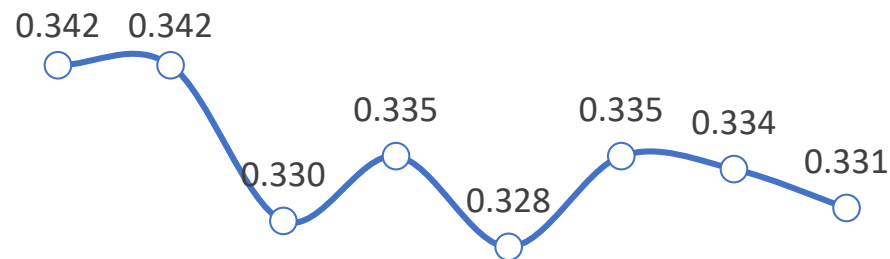
Indeks Pembangunan Manusia



Tingkat Kemiskinan (%)



Rasio Gini



Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

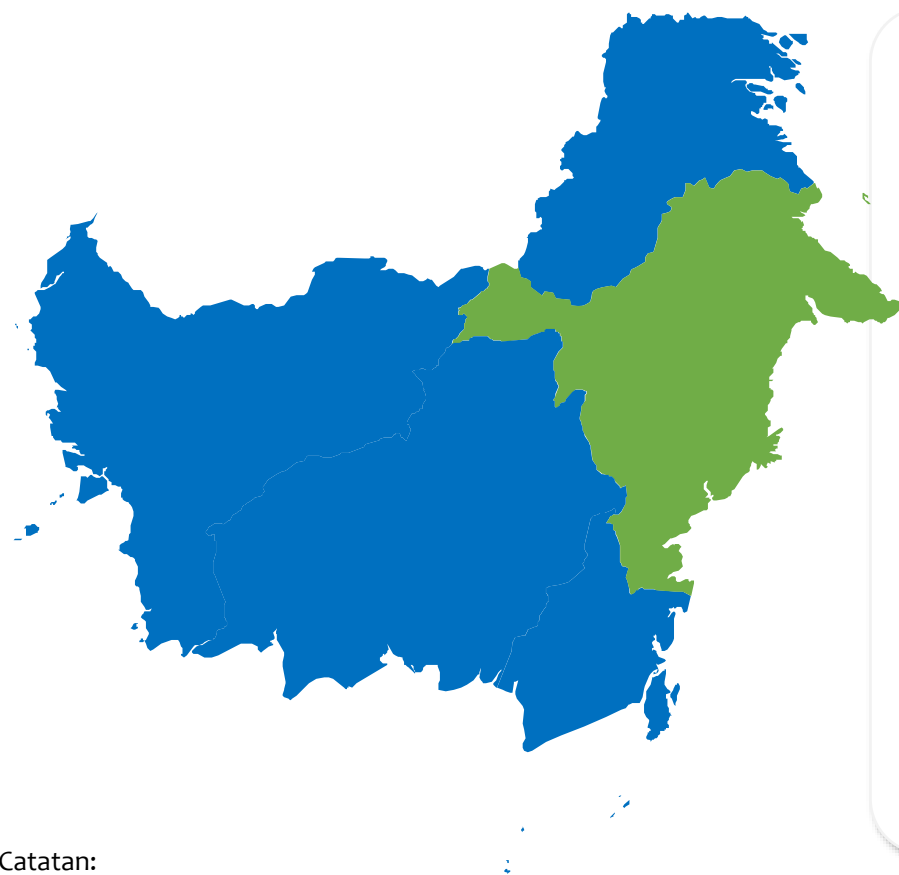


Highlight

- Kinerja Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kaltim mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2021, namun sempat tercatat turun pada tahun 2020
- Persentase penduduk miskin berada pada kisaran 6,0 persen. Adanya pandemi sempat menyebabkan peningkatan kemiskinan hingga September 2021. TK belum kembali ke tingkat September 2019
- Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Kaltim relatif terpengaruh secara terbatas dan memiliki tren menurun.
- TPT Provinsi Kaltim ada pada kisaran 6,8 persen. Adanya pandemi meningkatkan TPT.
 - Pada Agustus 2021 tercatat meningkat ke tingkat 6,8 persen dan belum kembali ke tingkat sebelum pandemi yaitu sebesar 5,9 persen

SASARAN RKP 2022 DAN RANCANGAN AWAL RKP 2023

Melihat perkembangan ekonomi provinsi Kaltim tersebut, maka pada tahun 2021 ekonomi Kaltim diproyeksikan tumbuh 3,1 persen. Kemudian pada tahun 2022 ditargetkan untuk tumbuh 5,3 – 5,6 persen didorong oleh dimulainya tahap konstruksi infrastruktur pendukung IKN serta meningkatnya harga komoditas ekspor utama Kaltim. Sementara tahun 2023 diperkirakan tumbuh 5,6 – 6,0 persen didukung oleh percepatan konstruksi infrastruktur IKN



Wilayah Kalimantan

	2021	2022	RA RKP 2023
Growth	3,5	5,2 – 5,5	5,5 – 5,9
Share	7,9	8,0	8,0

Faktor Pendorong

- Tahap konstruksi IKN
- Investasi swasta industri kimia dasar
 - pembangunan dan perluasan pabrik ammonium nitrat dan biodiesel, serta pertambangan migas di Kalimantan Timur.

Provinsi	Pertumbuhan Ekonomi (Persen, yoy)		
	2021	2022	2023
Kalimantan Barat	5,2	5,3-5,7	5,4-6,0
Kalimantan Tengah	3,4	5,6-6,0	5,8-6,2
Kalimantan Selatan	2,7	4,5-4,8	4,7-4,9
Kalimantan Timur	3,1	5,3-5,6	5,6-6,0
Kalimantan Utara	4,0	5,4-5,7	5,9-6,3

Catatan:
 2021: Outlook
 2022: Pemutakhiran RKP 2022
 2023: Exercise awal Dit PMAS



Kementerian PPN/
Bappenas

VISI
INDONESIA
2045

PANDANGAN TERHADAP INDIKATOR MAKRO KALTIM DALAM RPJMD KALTIM 2019-2023

INDIKATOR TUJUAN PROVINSI KALTIM BERDASARKAN RPJMD 2019-2023

No.	Indikator	Target Tahun ke-				
		1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,30	75,43	75,56	75,76	76,87
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,00	5,94	5,87	5,78	5,70
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1	3,5±1
	Laju Pertumbuhan Ekonomi non migas dan Non Batubara (%)	6±1	6±1	6±1	6±1	6±1
4	Indeks Gini	0,330	0,329	0,328	0,327	0,326
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75.75	75.85	75.95	76.05	76.15
6	Indeks Persepsi Korupsi	5,50	5,60	6,65	6,69	7,45

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Catatan Tujuan Provinsi Kaltim

- Target IPM yang ada pada RPJMD perlu diperhatikan pada level komponen: kesehatan, pendidikan dan pengeluaran. Terjadi lonjakan yang signifikan pada tahun ke lima sehingga perlu dicari sumbernya.
- Penurunan kemiskinan cenderung terakselerasi. Namun bisa lebih progressif.
- LPE baik dengan maupun tanpa migas dan batubara tidak mencerminkan adanya akselerasi/peningkatan
 - strategi untuk mencapainya terkesan sebagai scenario baseline atau *business as usual*.
- *Indeks Gini telah menunjukkan pemerataan pendapatan.*



VISI
INDONESIA
2045

- CATATAN TERKAIT INDIKATOR TUJUAN

CATATAN PERHITUNGAN PDRB PER KAPITA, LPE, DAN LPE NON PERTAMBANGAN

PDRB Per Kapita

$$PDB_{per\ kapita} = \frac{PDB}{\sum penduduk} \times 100\%$$

$$PDRB_{per\ kapita} = \frac{PDRB}{\sum penduduk} \times 100\%$$

Kegunaan

- PDB dan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
- PDB dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

$$r = \frac{Y_{it} \times 100}{Y_{i(t-1)}} - 100$$

dimana:

- r = Laju pertumbuhan ekonomi
- Y_{it} = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke-t (nominal)
- $Y_{i(t-1)}$ = PDRB atas dasar harga konstan tahun ke t-1 (nominal)

Kegunaan

Memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu.

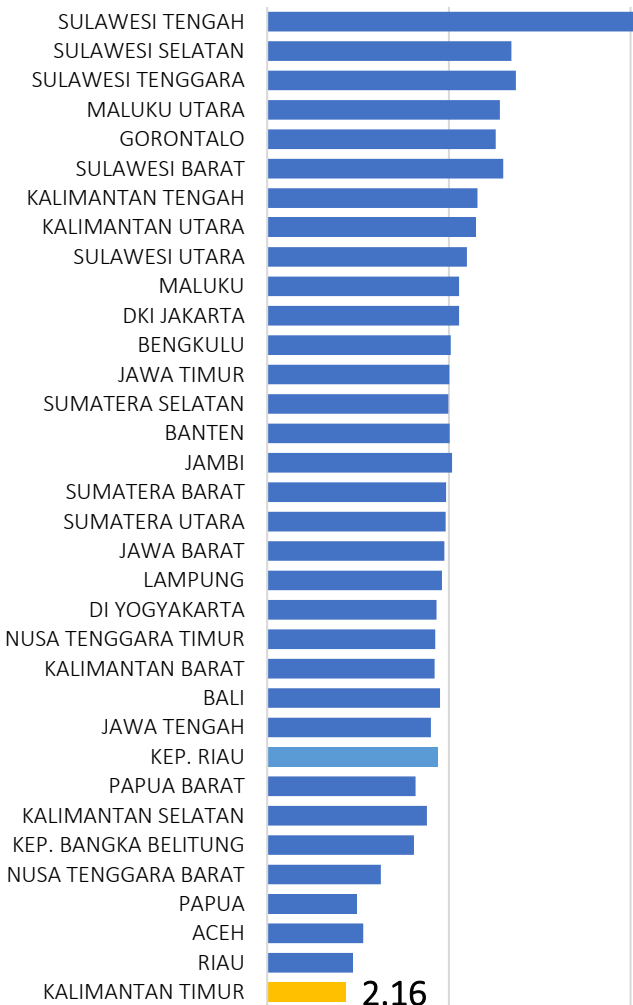
Sementara, LPE Non Pertambangan merupakan LPE yang dihitung setelah mengurangi sektor pertambangan

HIGHLIGHT

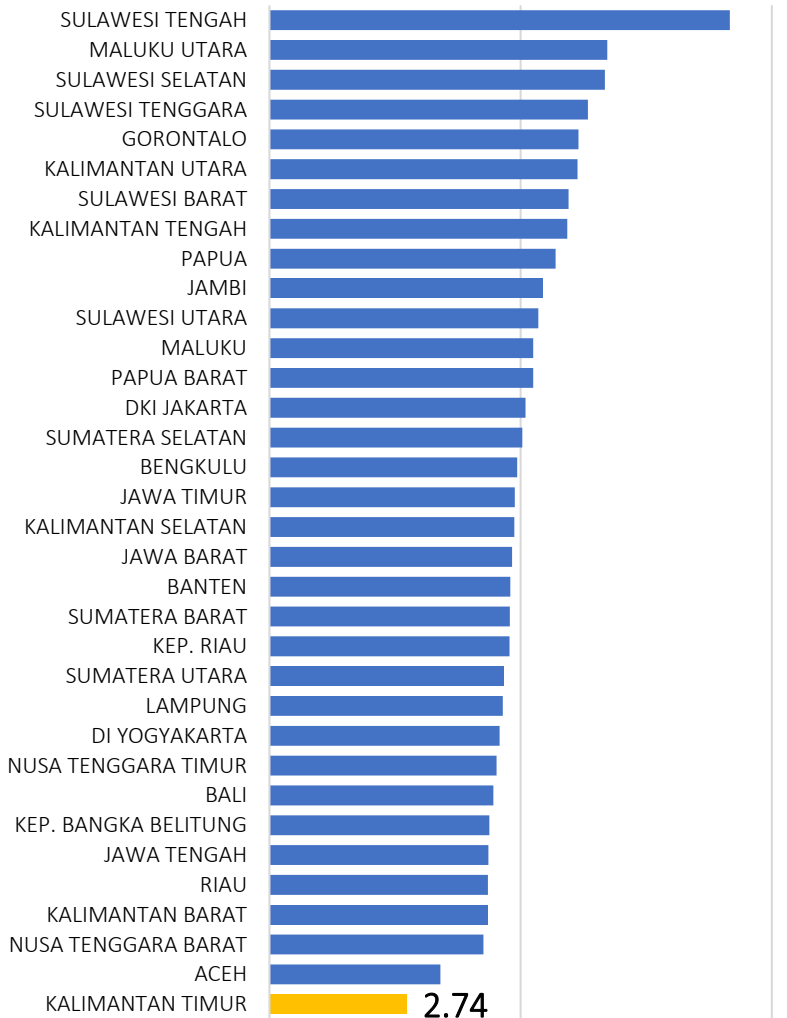
- Untuk menghitung PDRB Per Kapita perlu memperhatikan komponen PDRB dan komponen Jumlah Penduduk.
 - Sasaran PDRB selalu dihitung tiap tahun untuk kebutuhan RKPD
 - Proyeksi Jumlah Penduduk diterbitkan oleh BPS melalui Publikasi Proyeksi Penduduk 2015 -2045
- Untuk menghitung LPE perlu memperhatikan definisi akuntansi PDRB baik dari sisi pengeluaran ($Y = C + I + G + NX$) maupun lapangan usaha ($Y = \text{Nilai Tambah Bruto 17 sektor lapangan usaha}$)

CAPAIAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI: RATA-RATA PERTUMBUHAN EKONOMI KALIMANTAN TIMUR MERUPAKAN YANG TERENDAH, BAIK TANPA MAUPUN DENGAN SEKTOR PERTAMBANGAN

Rata-Rata* Pertumbuhan PDRB Total (% YoY)
2011-2020



Rata-Rata* Pertumbuhan PDRB tanpa
Sektor Pertambangan (% YoY)
2011-2020



Highlight

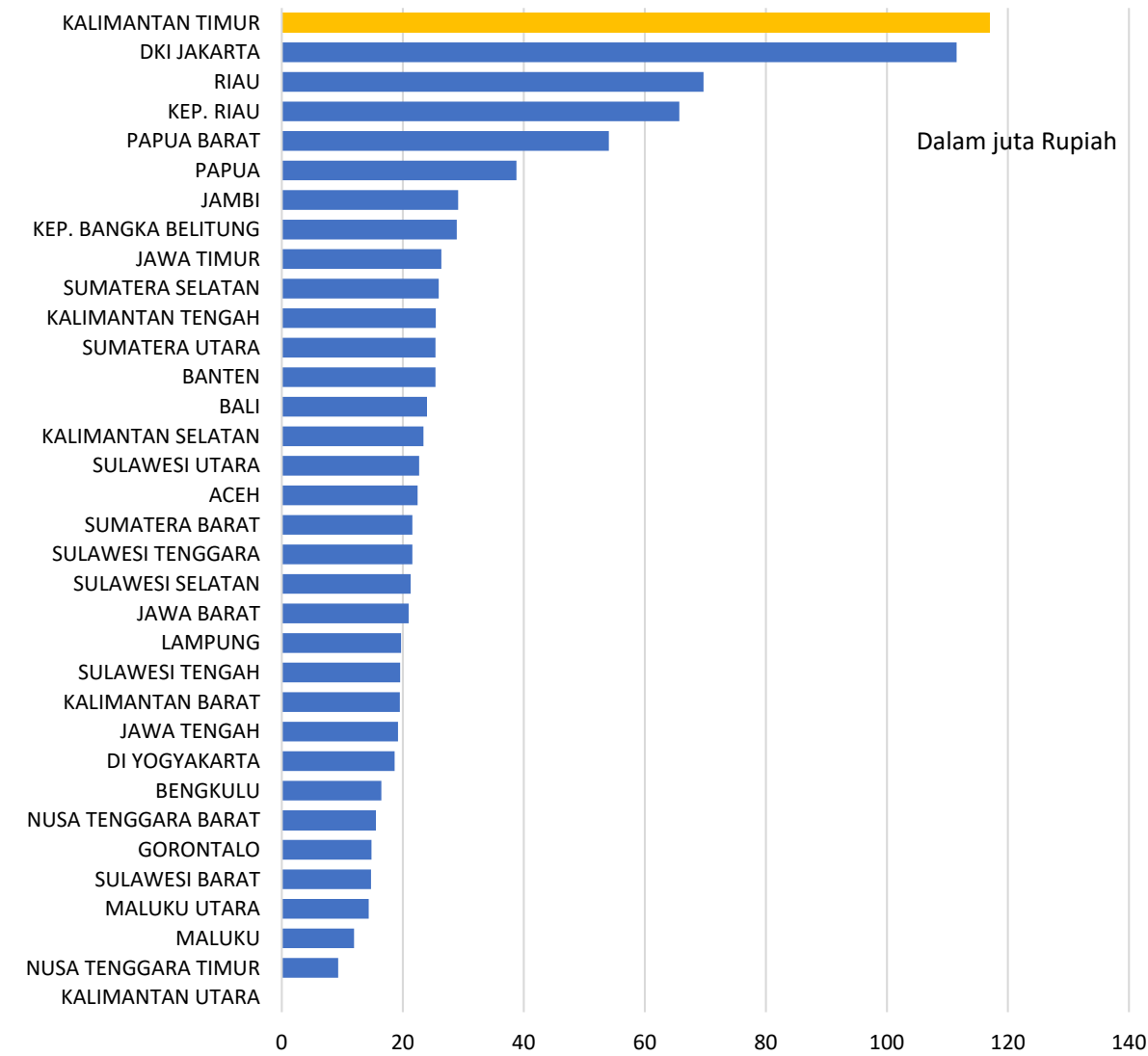
- Pertumbuhan Kalimantan Timur, baik dengan pertambangan maupun tanpa pertambangan merupakan terendah se-Indonesia.
- Jika dilihat dari target pertumbuhan, rata-rata LPE 2011-2020 menggunakan metode rata-rata sebesar 2,2 persen persen berada di bawah target $3,5 \pm 1$ persen.
- Namun demikian, pertumbuhan pada tahun 2019 mencapai 4,7 persen, di atas target pertumbuhan RPJMD. Pertumbuhan berkontraksi pada tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Catatan:

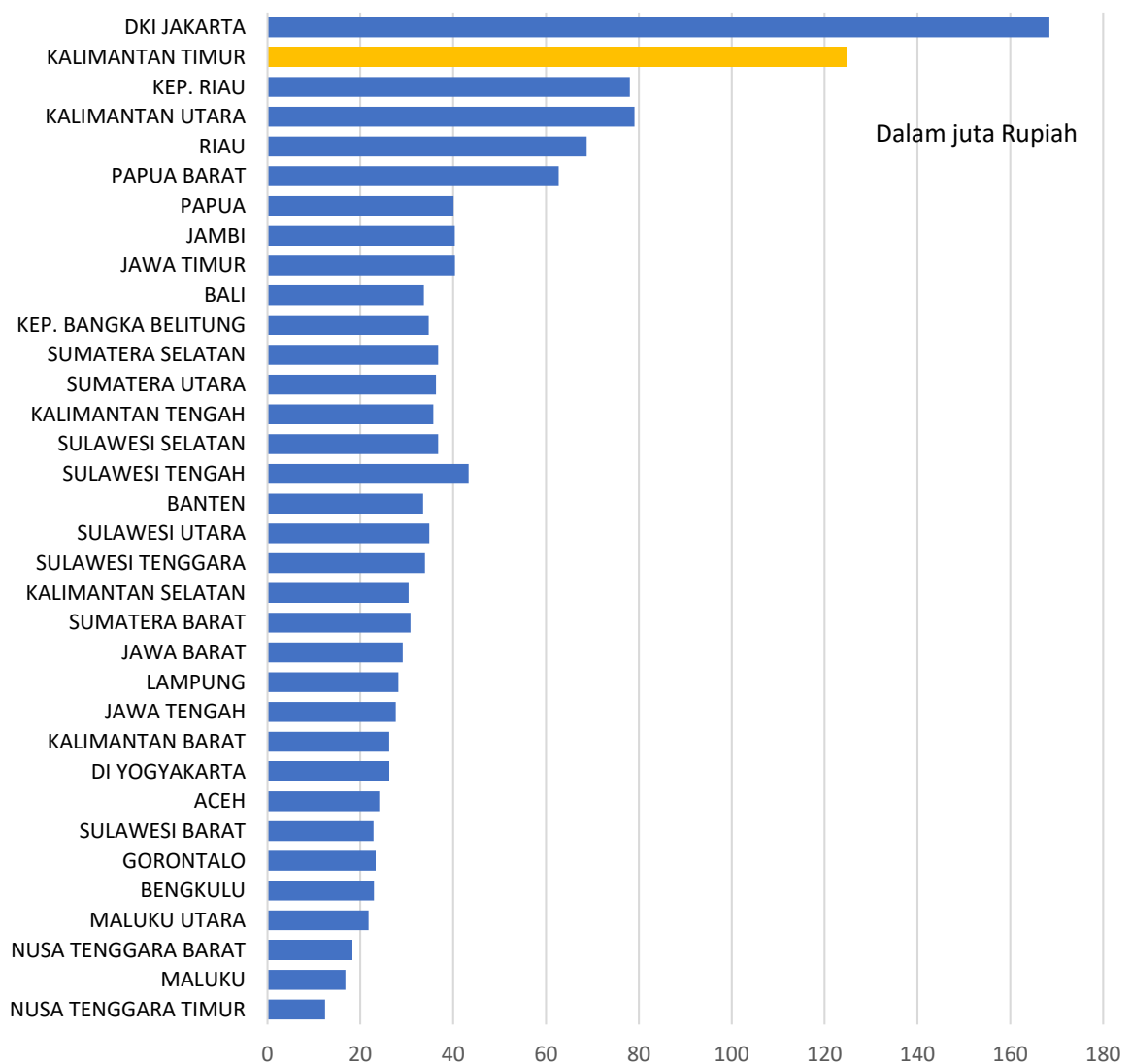
- Metode yang digunakan adalah rata-rata pertumbuhan.
- Pertumbuhan PDRB tanpa sektor pertambangan belum menambahkan nilai tambah dari sektor pertambangan.

CAPAIAN PDRB PER KAPITA: PDRB PER KAPITA KALIMANTAN TIMUR MERUPAKAN SALAH SATU YANG TERTINGGI...

PDRB per Kapita: 2010

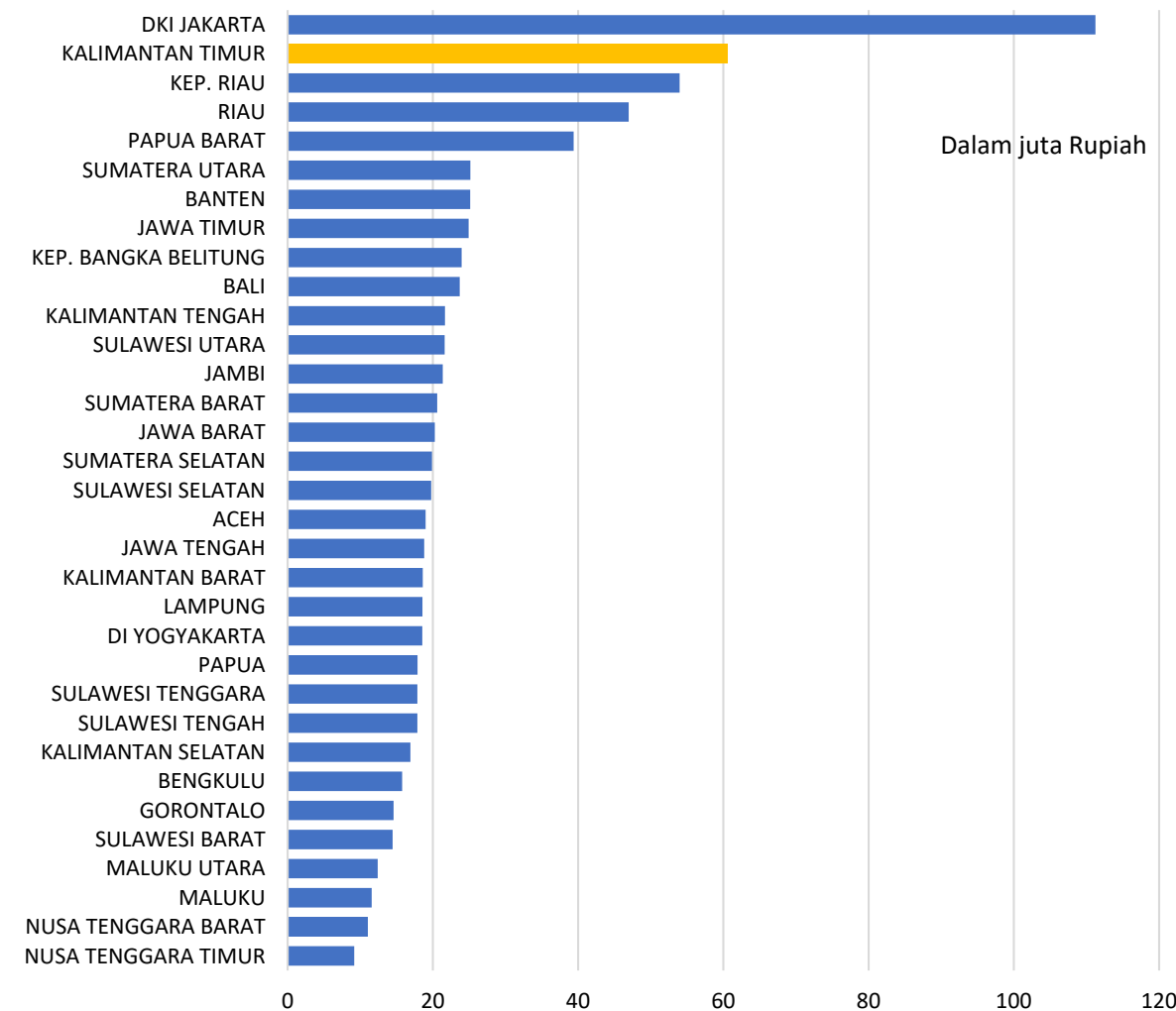


PDRB per Kapita: 2020

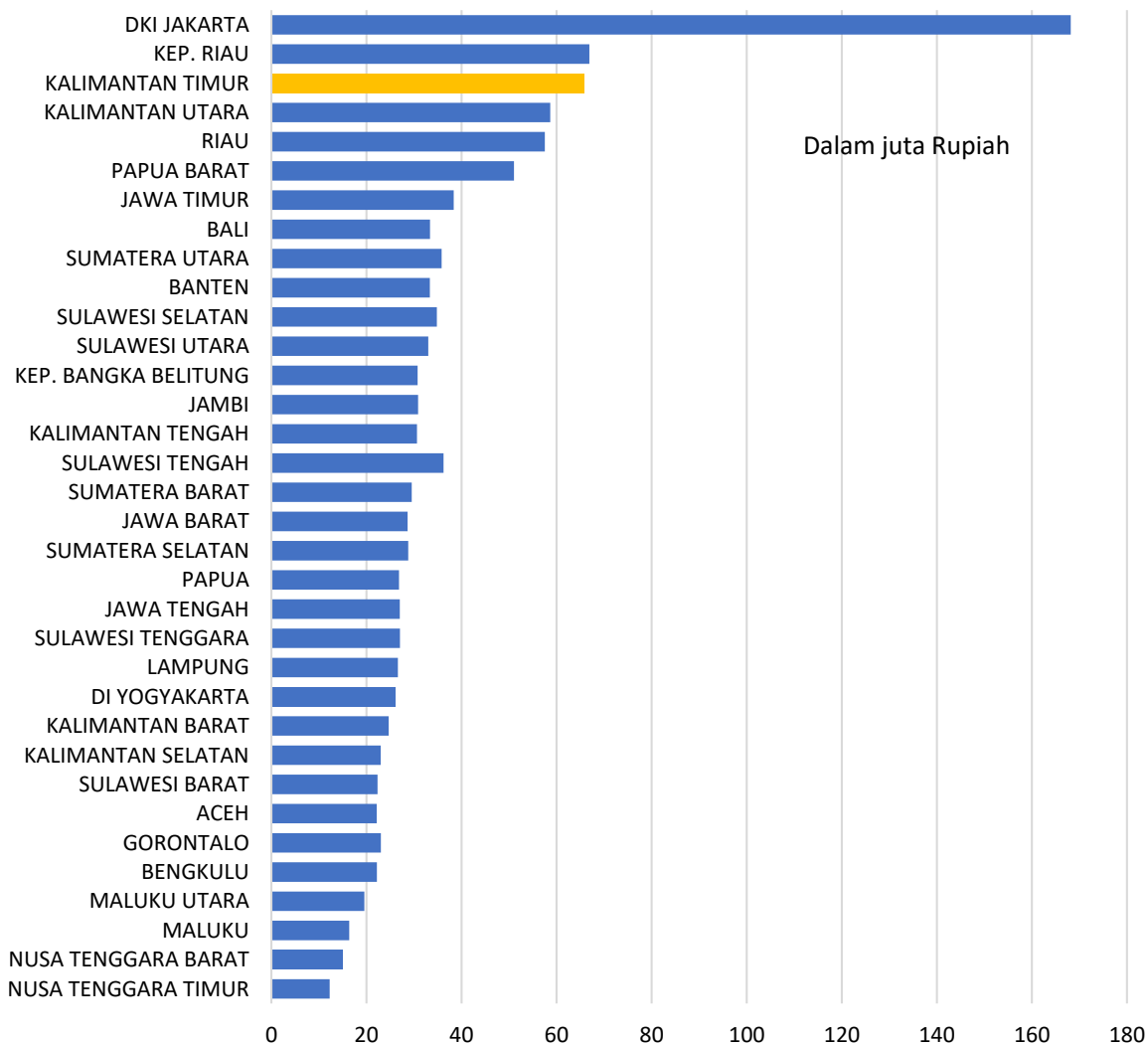


PDRB PER KAPITA KALTIM TANPA SEKTOR PERTAMBANGAN JUGA TERMASUK YANG TERTINGGI, NAMUN MULAI TERKEJAR PROVINSI LAINNYA

PDRB per Kapita tanpa Sektor Pertambangan: 2010



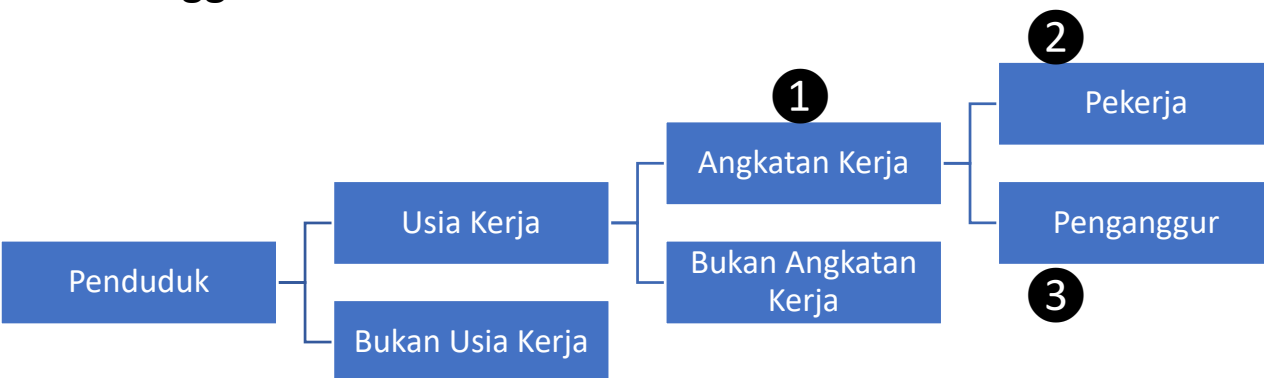
PDRB per Kapita tanpa Sektor Pertambangan: 2020



SEKILAS PERHITUNGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

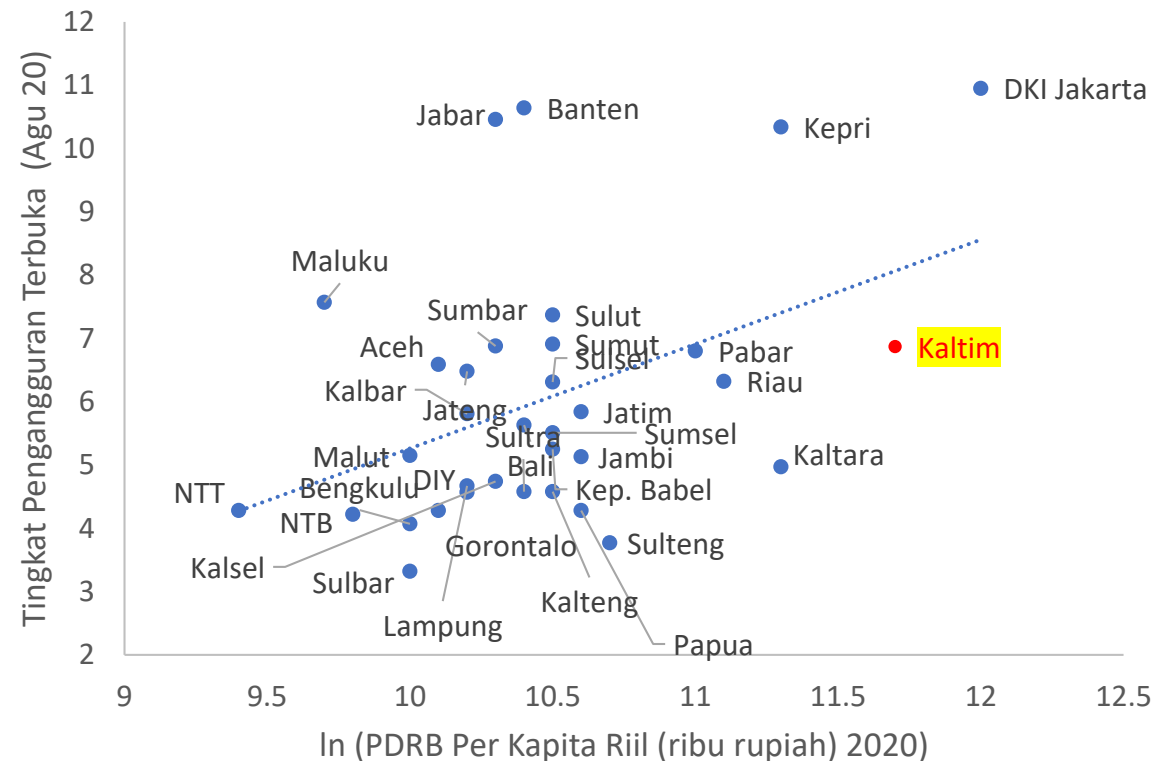
Definisi pekerja:

Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang tergolong Angkatan Kerja (AK) dan bekerja paling sedikit 1 jam dalam seminggu.



- Penghitungan TPT menggunakan data di bulan Agustus mengacu pada metodologi BPS yang lebih lanjut dapat diakses di: <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#subjekViewTab2>
- Keterangan yang dikumpulkan
 - informasi yang disajikan hanya informasi dari **penduduk yang berumur 15 tahun ke atas**.
 - Kegiatan selama seminggu yang lalu seperti: **bekerja (paling sedikit 1 jam dalam seminggu)**, punya pekerjaan namun sedang tidak bekerja, mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha, sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya (pensiun, cacat jasmani dan lain-lain).

Tingkat Pengangguran Terbuka (Agu 20)



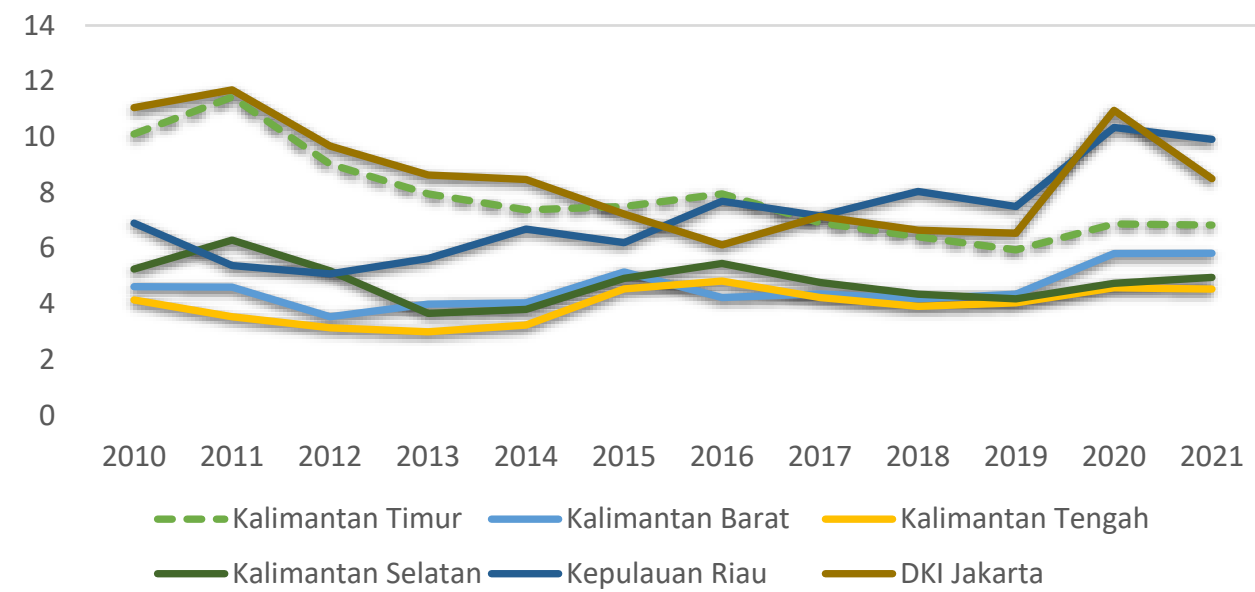
- Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa hal yang memengaruhi proyeksi TPT:
 1. Laju pertumbuhan penduduk
 2. Tingkat partisipasi angkatan kerja
 3. PDRB per kapita

CAPAIAN TINGKAT PENGANGGURAN KALTIM TAHUN 2019-2021 MENUNJUKKAN ADA PENGARUH PANDEMI COVID-19

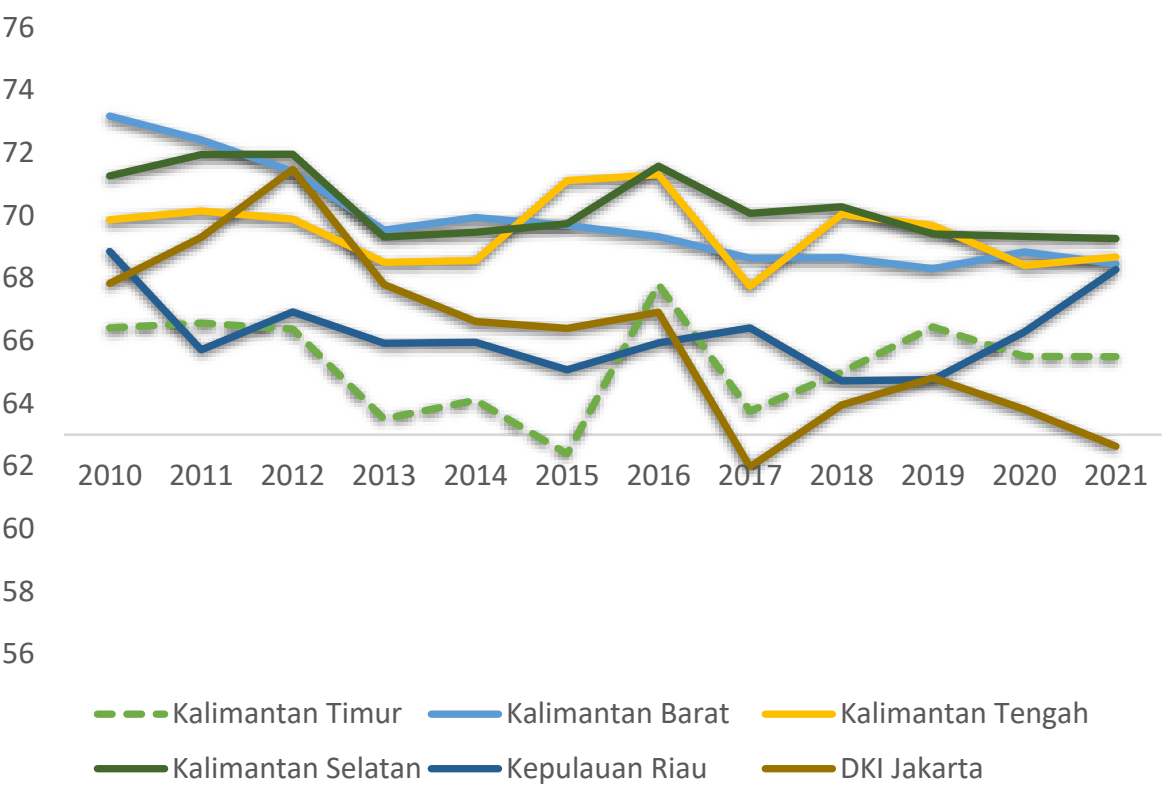
Kalimantan Timur Mengalami kenaikan pada tingkat pengangguran pada periode 2019-2021 sebagai dampak dari pandemi, setelah mencapai persentase tingkat pengangguran terendah sejak 2010 di tahun 2019. Dari sisi partisipasi angkatan kerja, dampak dari pandemi menurunkan TPAK dari 66,44 persen pada tahun 2019 ke 65,49 persen di tahun 2021. Dibandingkan dengan provinsi sebanding, TPT dan TPAK berada di bawah rata-rata provinsi sebanding.

Indikator	2019	2020	2021
TPT (persen)	5,94	6,87	6,83
TPAK	66,44	65,50	65,49

Tingkat Pengangguran Terbuka, 2010-2021 (persen)



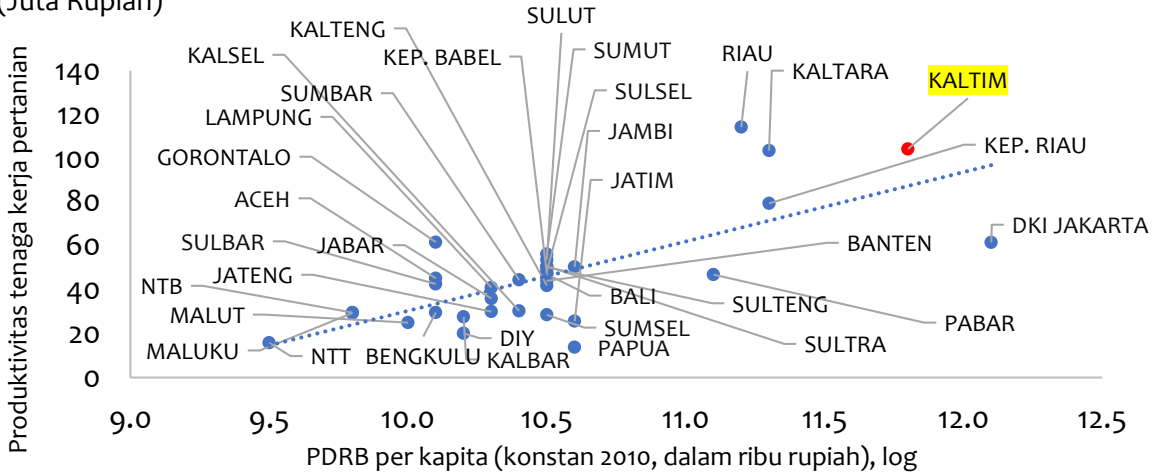
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, 2010-2021 (persen)



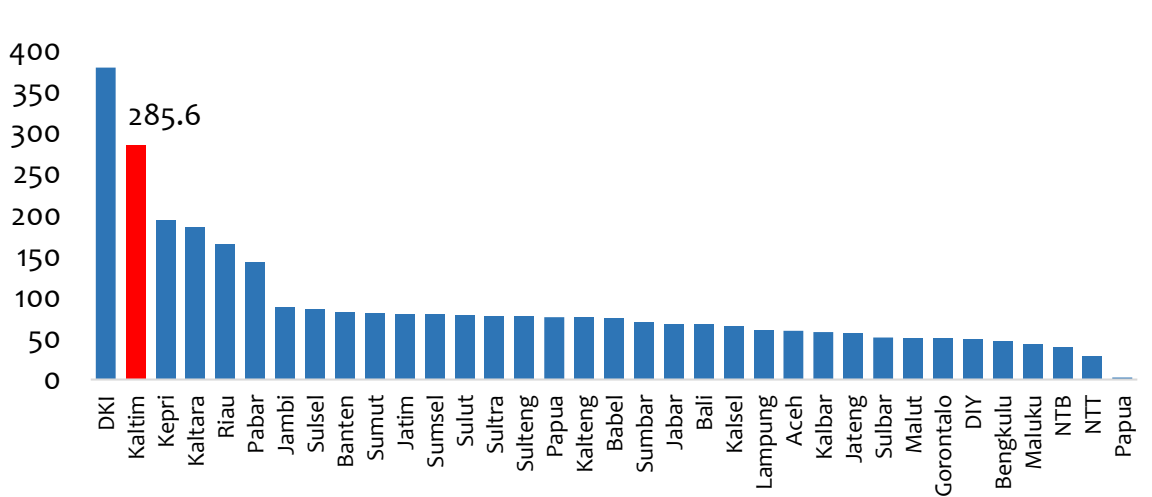
Sumber: BPS

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA KALTIM TINGGI

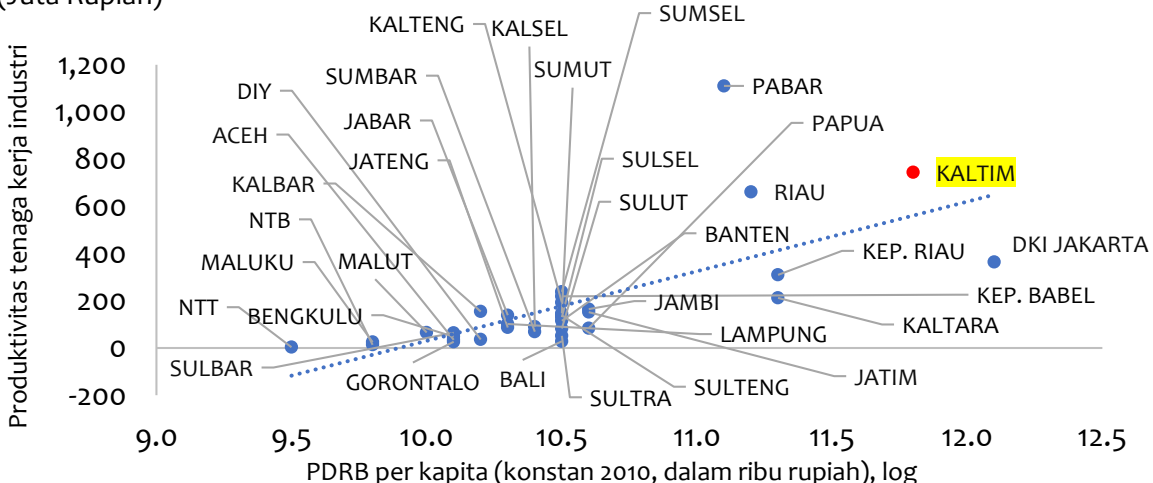
Produktivitas Tenaga Kerja di Sektor Pertanian, 2019
(Juta Rupiah)



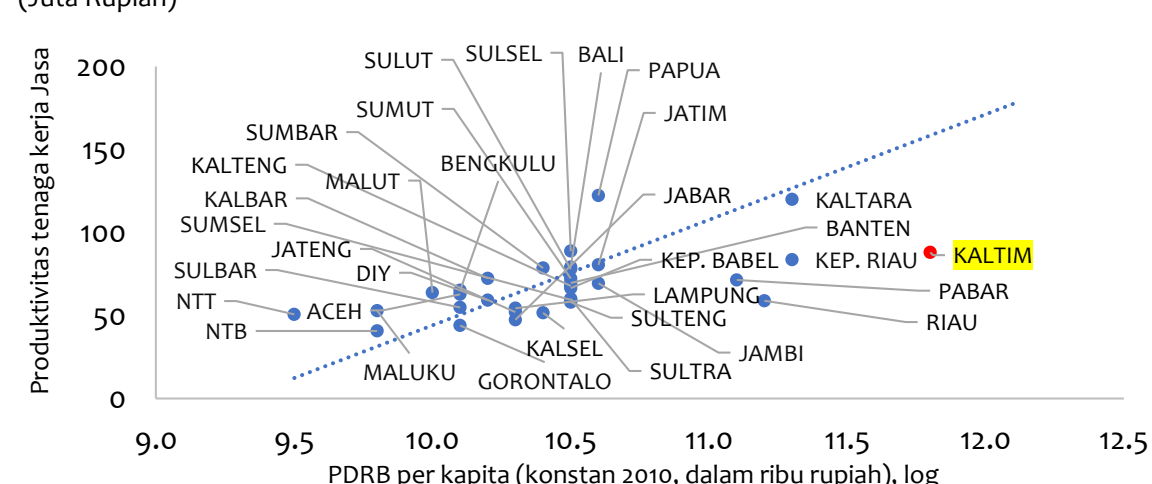
Produktivitas Tenaga Kerja (Total), 2019
(PDRB Per Pekerja)



Produktivitas Tenaga Kerja di Sektor Industri, 2019
(Juta Rupiah)



Produktivitas Tenaga Kerja di Sektor Jasa, 2019
(Juta Rupiah)



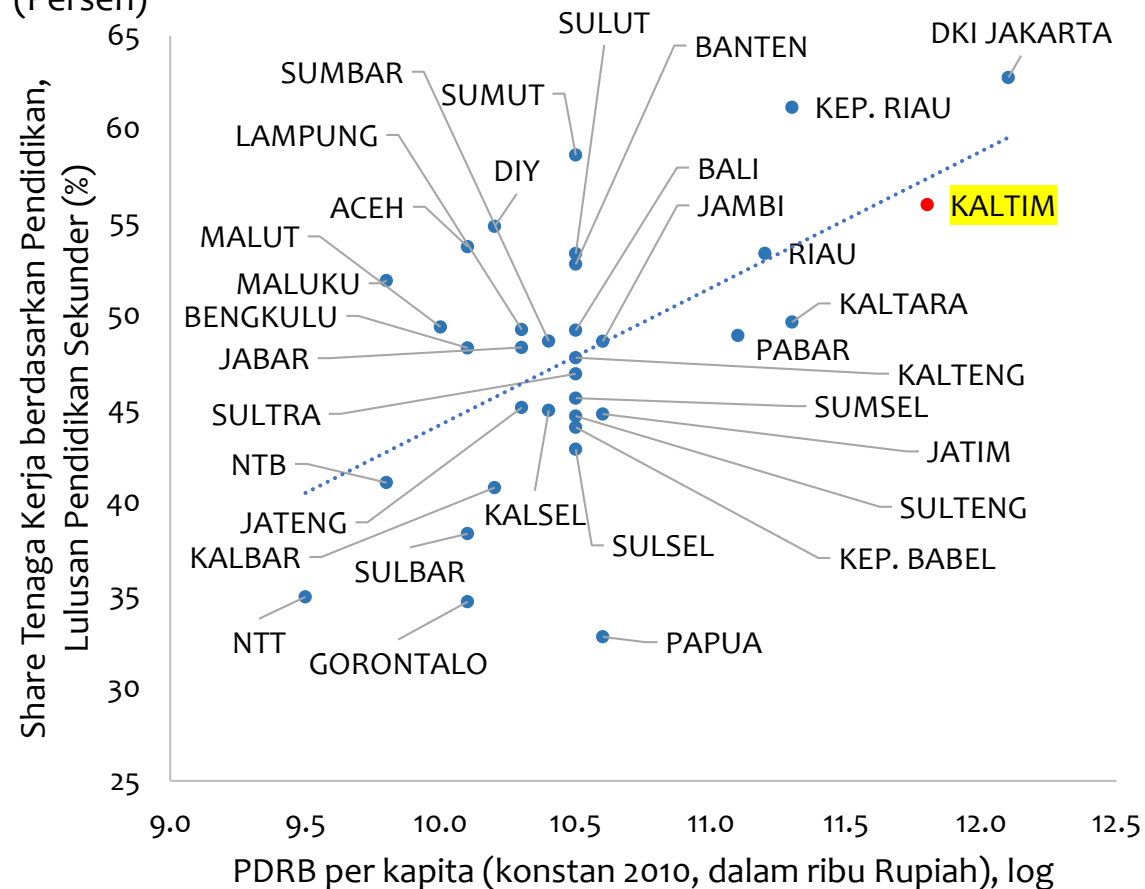
Sumber: BPS

*)Tidak termasuk DKI Jakarta

TENAGA KERJA LULUSAN PENDIDIKAN SEKUNDER DAN TERSIER BERADA DI BAWAH RATA-RATA DAERAH SEBANDING.

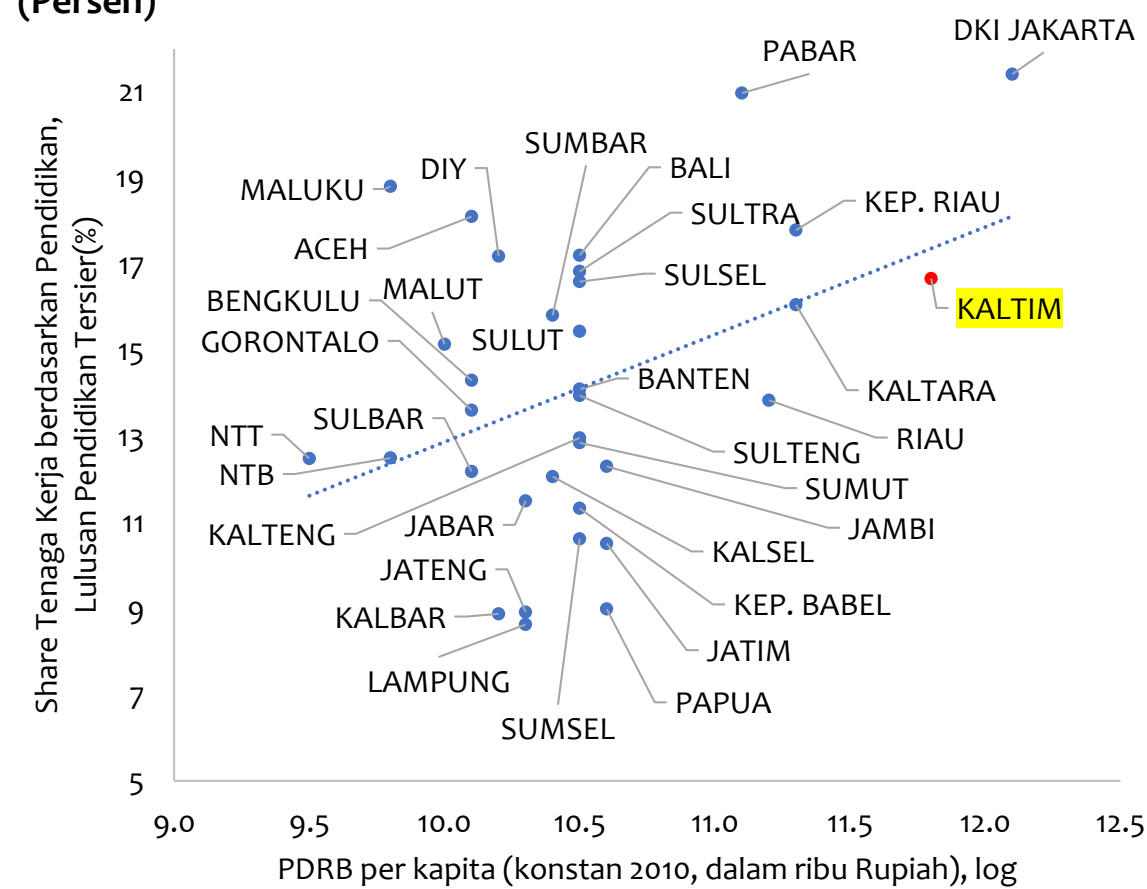
Share Tenaga Kerja berdasarkan Pendidikan,
Lulusan Pendidikan Sekunder, 2019

(Persen)



Share Tenaga Kerja berdasarkan Pendidikan,
Lulusan Pendidikan Tersier, 2019

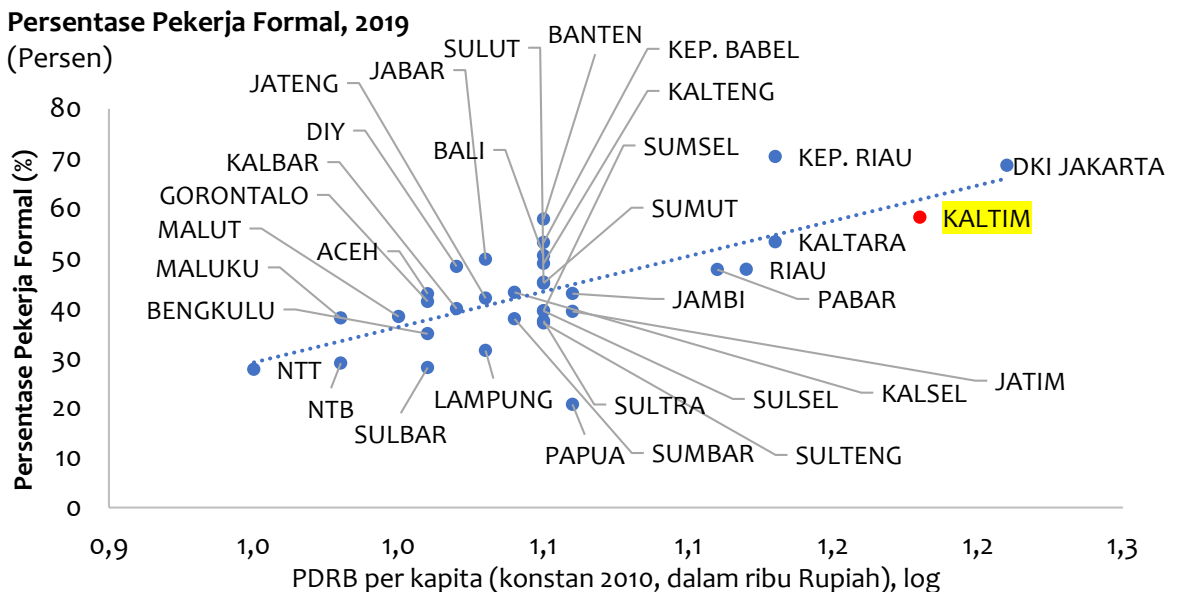
(Persen)



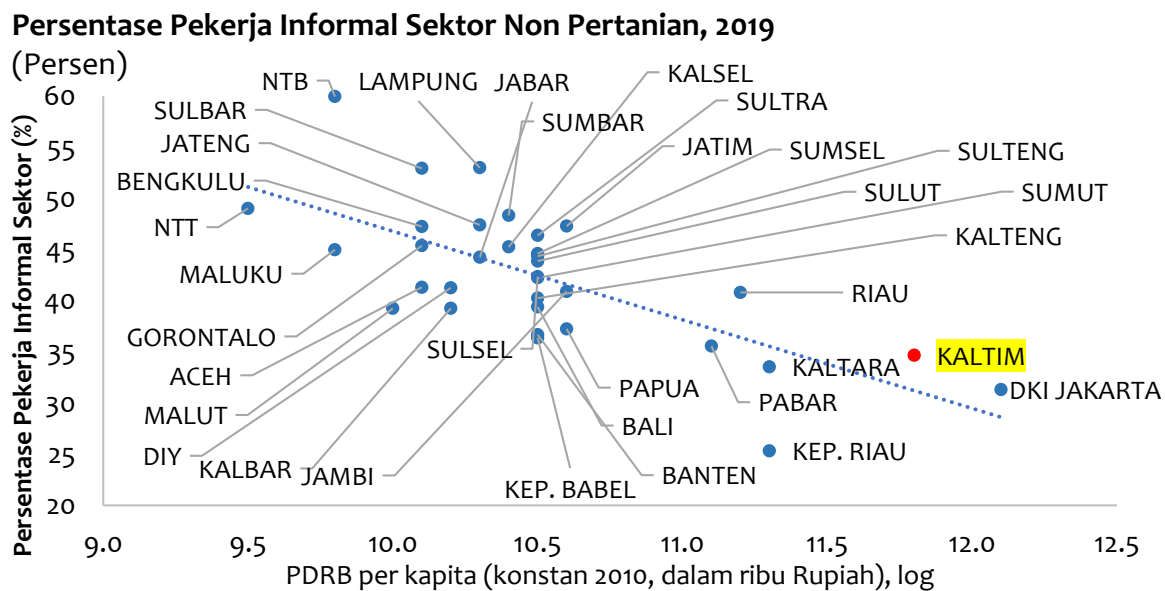
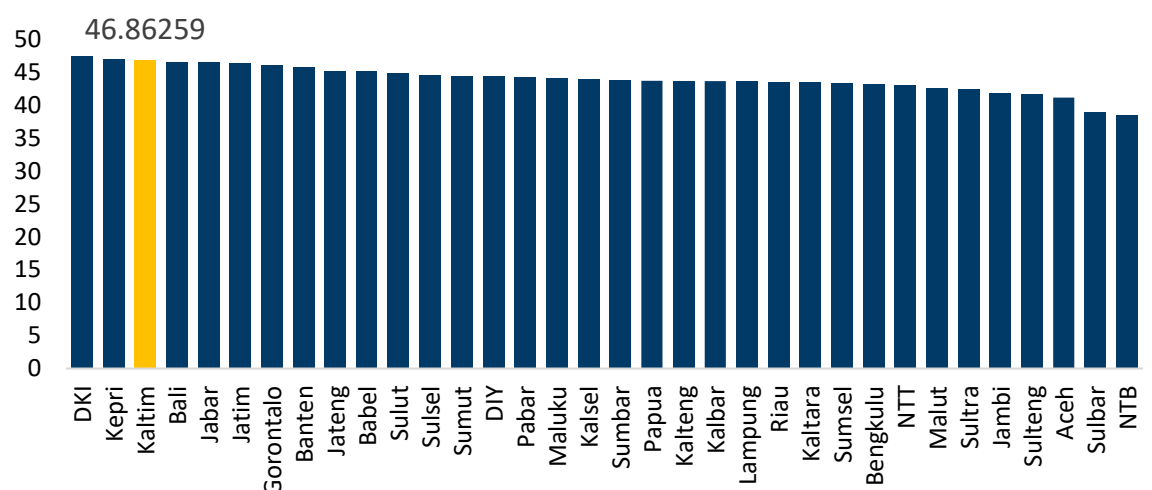
Sumber: BPS, Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Agustus 2019 (diolah)

*) sekunder = SMP/SMA/ sederajat, tersier = Diploma/Akademi/Universitas

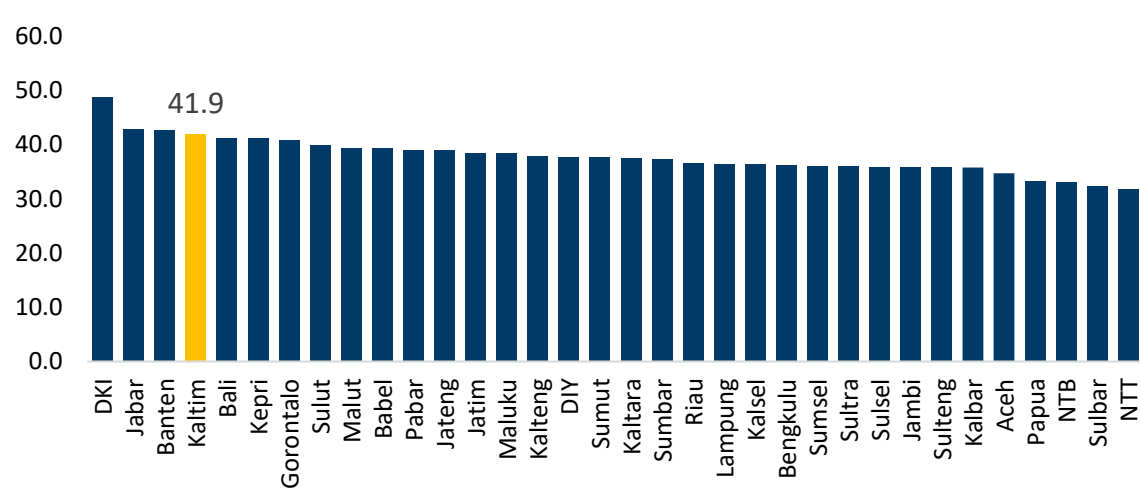
PERSENTASE TENAGA KERJA FORMAL KALTIM BERADA DI BAWAH RATA-RATA DIBANDINGKAN DAERAH SEBANDING, SEDANGKAN TENAGA KERJA INFORMAL BERADA DI ATAS RATA-RATA. RATA-RATA JAM KERJA PER MINGGU FORMAL DAN INFORMAL BERADA DIATAS RATA-RATA DAERAH SEBANDING



Rata-rata jam kerja per minggu, formal
(Sakernas, August 2018)

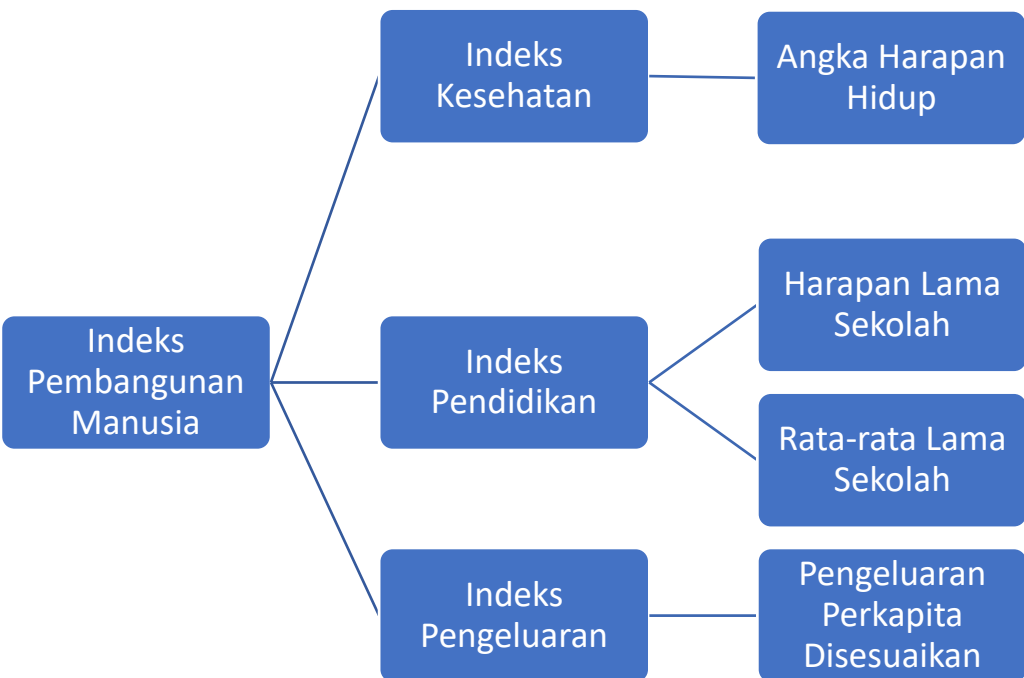


Rata-rata jam kerja per minggu, informal
(Sakernas, August 2018)



Sumber: BPS, Keadaan pekerja di Indonesia Tabel 20.1

SEKILAS PERHITUNGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



Penghitungan

• Indeks Kesehatan

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

• Indeks Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Angka Referensi Min-Max untuk Normalisasi

Komponen IPM	Satuan	Minimum	Maksimum
Angka Harapan Hidup saat lahir	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	18
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572.352

• Indeks Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Penghitungan IPM

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

HIGHLIGHT

- Dalam penghitungan proyeksi IPM, perlu memperhatikan komponen pembentuk IPM mulai dari indikator yang ada dalam komponen kesehatan (AHH), pendidikan (HLS dan RLS) dan pengeluaran (Pengeluaran Perkapita Disesuaikan).
- Hasil proyeksi masing-masing indikator kemudian dilakukan normalisasi dengan metode min-max sehingga proyeksi tidak hanya mengandalkan trend linier saja.

CAPAIAN IPM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Indeks Pembangunan Manusia Prov. Kalimantan Timur

	2019	2020	2021	2022	2023
Target RPJMD	75,30	75,43	75,56	75,76	76,87
Realisasi	76,61	76,24	76,88		

Rata-rata lama sekolah Prov. Kalimantan Timur

	2019	2020	2021	2022	2023
Target RPJMD	9,40	9,50	9,60	9,70	9,80
Realisasi	9,70	9,77	9,84	-	-

Harapan lama sekolah Prov. Kalimantan Timur

	2019	2020	2021	2022	2023
Target RPJMD	13,89	14,13	14,34	14,73	14,96
Realisasi	13,69	13,72	13,81	-	-

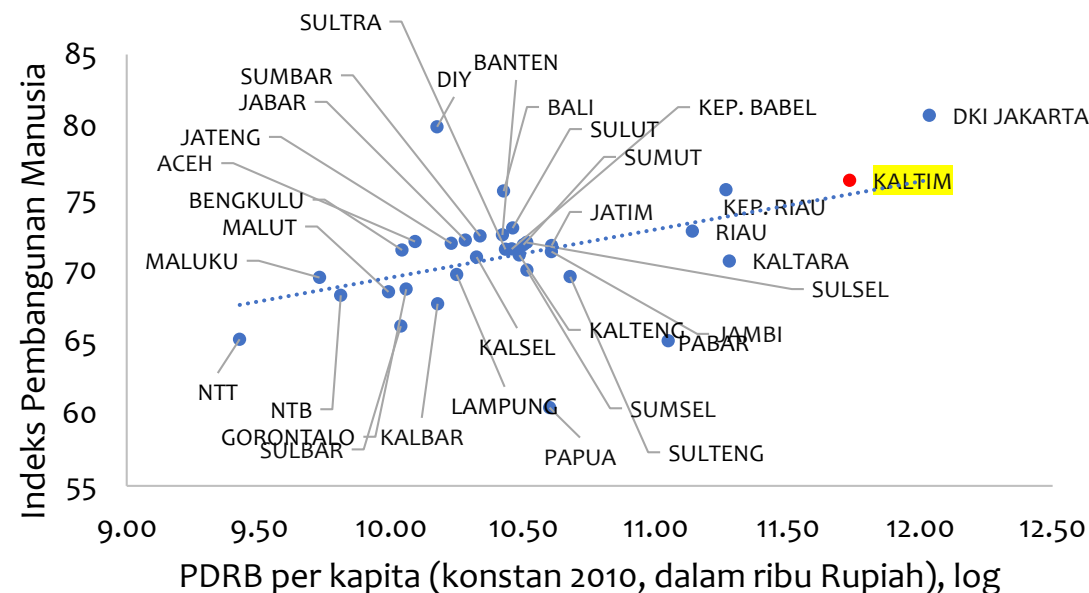
Angka Harapan Hidup Prov. Kalimantan Timur

	2019	2020	2021	2022	2023
Target RPJMD					
Realisasi	74,22	74,33	74,61		

Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Beli Masyarakat Prov. Kalimantan Timur

	2019	2020	2021	2022	2023
Target RPJMD					
Realisasi	12.359	11.728	12.116		

Indeks Pembangunan Manusia, 2020



- Secara keseluruhan, IPM Kaltim menunjukkan realisasi yang konsisten berada 0-2 poin di atas sasaran meskipun ada pengaruh dari pandemi.
- Dilihat dari komponennya, Rata-rata lama sekolah terus meningkat dan melebihi sasaran yang ditetapkan, sehingga masih ada ruang untuk menaikkan sasaran tersebut dalam perubahan RPJMD.
- Namun, dari harapan lama sekolah, Kaltim konsisten tidak dapat mencapai sasaran tersebut dengan pertumbuhan realisasi kurang dari pertumbuhan target RPJMD.
- Perlu menetapkan target ke depan yang lebih progressif

SEKILAS PERHITUNGAN DAN CAPAIAN TINGKAT KEMISKINAN KALTIM

- Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).
 - Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*.
 - kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
 - Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
- Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan/Headcount Index secara sederhana mengukur proporsi yang dikategorikan miskin dihitung dengan:

$$P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^0$$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

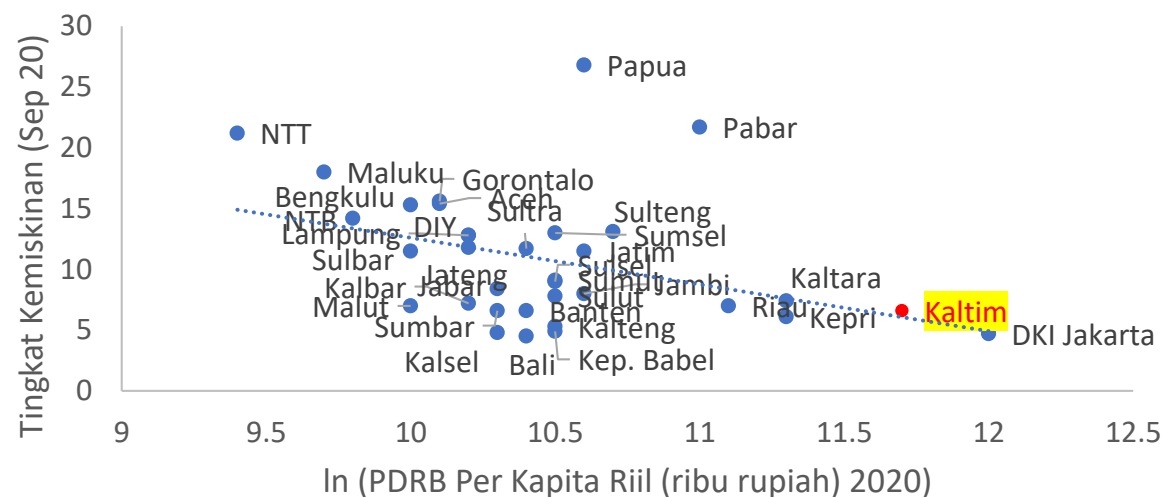
q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

Tingkat Kemiskinan Prov. Kalimantan Timur

	2019	2020	2021	2022	2023
Target RPJMD	6,00	5,94	5,87	5,78	5,70
Realisasi	5,94	6,10	6,54	-	-

Tingkat Kemiskinan (Sep 20)



- Kalimantan timur telah berhasil mencapai indikator tujuan RPJMD pada tahun 2019, namun tingkat kemiskinan meningkat seiring dengan fenomena pandemi COVID-19 pada tahun 2020
- Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa hal yang memengaruhi proyeksi kemiskinan:
 - PDRB Perkapita (dapat terlihat pada gambar di atas)
 - Garis Kemiskinan (dapat dikaitkan dengan inflasi)
 - Jumlah Penduduk (dapat melihat dari proyeksi SUPAS 2015-2045)

SEKILAS PERHITUNGAN INDEKS GINI

- Dalam mengukur tingkat ketimpangan di Indonesia, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas.
- Gini ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran.
 - Nilai gini ratio berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu).
 - Nilai gini ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.
- Koefisien gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.
- Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

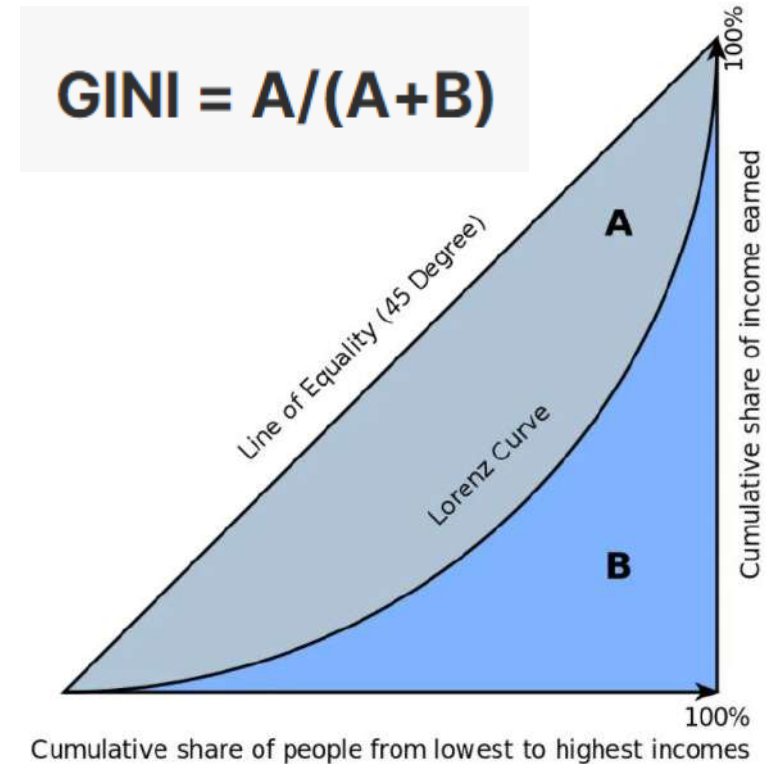
$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} \times (Fc_i + Fc_{i-1})$$

GR= Koefisien gini

f_{pi} = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

Fc_i = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

Fc_{i-1} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)



- Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa hal yang memengaruhi proyeksi kemiskinan:
 1. PDRB Perkapita (dapat terlihat pada gambar di atas)
 2. Jumlah Penduduk (dapat melihat dari proyeksi SUPAS 2015-2045)

Indeks Gini Prov. Kalimantan Timur

Indeks Gini, 2010-2021
(persen)



Scatter plot showing the relationship between GDRP per capita (constant 2010, in thousand IDR), log (X-axis) and Ratio Gini (Y-axis) for various Indonesian provinces. The plot shows a negative correlation, with a horizontal dotted line at Ratio Gini = 0.35. KALTIM is highlighted in yellow.

Province	GDRP per capita (constant 2010, in thousand IDR), log	Ratio Gini
DIY	10.2	0.48
GORONTALO	10.1	0.45
JABAR	10.3	0.44
PAPUA	10.6	0.43
SUMSEL	10.5	0.43
NTB	10.0	0.42
PABAR	11.1	0.41
DKI JAKARTA	12.0	0.40
SULUT	10.5	0.39
BALIK	10.6	0.39
NTN	10.4	0.38
SULBAR	10.2	0.38
JATENG	10.3	0.38
RIANTEN	10.5	0.38
NTT	9.5	0.37
SUMSEL	10.6	0.36
KEP. RIAU	11.3	0.35
BENGKULU	10.1	0.34
KALSEL	10.4	0.34
LAMPUNG	10.5	0.34
SULTENG	10.7	0.34
RIAU	11.2	0.34
MALUKU	9.8	0.33
ACEH	10.2	0.33
KALBAR	10.3	0.33
JAMBI	10.6	0.33
SUMUT	10.5	0.32
MALUT	10.1	0.31
SUMBAR	10.4	0.30
KALTIM	11.7	0.28

SEKILAS PERHITUNGAN NTP

Konsep Definisi

Perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (I_t) dengan indeks harga yang dibayar petani (I_b) yang dinyatakan dalam persentase.

NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian.

Kegunaan

- Untuk mengukur kemampuan tukar (term of trade) produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam memproduksi dan konsumsi RT
- Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan tingkat pendapatan petani dari waktu ke waktu yang dapat dipakai sebagai dasar kebijakan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan petani.
- Menunjukkan tingkat daya saing (competiveness) produk pertanian dibandingkan dengan produk lain.

Interpretasi

- a. $NTP > 100$: berarti petani mengalami surplus. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.
- b. $NTP = 100$: berarti petani mengalami impas/break even. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.
- c. $NTP < 100$: berarti petani mengalami defisit. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

$$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100\%$$

I_t : Indeks harga yang diterima petani

I_b : Indeks harga yang dibayar petani

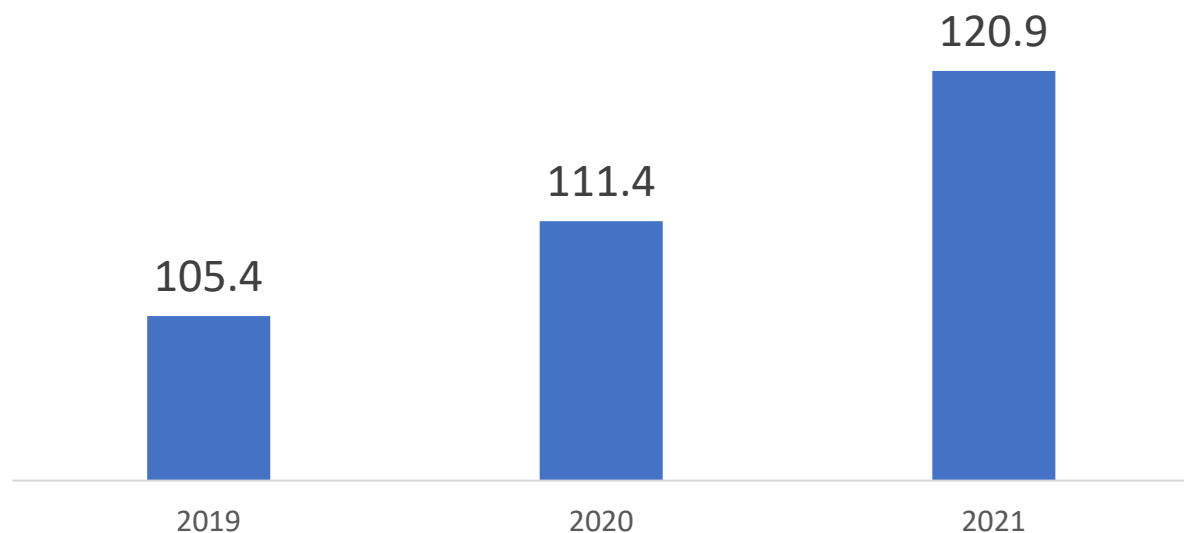
NTP : Nilai Tukar Petani

Selain dari Survei Harga Produsen Perdesaan (HPD) dan Survei Harga Konsumen Perdesaan (HKD), variabel penyusun indikator ini dilengkapi dari Survei Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (SDT NTP), Sensus Pertanian, Survei Struktur Ongkos Usaha Tani, Susenas Modul Konsumsi, dan SBH.

- Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa hal yang memengaruhi proyeksi :
 1. Nilai produksi pertanian
 2. Indeks Harga Konsumen

CAPAIAN NTP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

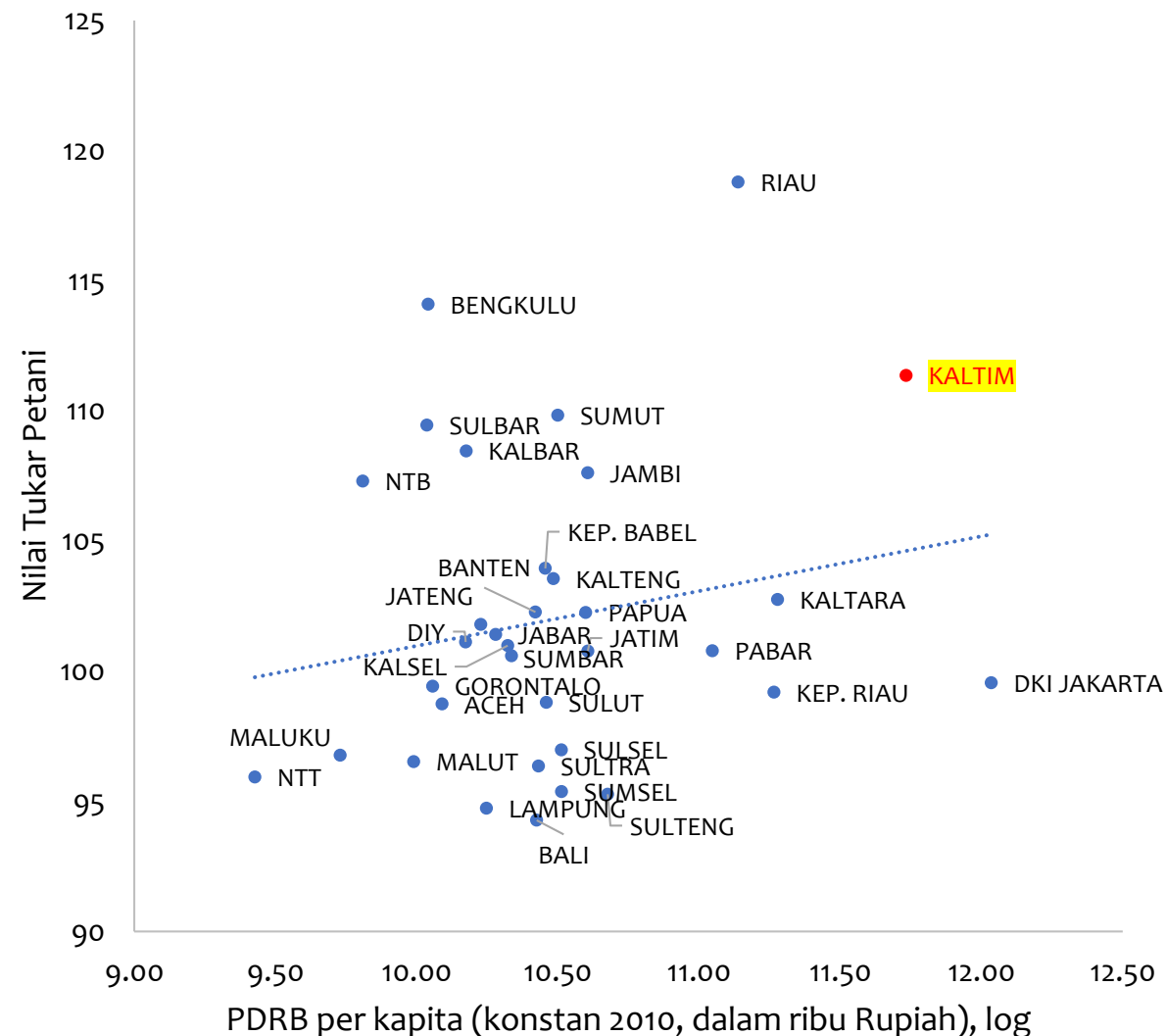
Realisasi Nilai Tukar Petani
(2018 = 100)



HIGHLIGHT

- Realisasi NTP menunjukkan peningkatan per tahunnya, hingga 120.9 persen dari tahun dasar. Kaltim memiliki NTP tertinggi ke-3 se-Indonesia pada tahun 2020.
- Meski demikian, NTP bukan merupakan salah satu sasaran maupun tujuan dari RPJMD Kaltim periode 2019-2023.
- Berdasarkan metode regresi sederhana, NTP Kaltim berada jauh di atas NTP rata-rata suatu daerah jika memiliki PDRB per kapita yang sama dengan kaltim. Hal tersebut menunjukkan kemampuan tukar petani yang lebih baik dibandingkan dengan daerah sebanding.

Nilai Tukar Petani 2020





VISI
INDONESIA
2045

- IN DEPTH: EXERCISE INDIKATOR LPE

BERBAGAI EXERCISE PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2021 - 2023: PROYEKSI BASELINE (BUSINESS AS USUAL)

1. Metode Naïve

Mean	2,20
Standard Error	0,84
Median	2,59
Range	9,14
Minimum	-2,85
Maximum	6,30

Metode ini mengidentifikasi data secara statistik deskriptif data pertumbuhan mulai tahun 2011-2020

2. Potensi Pertumbuhan*

	2011-2015	2016-2020	2011-2020
Pertumbuhan	2,86	1,46	2,16
Potensial (Trend)	3,81	3,81	3,81
Potensial (HP Filter)	2,47	1,81	2,14

3. Mempertimbangkan Pertumbuhan Nasional

	Ctc Q3 2021	2021**	2022**	2023***
Indonesia	3,24	3,80	5,20 – 5,50	5,30 – 6,10
Kaltim	2,34	3,11	5,30 – 5,50	5,57 – 6,03

*menggunakan data 1983-2020

**dalam pemutakhiran RKP 2022

***exercise awal dit PMAS

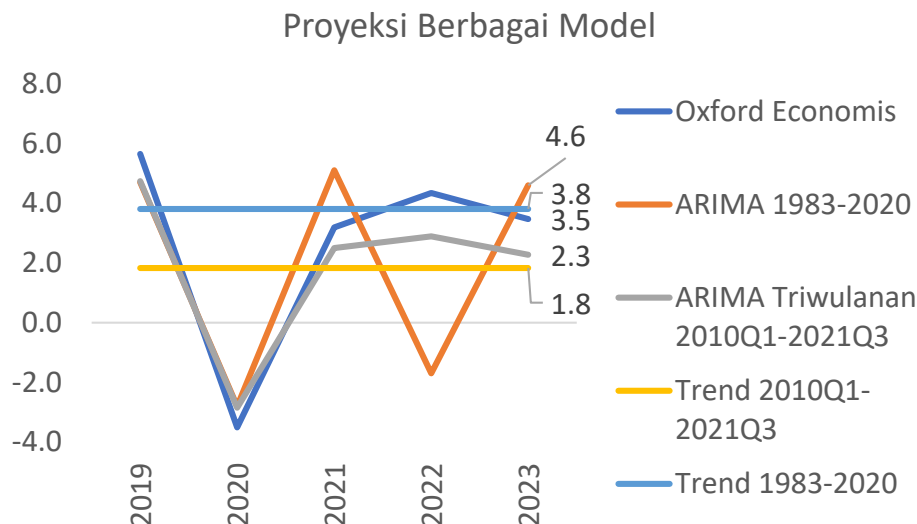
4. CAGR 5 Tahun

1,42%

$$CAGR = \left[\left(\frac{y_t}{y_{t-5}} \right)^{\frac{1}{5}} - 1 \right] \times 100$$

Compounded annual growth rate (CAGR) adalah tingkat pertumbuhan per tahun selama rentang periode waktu tertentu. Rumus di Excel untuk 5 tahun : $((RY2020/RY2015)^{(1/5)}-1)*100$

5. Hasil Pemodelan Proyeksi



Sumber: Oxford Economics dan Exercise Dit PMAS, Bappenas

Highlight

- Proyeksi baseline dengan memperhatikan berbagai metoda menemukan:
 - Range pertumbuhan antara 1,4 – 4,6 persen per tahun.
 - Sasaran yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk daerah tinggi karena sasaran pertumbuhan ekonomi Nasional yang tinggi
- Untuk menguatkan target pertumbuhan, perlu dilakukan pendetailan dengan membentuk Kerangka Ekonomi Makro yang dapat menggambarkan perekonomian secara menyeluruh.

EXERCISE BREAKDOWN SASARAN PDRB PROVINSI KALTIM 2021 – 2023: SISI PENGELUARAN



Komponen	CtoC Q3 2021	Outlook 2021	2022	2023
Konsumsi Rumah Tangga	1,4	2,2	3,8 – 3,9	3,9 – 4,3
Konsumsi LNPR	0,1	0,3	6,9 – 7,1	5,1 – 5,4
Konsumsi Pemerintah	-0,1	1,9	4,1 – 4,3	4,1 – 4,5
Pembentukan Modal Tetap Bruto	8,0	7,0	7,6 – 8,0	8,0 – 8,6
Perubahan Inventori	-5,3	-4,8	14,7 – 15,1	8,4 – 9,1
Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri	4,3	5,4	8,2 – 8,6	9,7 – 10,2
Impor Barang dan Jasa Luar Negeri	37,6	37,6	27,0 – 28,3	25,6 – 27,7
Net Ekspor Antar Daerah	10,0	13,3	12,0 – 12,5	10,4 – 12,1
PDRB	2,3	3,1	5,3 – 5,6	5,6 – 6,0



INVESTASI/PMTB

- Turunnya kasus dan meluasnya vaksin akan perlahan meningkatkan investasi.
- Investasi didorong oleh proyek-proyek pendukung infrastruktur IKN.
- Tingginya harga komoditas mendorong berlanjutnya pertumbuhan investasi.



KONSUMSI RT

- Melandainya kasus COVID-19 serta meluasnya vaksinasi diperkirakan akan meningkatkan konsumsi masyarakat.
- Tingkat keyakinan masyarakat diperkirakan akan pulih seiring dengan kurva peningkatan kasus COVID-19 yang terus melandai.
- Pemulihan kelas menengah akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi.



EKSPOR IMPOR

- Ekspor diperkirakan akan mengalami akselerasi seiring dengan percepatan pemulihan ekonomi mitra dagang utama dan meningkatnya harga komoditas dunia, seperti China dan AS serta akselerasi program vaksinasi.

Risiko ke Bawah

- *Permanent scar* yang dirasakan oleh tenaga kerja dan perusahaan. Pengangguran tidak cepat terserap, dan neraca keuangan perusahaan terganggu.
- Perlambatan ekonomi China akibat krisis properti.
- Tren *Green recovery* yang menyebabkan berkurangnya permintaan batu bara dunia.

Sumber: Exercise Dit PMAS, Bappenas bersifat indikatif sebagai referensi

EXERCISE BREAKDOWN SASARAN PDRB PROVINSI KALTIM 2021 – 2023: SISI LAPANGAN USAHA

KONSTRUKSI

- Proyek-proyek pendukung infrastruktur IKN mendukung output sektor konstruksi

PERTAMBANGAN

- Tingginya harga komoditas mendorong peningkatan produksi batu bara

INDUSTRI PENGOLAHAN

- Peningkatan industri didorong oleh adanya peningkatan industri pengolahan migas sejalan dengan peningkatan sektor pertambangan, dan peningkatan industri makanan dan minuman sejalan dengan peningkatan sektor pertanian baik yang *disupply* dari dalam Kaltim maupun dari *Food Estate* di Kalteng.

JASA – JASA

- Perdagangan, dan Transportasi kembali meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat dan pulihnya daya beli
- Infokom akan terus meningkat didorong oleh peningkatan digitalisasi serta perluasan akses telekomunikasi terutama untuk mendukung wilayah IKN
- Jasa Kesehatan akan tetap tumbuh tinggi didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki pola hidup sehat

Komponen	CtoC Q3 2021	Outlook 2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,1	1,3	4,7 – 4,9	4,9 – 5,3
Pertambangan dan Penggalian	2,6	3,0	4,2 – 4,4	4,4 – 4,8
Industri Pengolahan	2,0	3,3	6,4 – 6,7	6,5 – 7,0
Pengadaan Listrik dan Gas	1,2	1,2	7,8 – 8,1	8,2 – 8,8
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,3	5,6	7,0 – 7,4	7,4 – 8,0
Konstruksi	1,4	2,2	5,5 – 5,8	5,8 – 6,3
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,8	3,2	7,4 – 8,0	8,0 – 9,0
Transportasi dan Pergudangan	2,4	3,4	8,3 – 8,7	8,8 – 9,5
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,8	2,6	7,9 – 8,5	8,6 – 9,7
Informasi dan Komunikasi	7,5	7,8	8,3 – 8,7	8,7 – 9,4
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,4	3,8	3,1 – 3,2	3,3 – 3,5
Real Estate	-1,6	-1,1	3,3 – 3,4	3,4 – 3,7
Jasa Perusahaan	1,7	1,6	6,1 – 6,4	6,4 – 6,9
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,4	1,7	3,7 – 3,7	4,2 – 4,3
Jasa Pendidikan	4,8	5,9	8,0 – 8,5	8,5 – 9,4
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16,3	17,9	9,3 – 9,8	9,8 – 10,8
Jasa lainnya	1,0	3,6	9,4 – 9,9	10,0 – 11,0
PDRB	2,3	3,1	5,3 – 5,6	5,6 – 6,0

Sumber: Exercise Dit PMAS, Bappenas bersifat indikatif sebagai referensi



VISI
INDONESIA
2045

KALIMANTAN TIMUR DALAM PERSPEKTIF *GROWTH DIAGNOSTIC*

SEKILAS MENGENAI GROWTH DIAGNOSTICS

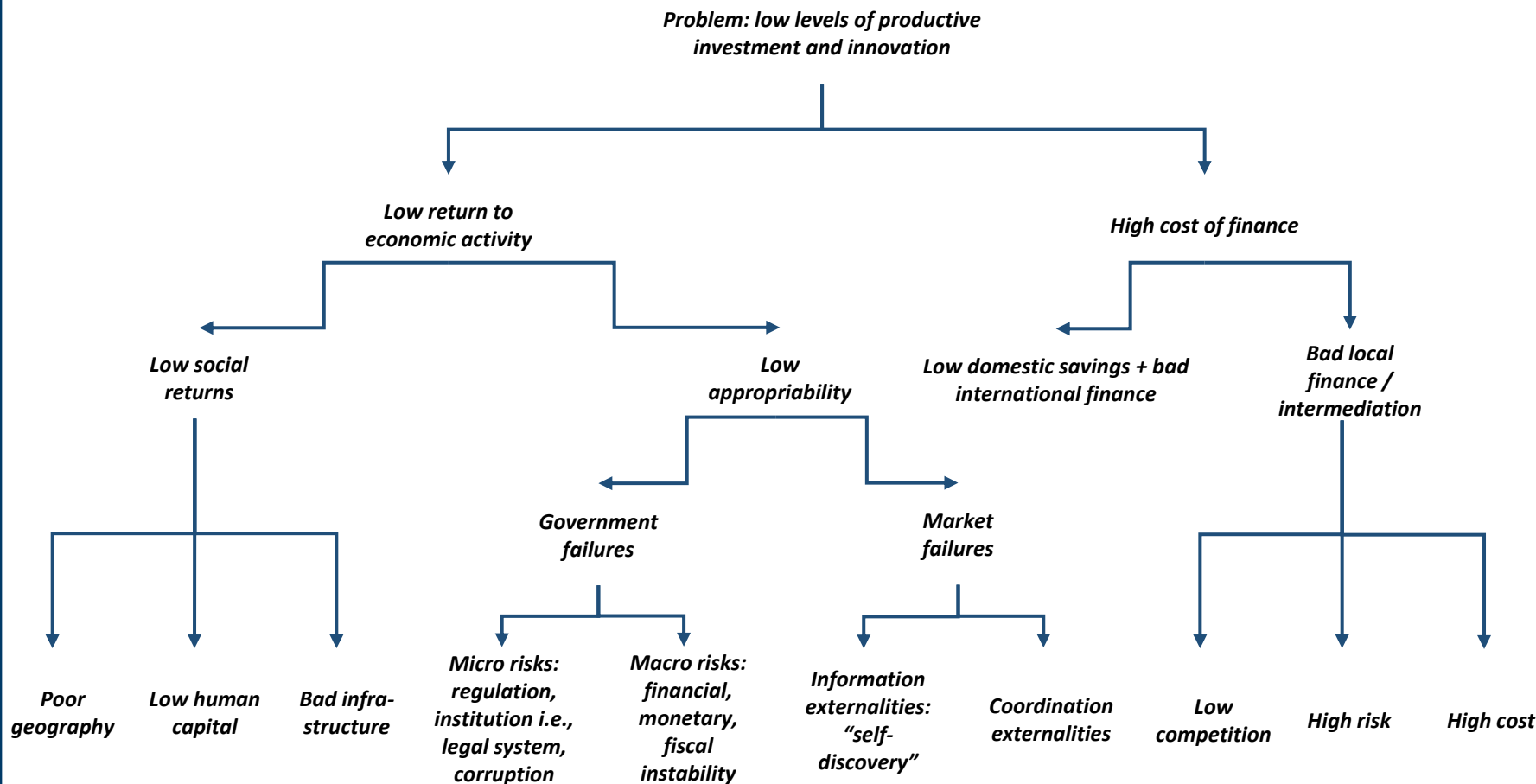
Growth Diagnostics

“Metode untuk mencari kendala yang paling mengikat (*the most binding constraint*) pada pertumbuhan ekonomi suatu negara.”

Indikator **Binding Constraint**:

Jika sebuah kendala mengikat (binding constraint), maka:

1. **Shadow price** (biaya yang timbul dari kendala tersebut) akan tinggi
2. Apabila kendala diatasi, akan memberikan hasil yang signifikan
3. Sudah ada upaya dari pelaku ekonomi untuk menanggulangi kendala/ mencari jalan pintas dari kendala tersebut
4. Pelaku ekonomi yang bergantung pada faktor yang terhambat tersebut sulit untuk berkembang (analogi Camels and Hippos – di daerah gurun yang sulit air, unta lebih banyak daripada kuda nil)



Langkah Analisis

1. Menentukan *growth process* dan *growth question*

2. Menelusuri pohon diagnosis

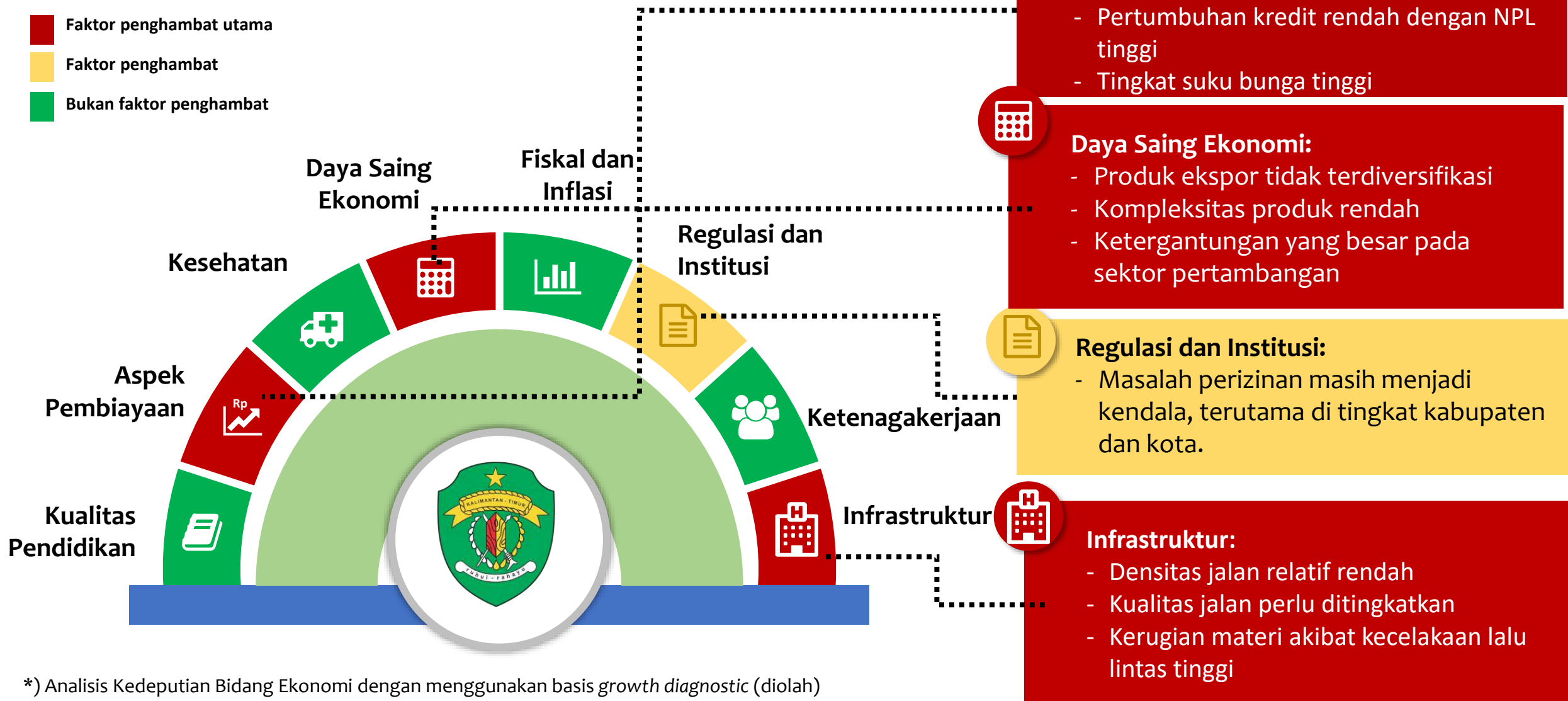
3. Menentukan *syndrome & symptoms* (gejala)

4. Mencari implikasi dari *syndrome* tersebut

5. Proses iteratif hingga tercapai kesimpulan dan rekomendasi

SUMMARY ISU MAKRO – DAERAH: PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Faktor penghambat utama
- Faktor penghambat
- Bukan faktor penghambat



*) Analisis Kedeputan Bidang Ekonomi dengan menggunakan basis *growth diagnostic* (diolah)

DAYA SAING EKONOMI

TEMUAN UTAMA



MOST BINDING CONSTRAINT

Terlalu berpusatnya ekonomi Kalimantan Timur pada komoditas primer (produk pertambangan) adalah sindrom dari lambatnya *self-discovery*.

Inovasi dan penciptaan produk baru diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur.

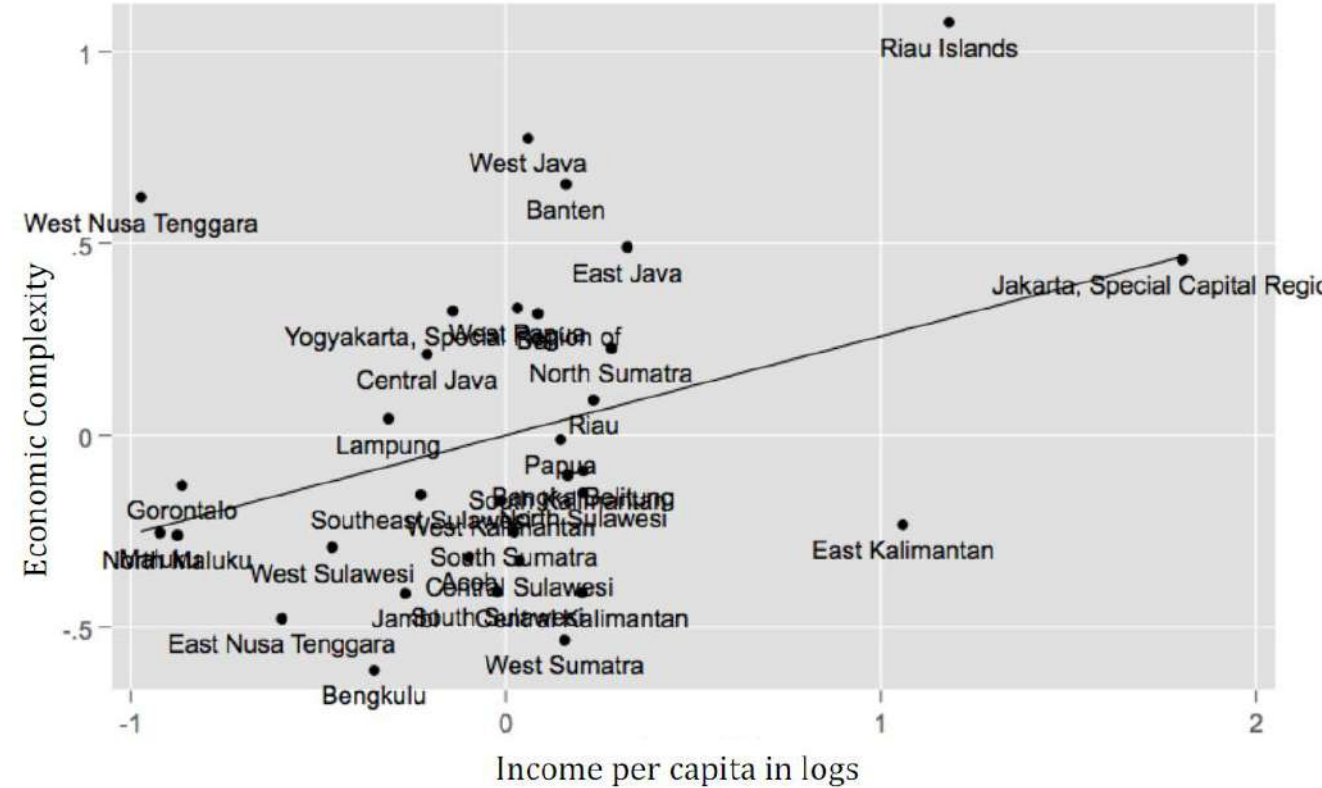
BUKTI

BENCHMARKING DENGAN DAERAH LAIN

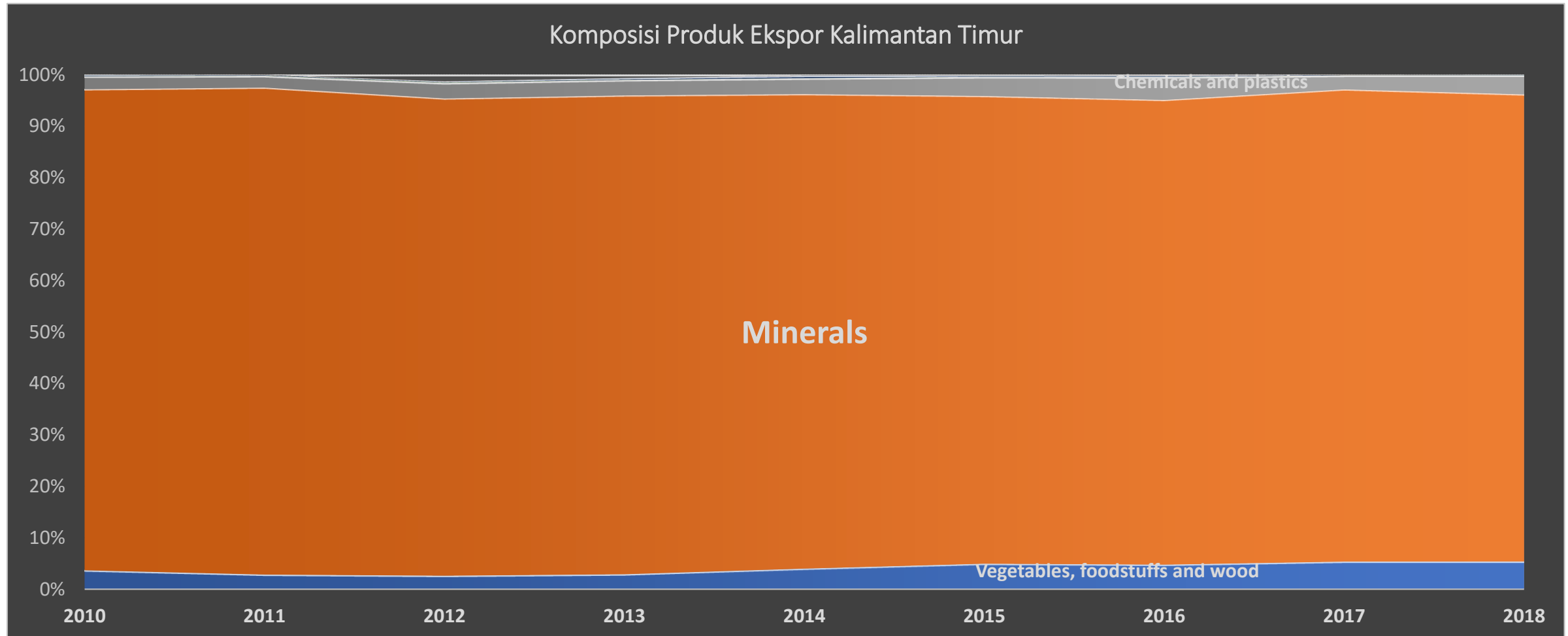
- *Economic Complexity Index* Kalimantan Timur rendah, menunjukkan produk ekspor yang tidak beragam dan tidak unik
 - Perekonomian mengandalkan sektor komoditas dan manufaktur berbasis komoditas
-

STAKEHOLDERS' PERCEPTION

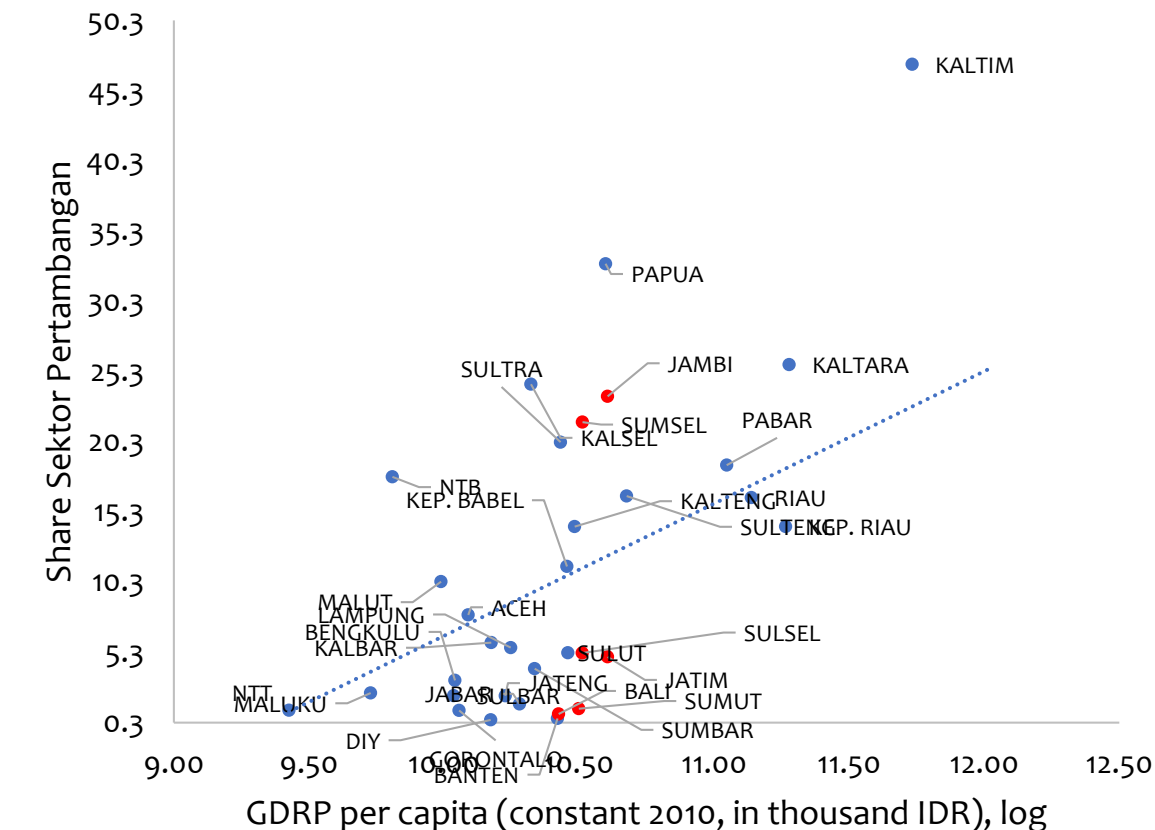
- Produk pertambangan khususnya batu bara banyak yang masih berkualitas rendah dengan akses pasar yang terbatas
- Keterbatasan *know-how* dan teknologi dalam pengolahan komoditas primer:
 - Komoditas seperti karet mentah yang dihasilkan oleh Kalimantan Timur harus diekspor ke daerah lain karena tidak memiliki pengalaman untuk proses pengolahannya



BATU BARA MENJADI KOMODITAS EKSPOR UTAMA YANG MENCAPAI LEBIH DARI 90 PERSEN TOTAL EKSPOR KALIMANTAN TIMUR



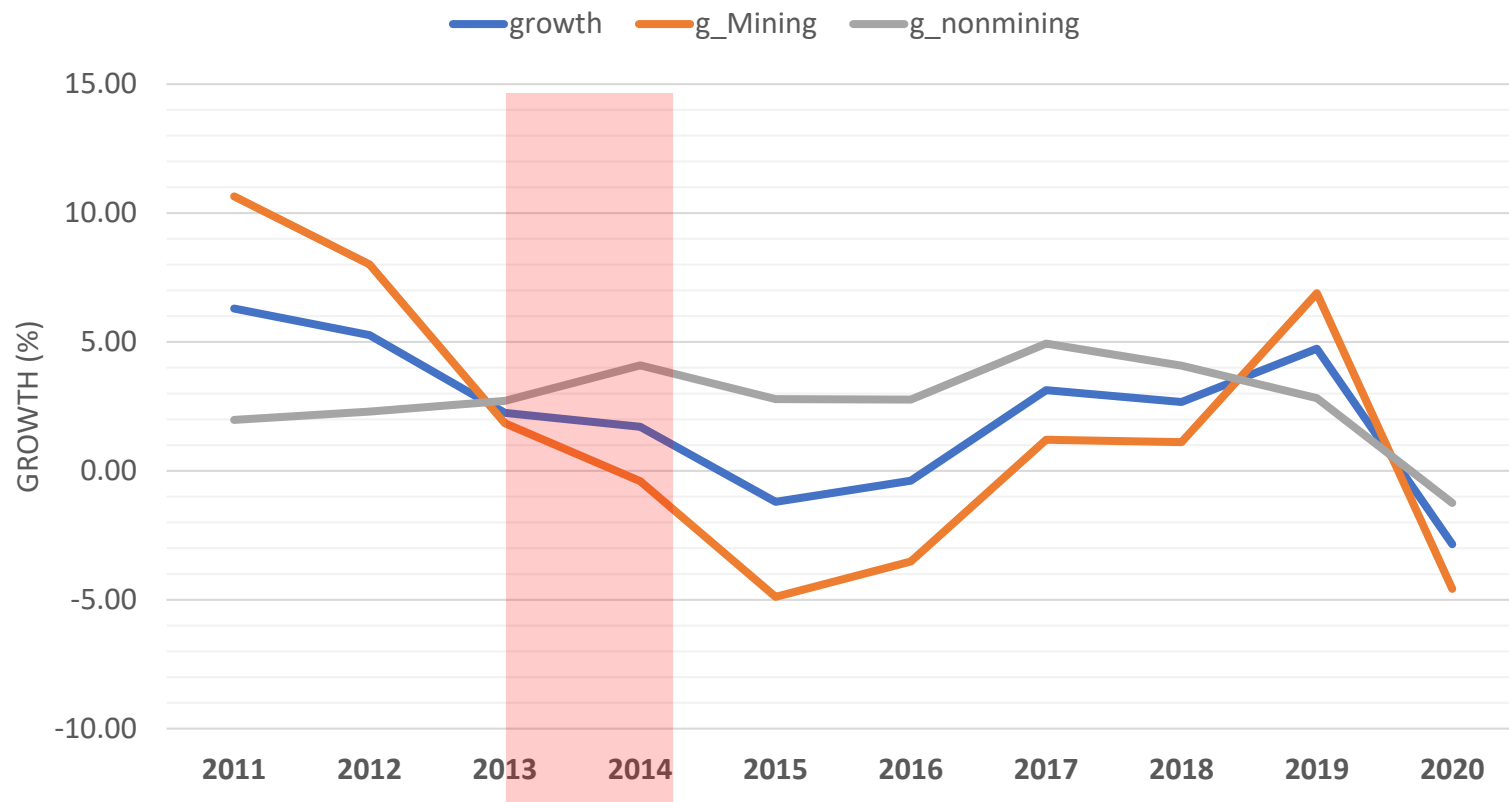
Share Sektor Pertambangan, 2020 (Tahun)



Kedeputan Bidang Ekonomi

PERTUMBUHAN PDRB KALIMANTAN TIMUR DIPENGARUHI OLEH SEKTOR PERTAMBANGAN

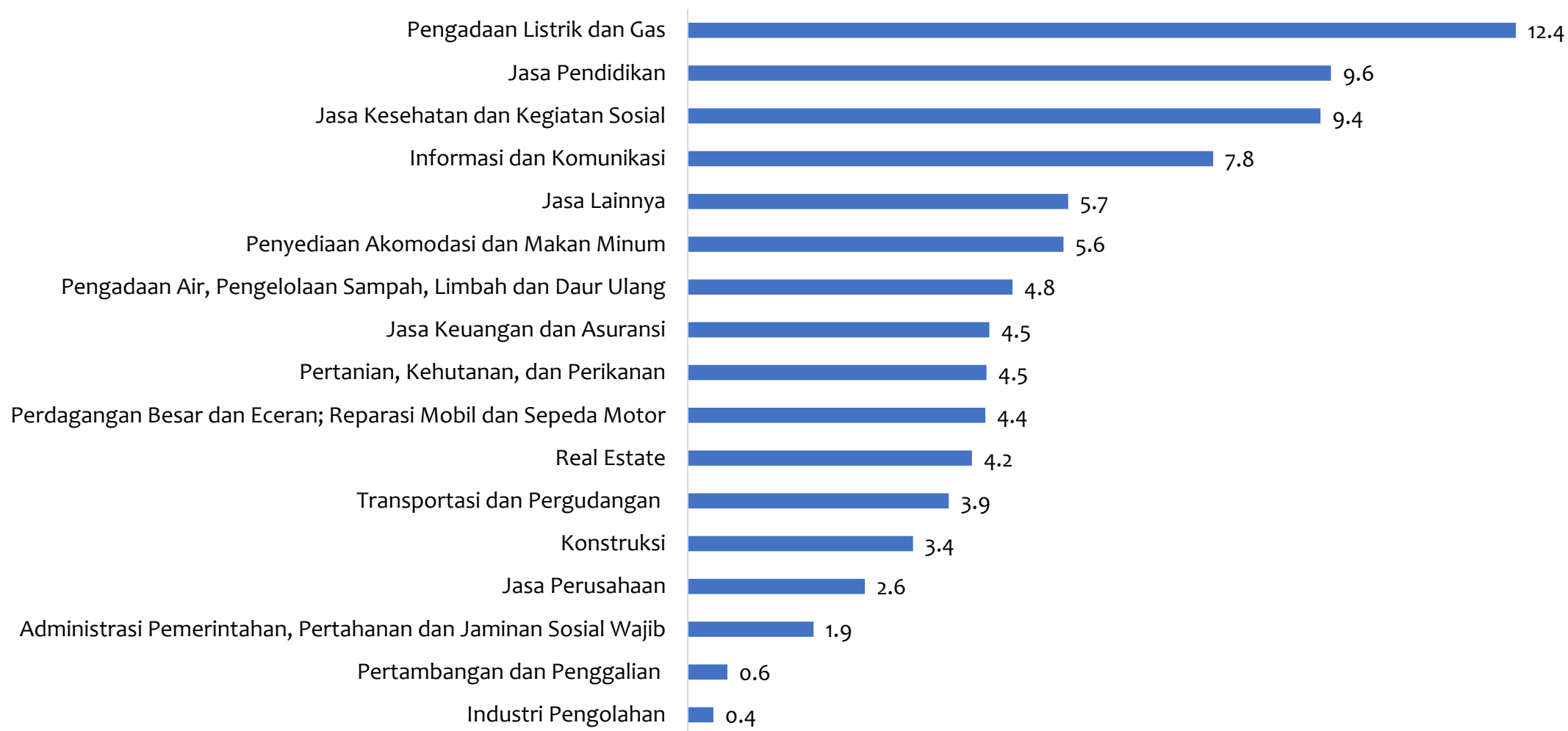
Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur (% yoy)



Sejak tahun 2013, pertumbuhan sektor pertambangan berada di bawah pertumbuhan total Kalimantan Timur. Namun, sektor non pertambangan tidak mampu tumbuh tinggi menggantikan peran sektor pertambangan.

SEKTOR PERTAMBANGAN RELATIF TUMBUH SANGAT TERBATAS

Rata-Rata Pertumbuhan berdasarkan Lapangan Usaha, 2011-2020
(Persen)

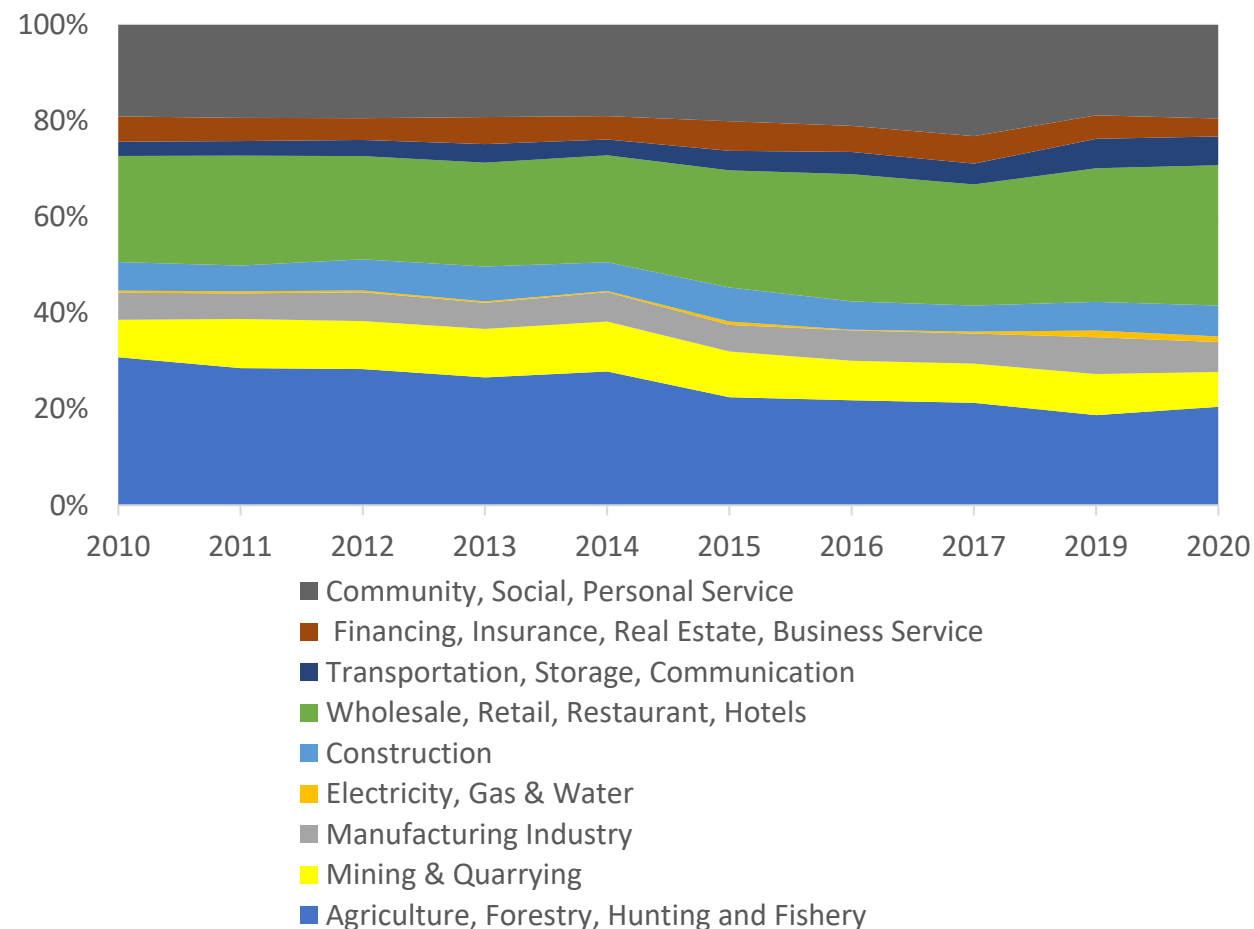


Sumber: BPS

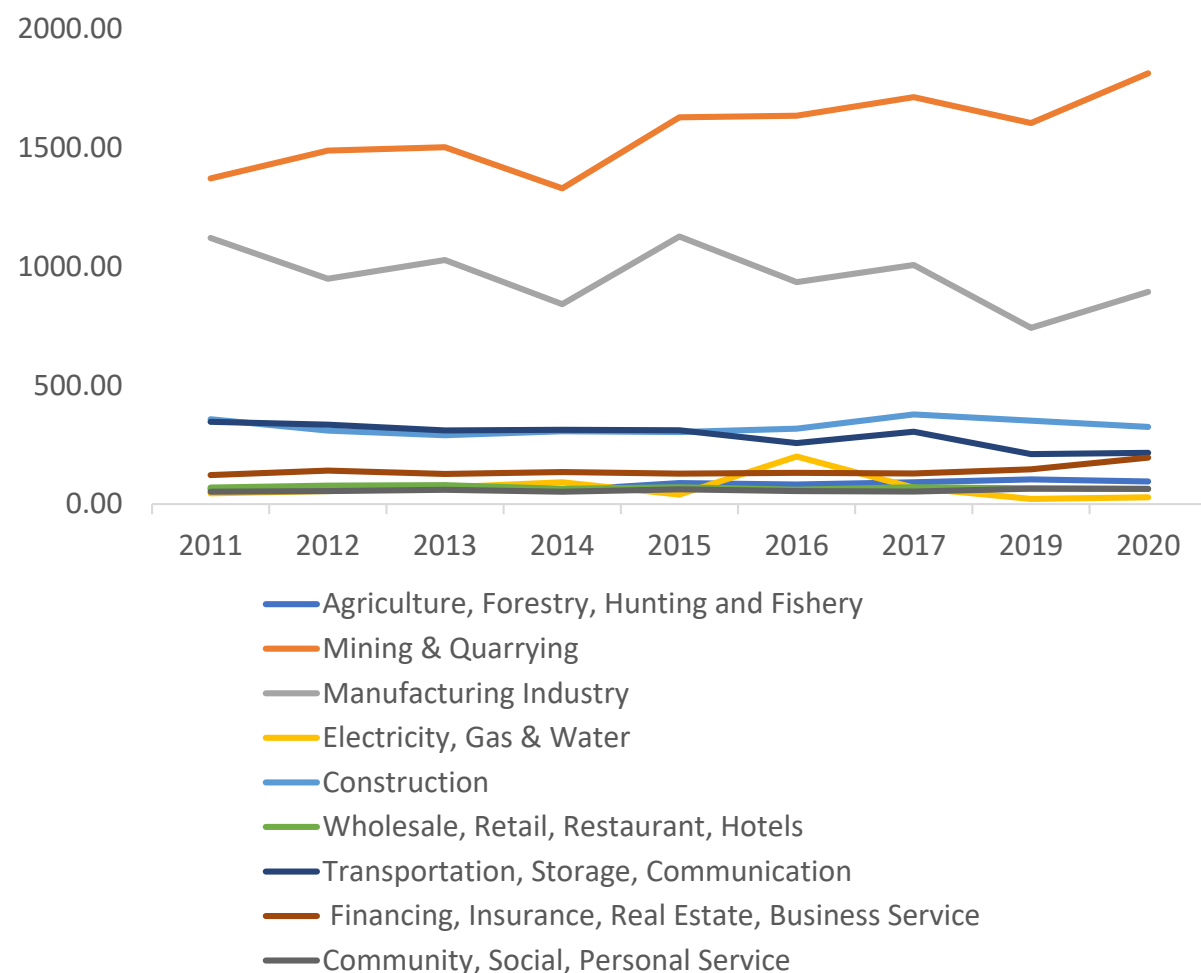
MESKI TINGGI *SHARE*-NYA TERHADAP PDRB, PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTAMBANGAN KECIL, HANYA KURANG DARI 10 PERSEN

Dilihat dari *share*-nya, tenaga kerja di Kalimantan Timur didominasi oleh sektor terkait pariwisata dan perdagangan, pertanian dan jasa sosial, personal dan komunitas. Meski demikian, nilai tambah yang dihasilkan setiap pekerja terbesar dihasilkan oleh sektor pertambangan dan manufaktur.

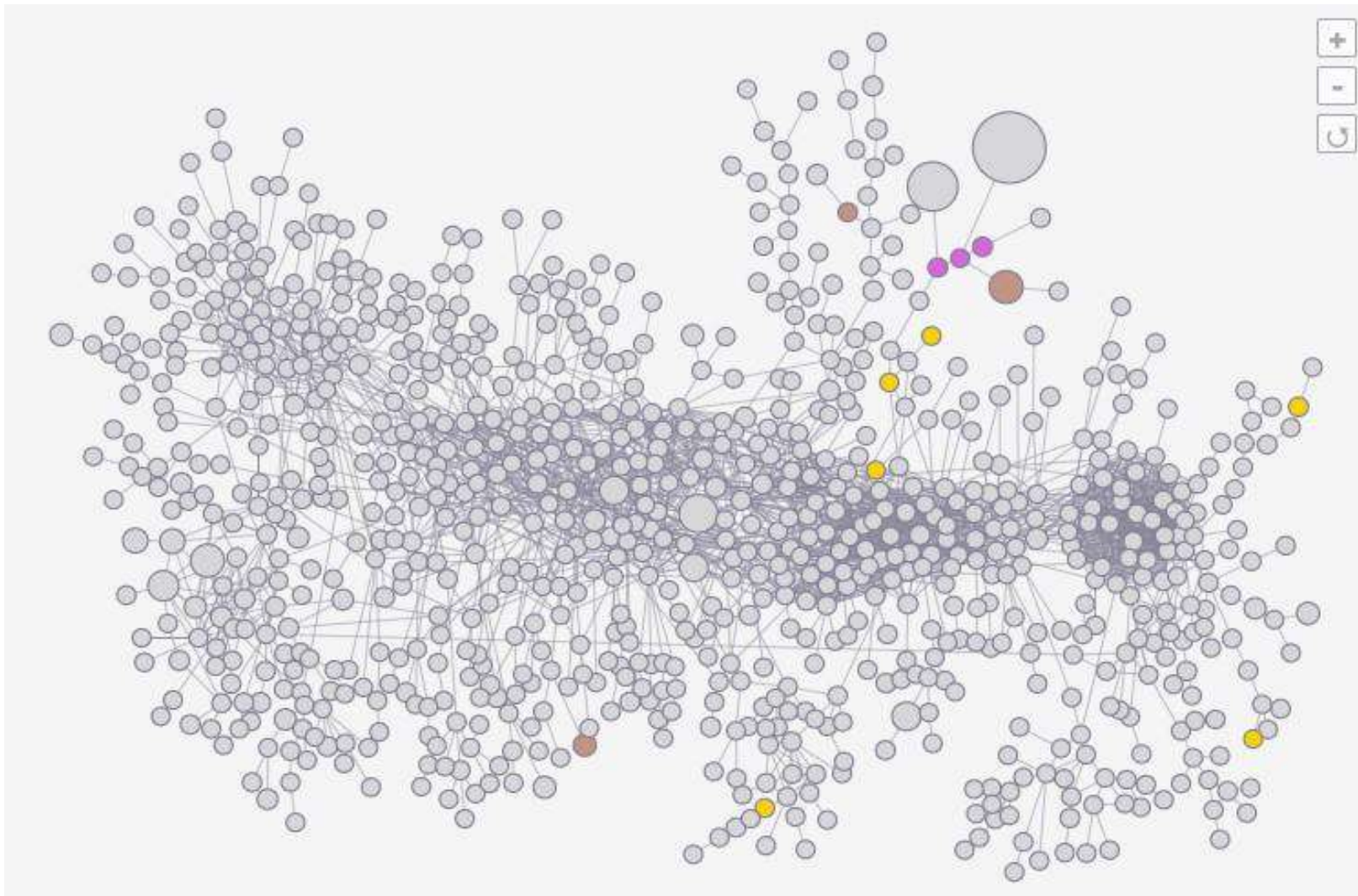
Share Tenaga Kerja Per Sektor



Rasio PDRB Per Pekerja



KOMPLEKSITAS PRODUK YANG RENDAH MEMBUAT POTENSI KALIMANTAN TIMUR UNTUK MENGEMBANGKAN PRODUK BARU CENDERUNG TERBATAS



- *Product space** Kalimantan Timur di tahun 2016 menunjukkan bahwa ekspor berada pada produk bernilai tambah rendah: mineral dan pertanian.
- Produk ekspor Kalimantan Timur terletak pada sisi terluar *product space* yang memiliki keterbatasan hubungan dengan produk lain.
- Dibutuhkan upaya yang besar untuk dapat beralih ke produk lain

* *Semakin mendekati tengah, semakin dekat keterkaitan suatu produk dengan produk lainnya.*



Sumber: CID Harvard

TEMUAN UTAMA



MOST BINDING CONSTRAINT

Rendahnya densitas dan kualitas jalan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur.

Untuk dapat mengembangkan sektor non komoditas, misalkan manufaktur, perbaikan pada konektivitas transportasi darat menjadi kunci bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi.

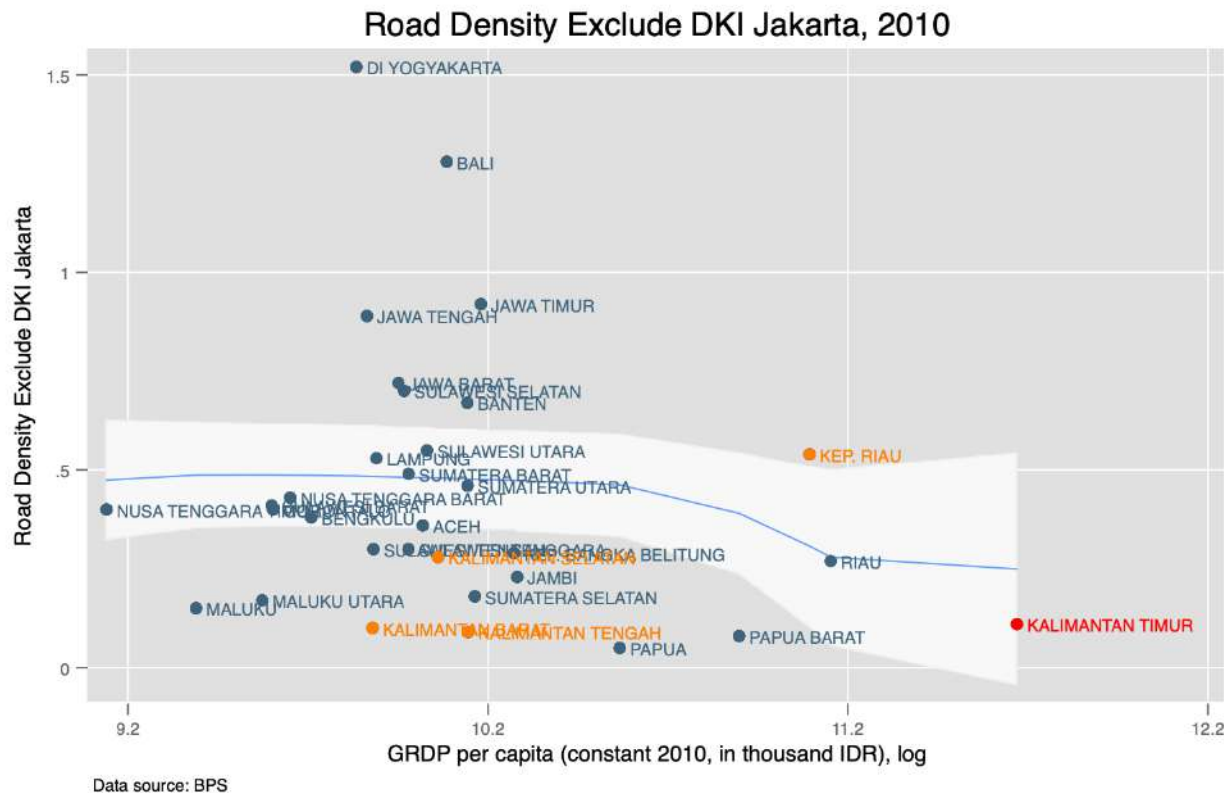
BUKTI

- Densitas jalan lebih rendah dibandingkan daerah sebanding
- Kualitas jalan dengan kondisi baik dan sangat baik lebih rendah dari daerah sebanding
- Kerugian materi yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas tertinggi di antara provinsi lainnya di Pulau Kalimantan

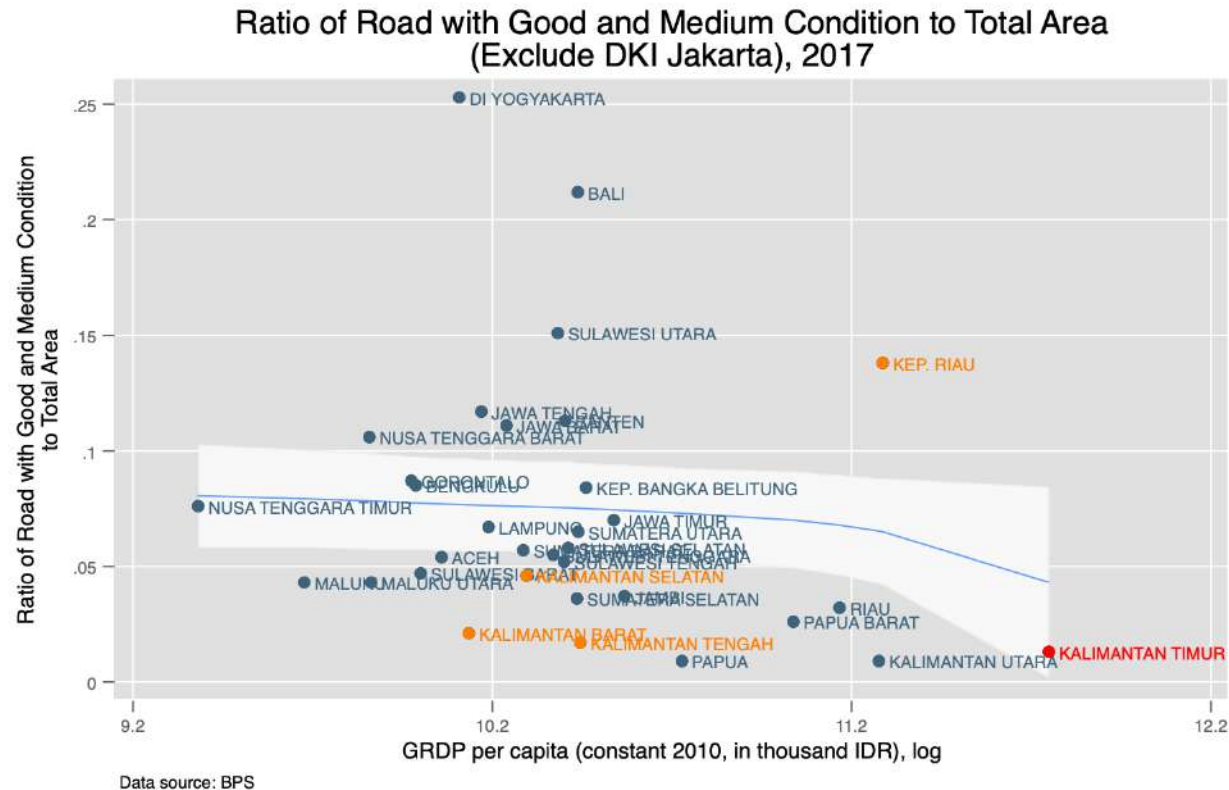
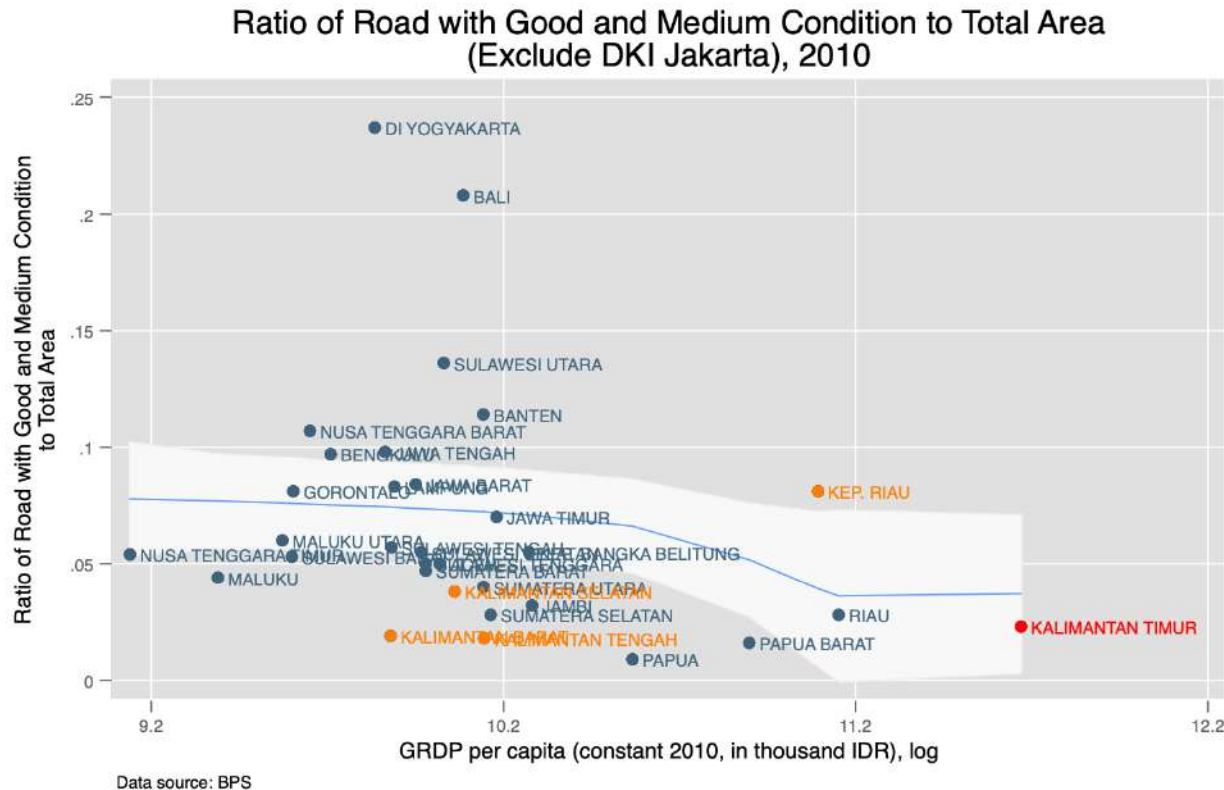
CATATAN

- Kualitas jalan antar kota/kabupaten di Kalimantan Timur sangat timpang
- Perusahaan pertambangan banyak yang membuat jalan sendiri untuk mempermudah akses menuju lokasi pertambangan

DENSITAS JALAN (PROPORSI PANJANG JALAN TERHADAP LUAS WILAYAH) KALIMANTAN TIMUR BERADA DI BAWAH RATA-RATA DAERAH SEBANDING



TINGKAT KUALITAS JALAN DENGAN KONDISI BAIK BERADA DI BAWAH RATA-RATA DAERAH SEBANDING

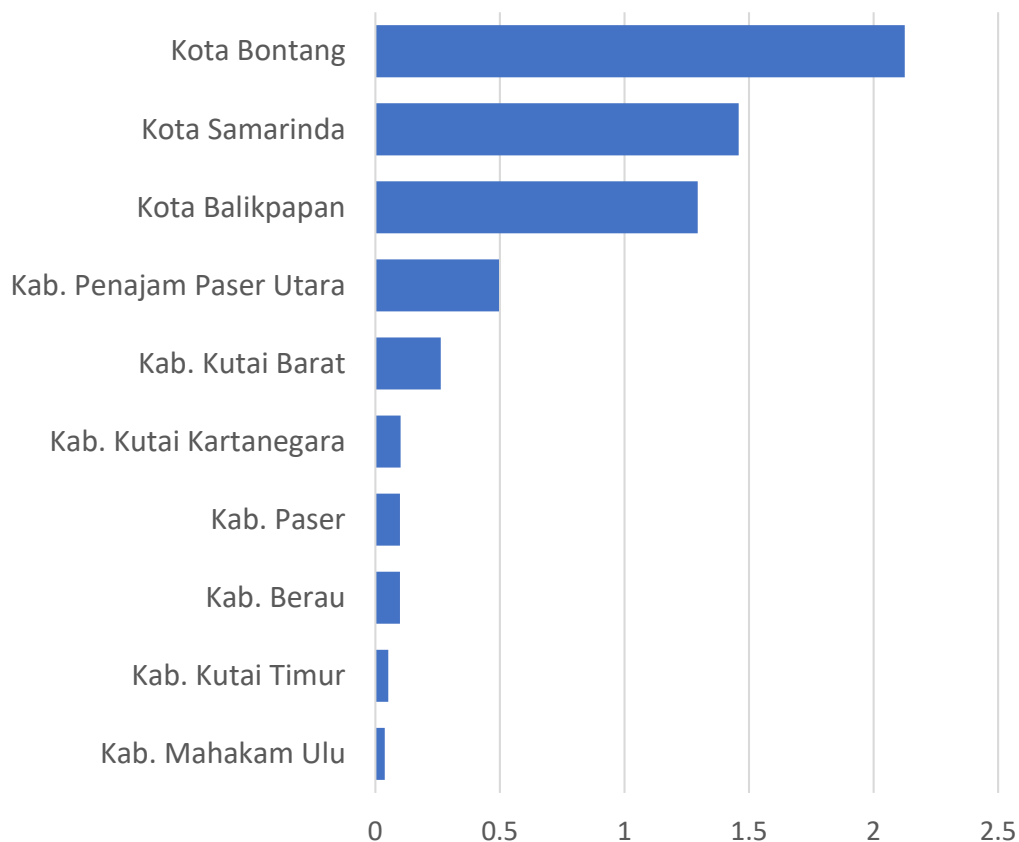


DENSITAS JALAN SERTA KONDISI JALAN DI KABUPATEN/KOTA KALIMANTAN CENDERUNG BERAGAM

Daerah kota memiliki rasio densitas jalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah kabupaten...

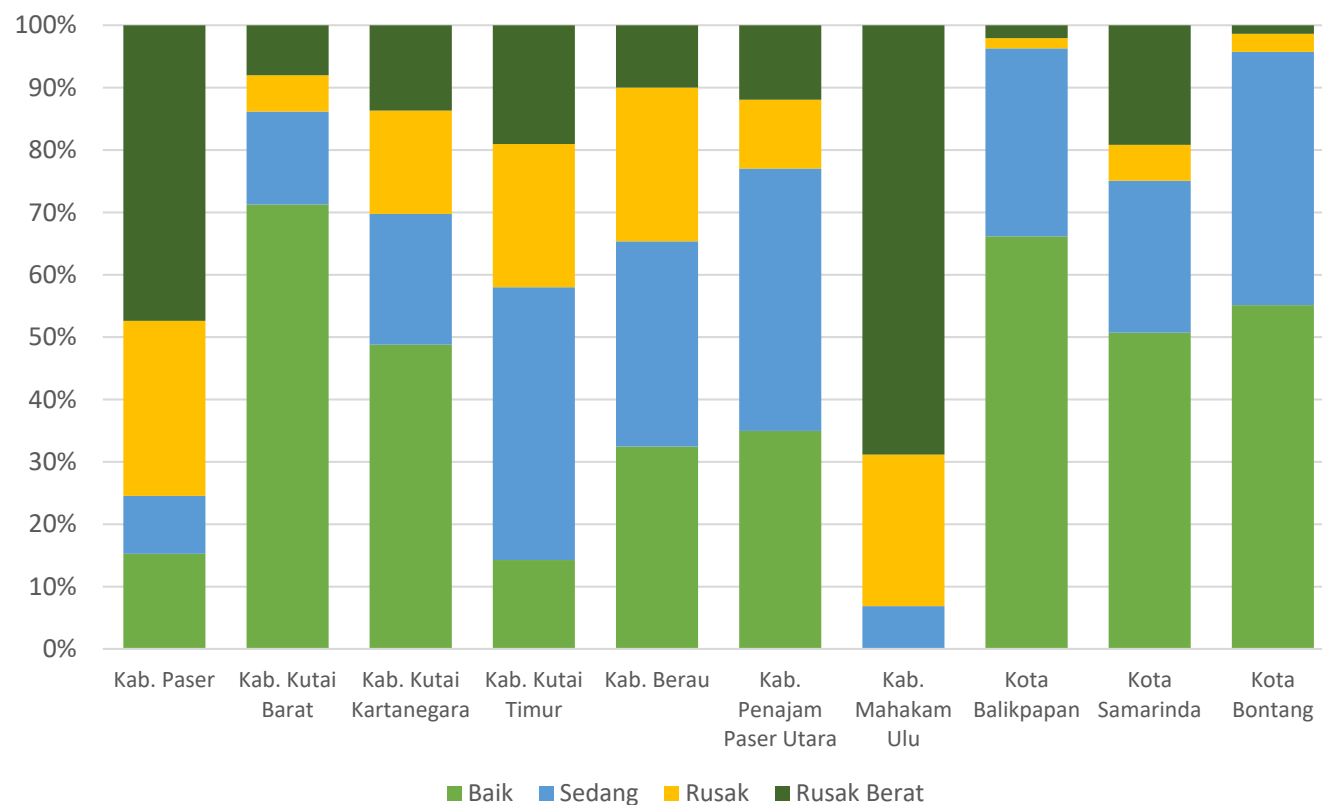
...dengan kondisi jalan yang tergolong baik dan sedang lebih tinggi dibandingkan daerah kabupaten

Densitas Jalan Berdasarkan Kabupaten/ Kota di Kalimantan Timur, 2018



Sumber: BPS Kalimantan Timur

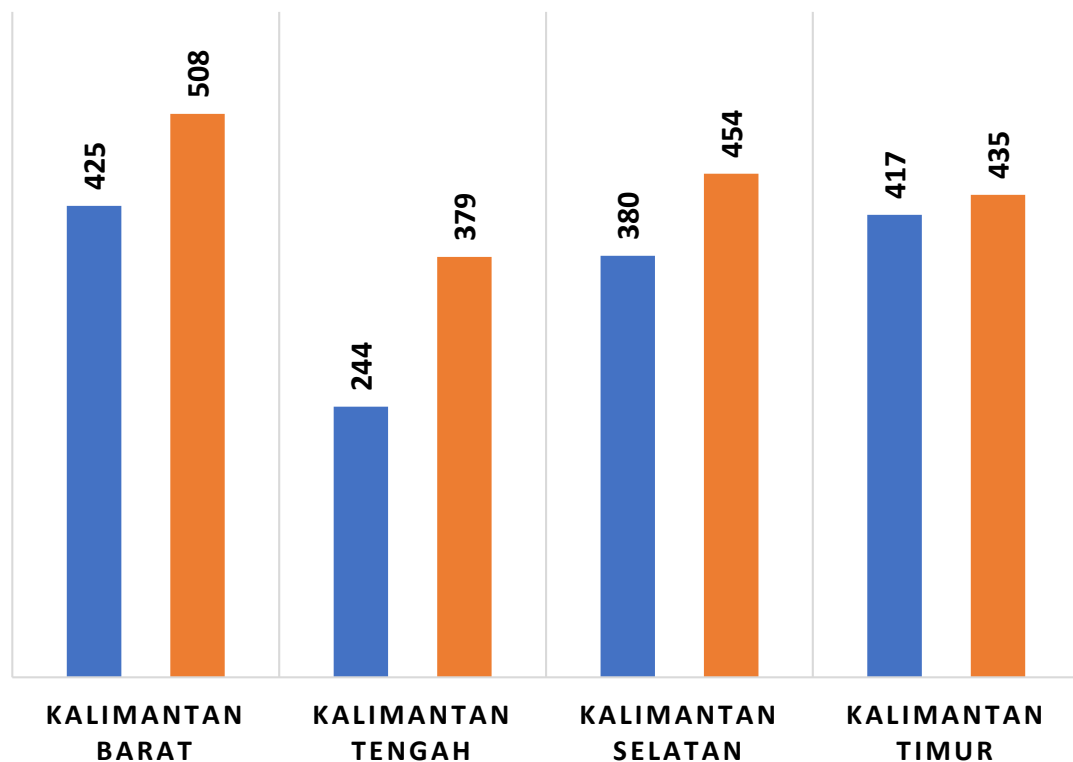
Kondisi Jalan berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2018



JUMLAH PERKIRAAN KERUGIAN MATERI AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS KALIMANTAN TIMUR MERUPAKAN YANG TERTINGGI DIBANDINGKAN PROVINSI LAINNYA DI KALIMANTAN

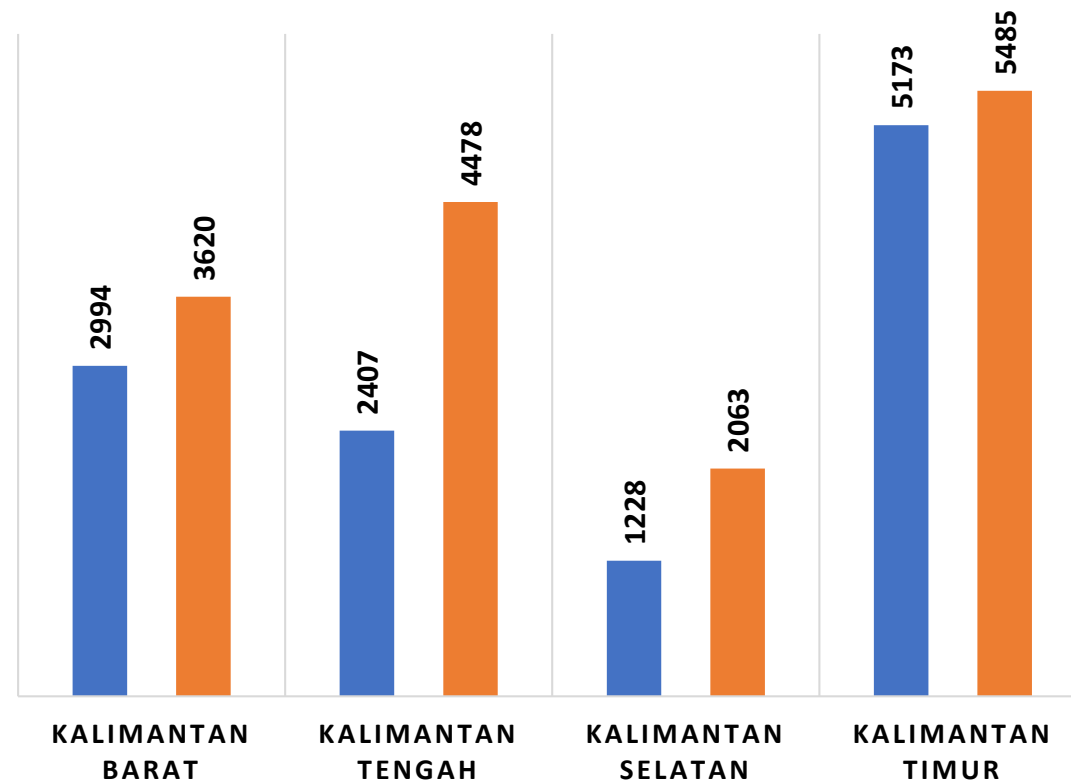
JUMLAH ORANG YANG MENINGGAL PADA
KECELAKAAN LALU LINTAS MENURUT PROVINSI

■ 2007 ■ 2017



PERKIRAAN KERUGIAN MATERI PADA
KECELAKAAN LALU LINTAS (JUTA RUPIAH)

■ 2007 ■ 2017



SEKTOR KEUANGAN

TEMUAN UTAMA



MOST BINDING CONSTRAINT

Tabungan domestik dan kredit di Kalimantan Timur rendah dibandingkan dengan provinsi lain

Penurunan pertumbuhan kredit dan peningkatan NPL sejalan dengan turunnya pertumbuhan ekonomi dan kolapsnya sektor pertambangan. Kondisi ini berdampak pada penyaluran kredit sektor lain.

BUKTI

BENCHMARKING DENGAN DAERAH LAIN

- Tabungan domestik rendah
- Penyaluran kredit rendah
- LDR rendah
- Pertumbuhan kredit rendah dengan NPL yang tinggi dibandingkan dengan daerah lain

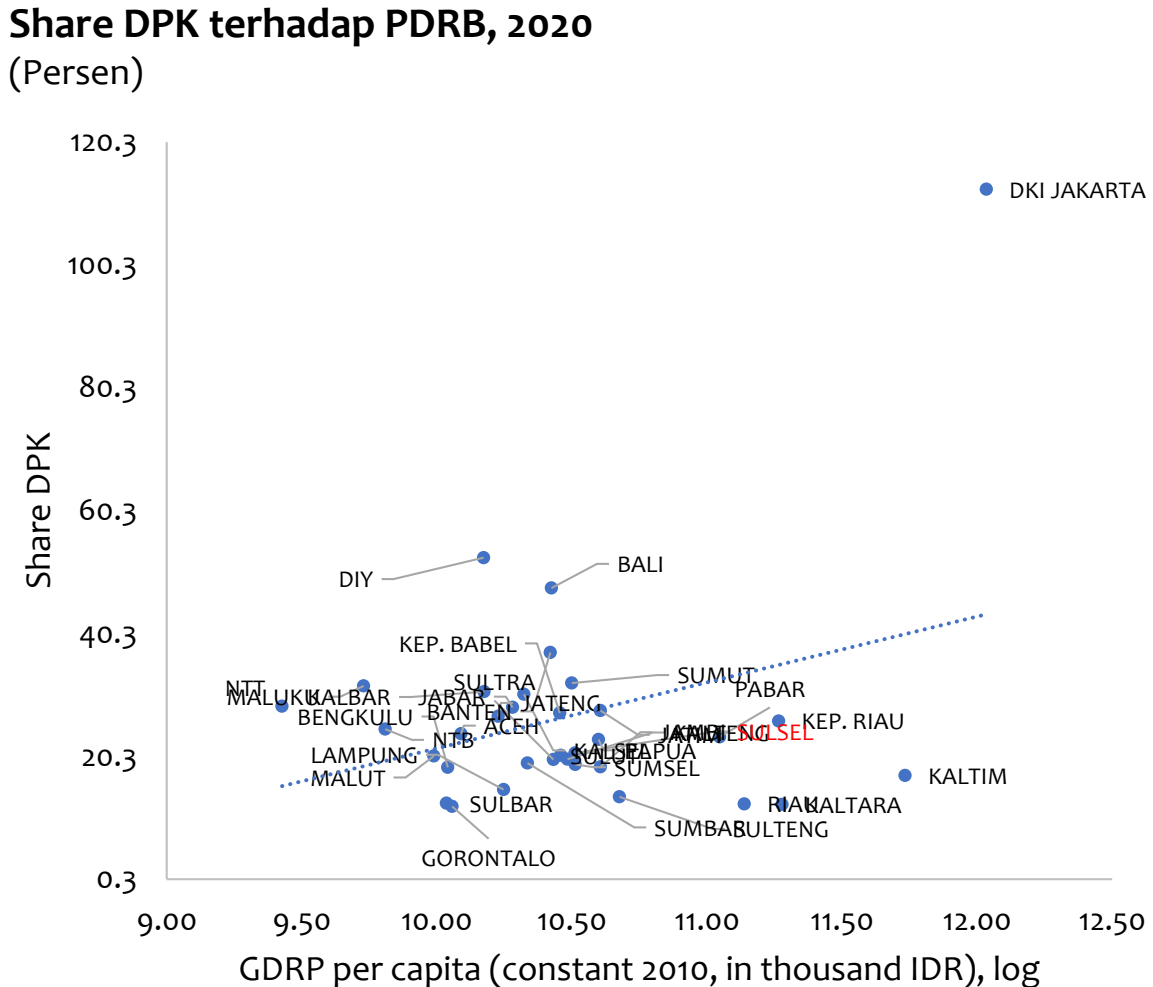
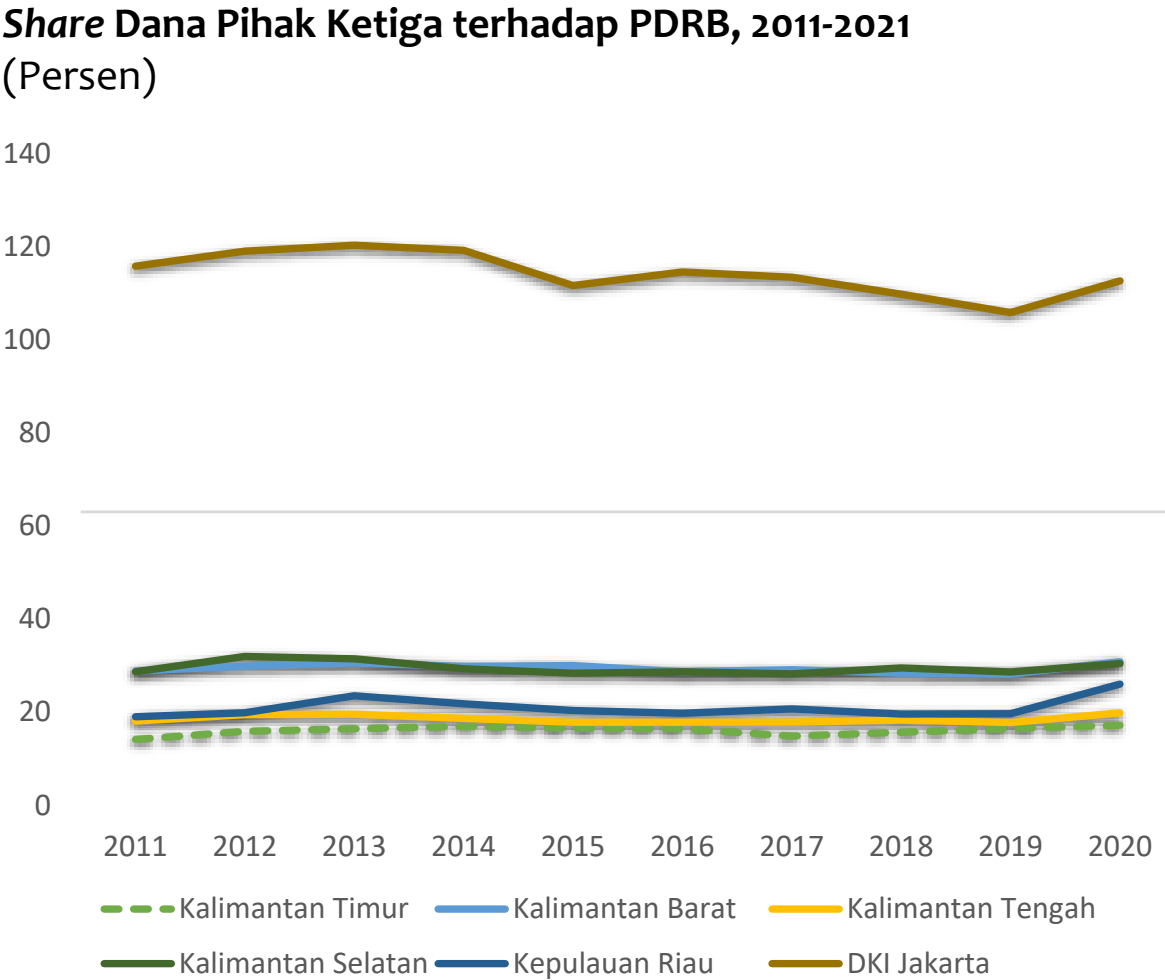
SHADOW PRICE

- Tingkat suku bunga kredit di Kaltim relatif tinggi dibandingkan dengan daerah lain

CHANGES VS CHANGES

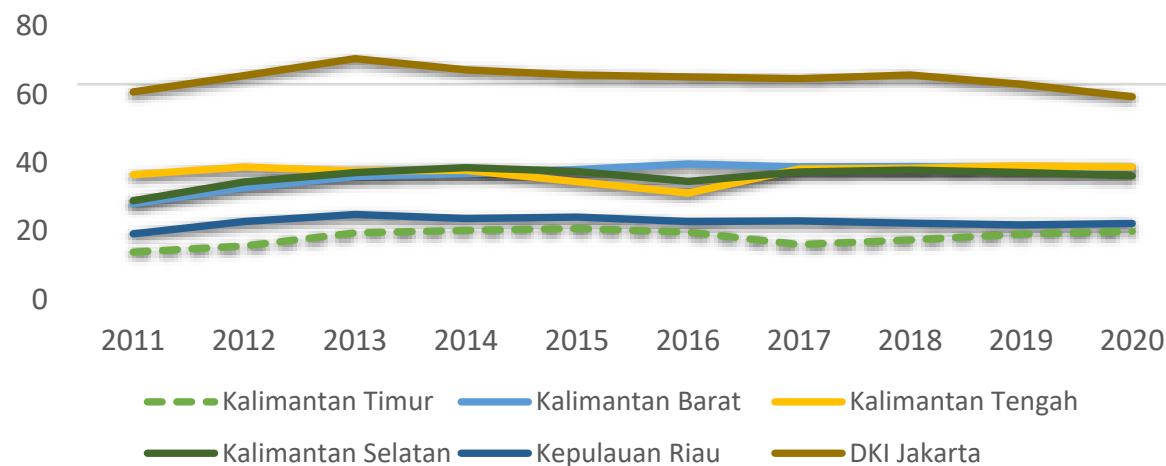
- Penurunan pertumbuhan kredit dan peningkatan NPL sejalan dengan turunnya pertumbuhan ekonomi

PROPORSI DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP PDRB KALIMANTAN TIMUR STAGNAN DAN LEBIH RENDAH DARI DAERAH SEBANDING

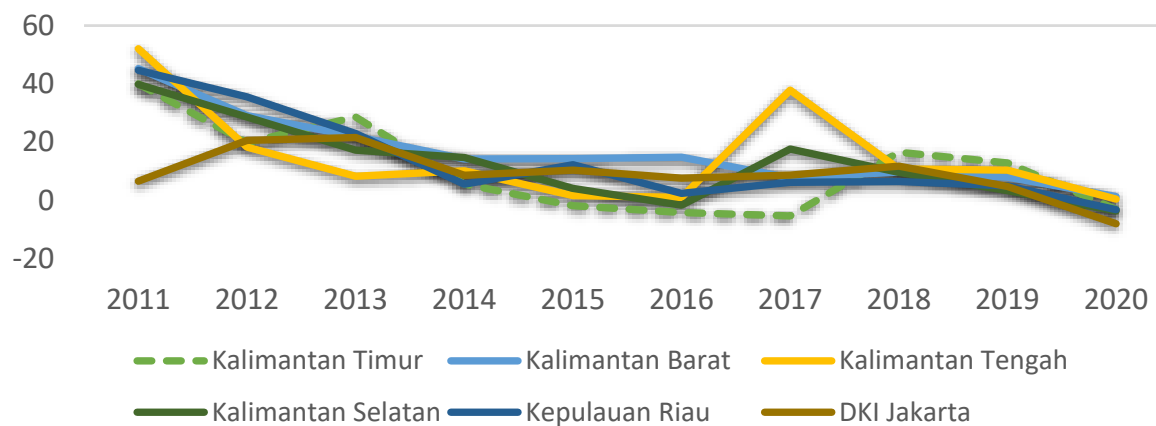


PROPORSI PENYALURAN DAN PERTUMBUHAN KREDIT PERBANKAN TERHADAP PDRB KALIMANTAN TIMUR SANGAT RENDAH DIBANDINGKAN PROVINSI LAIN

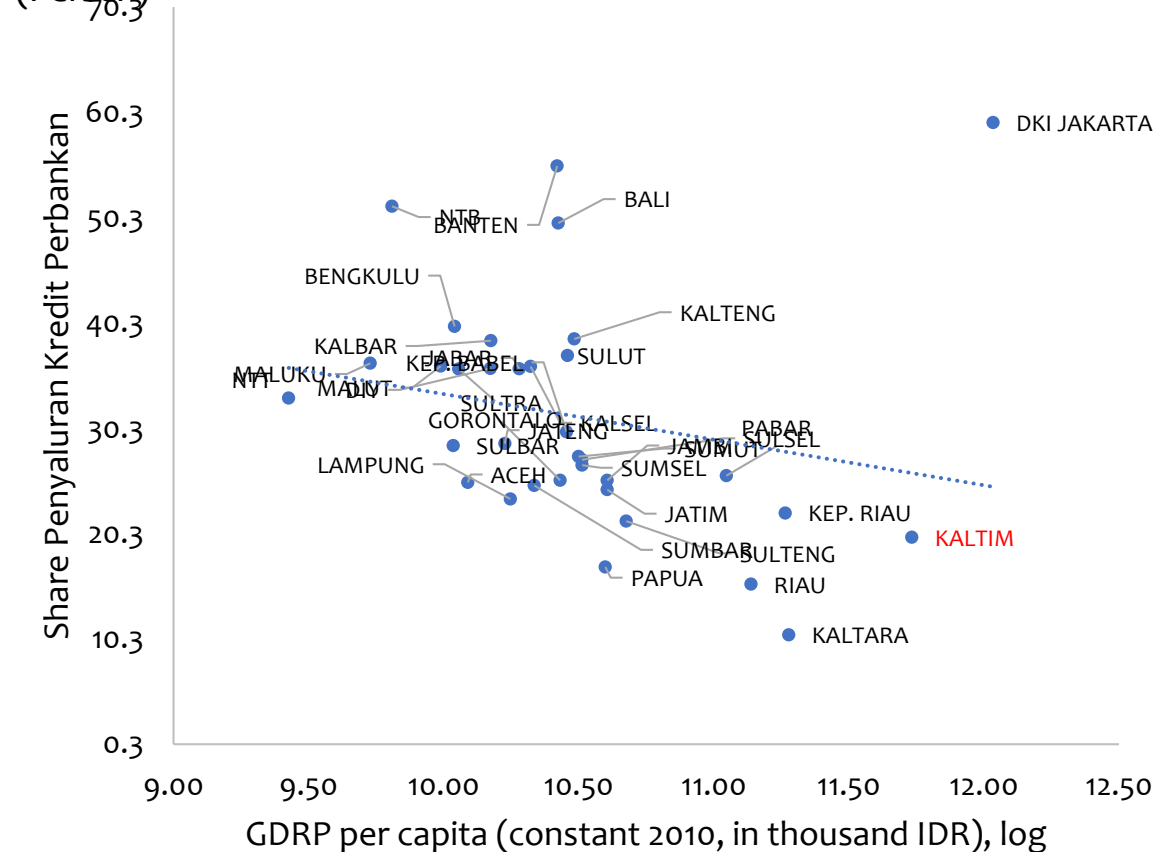
Share Penyaluran Kredit Perbankan terhadap PDRB, 2011-2020 (Persen)



Pertumbuhan Kredit Perbankan, 2011-2020 (Persen PDRB)

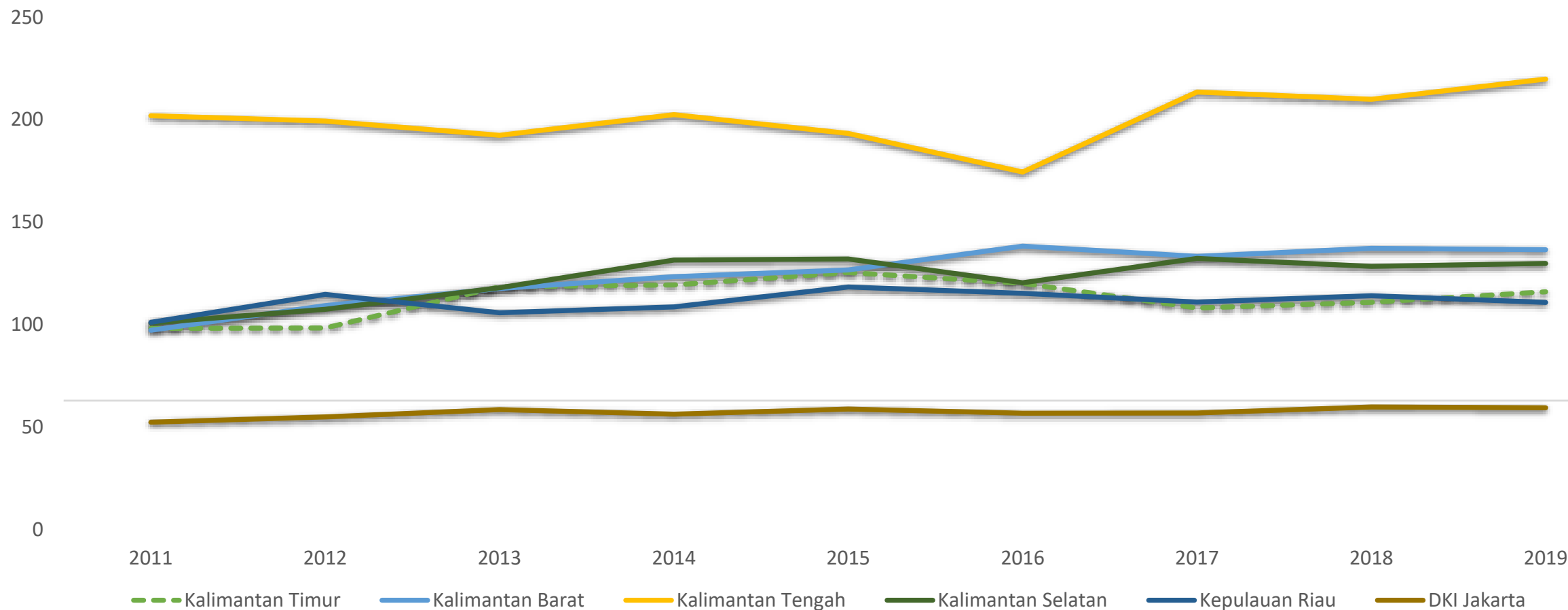


Share Penyaluran Kredit Perbankan terhadap PDRB, 2020
(Persen)



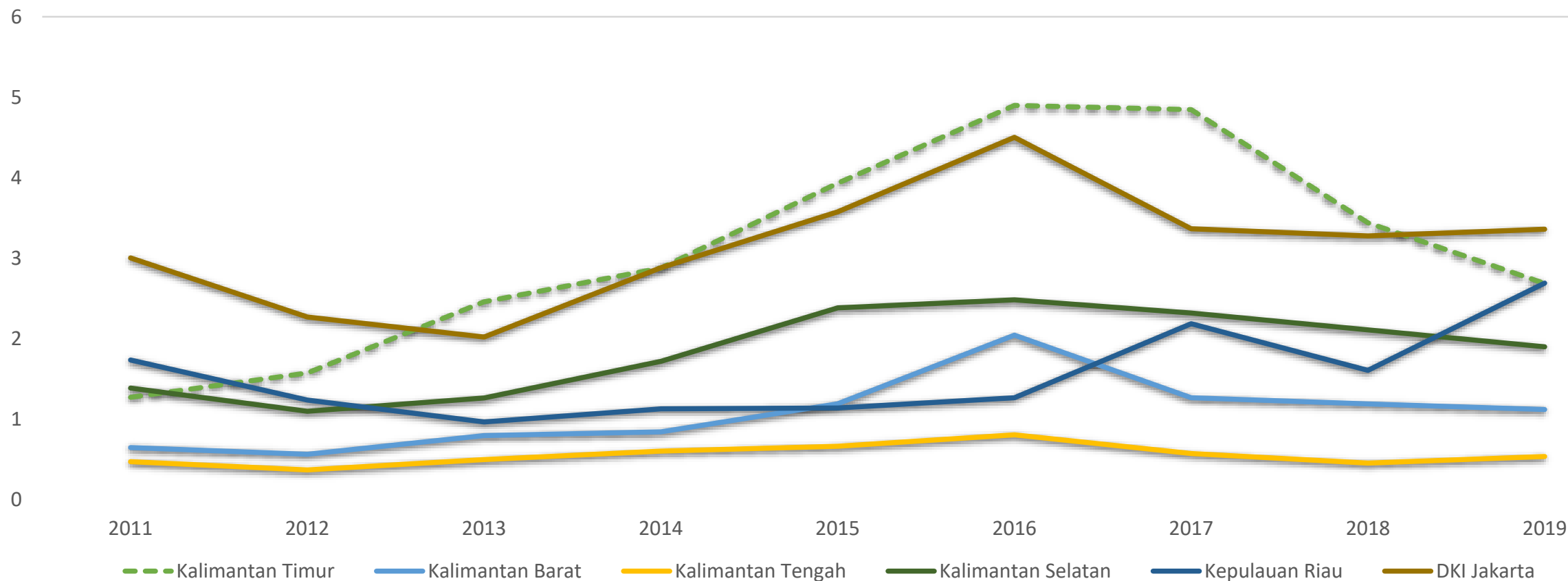
LOAN TO DEPOSIT RATIO (LDR) KALIMANTAN TIMUR MERUPAKAN SALAH SATU YANG TERENDAH DI INDONESIA

Loan To Deposit Ratio 2011-2019



NON-PERFORMING LOAN (NPL) DARI TOTAL KREDIT KALIMANTAN TIMUR MERUPAKAN YANG TERTINGGI DIBANDINGKAN PROVINSI LAINNYA DI INDONESIA

Proporsi NPL terhadap total kredit, 2011-2019
(Persen)



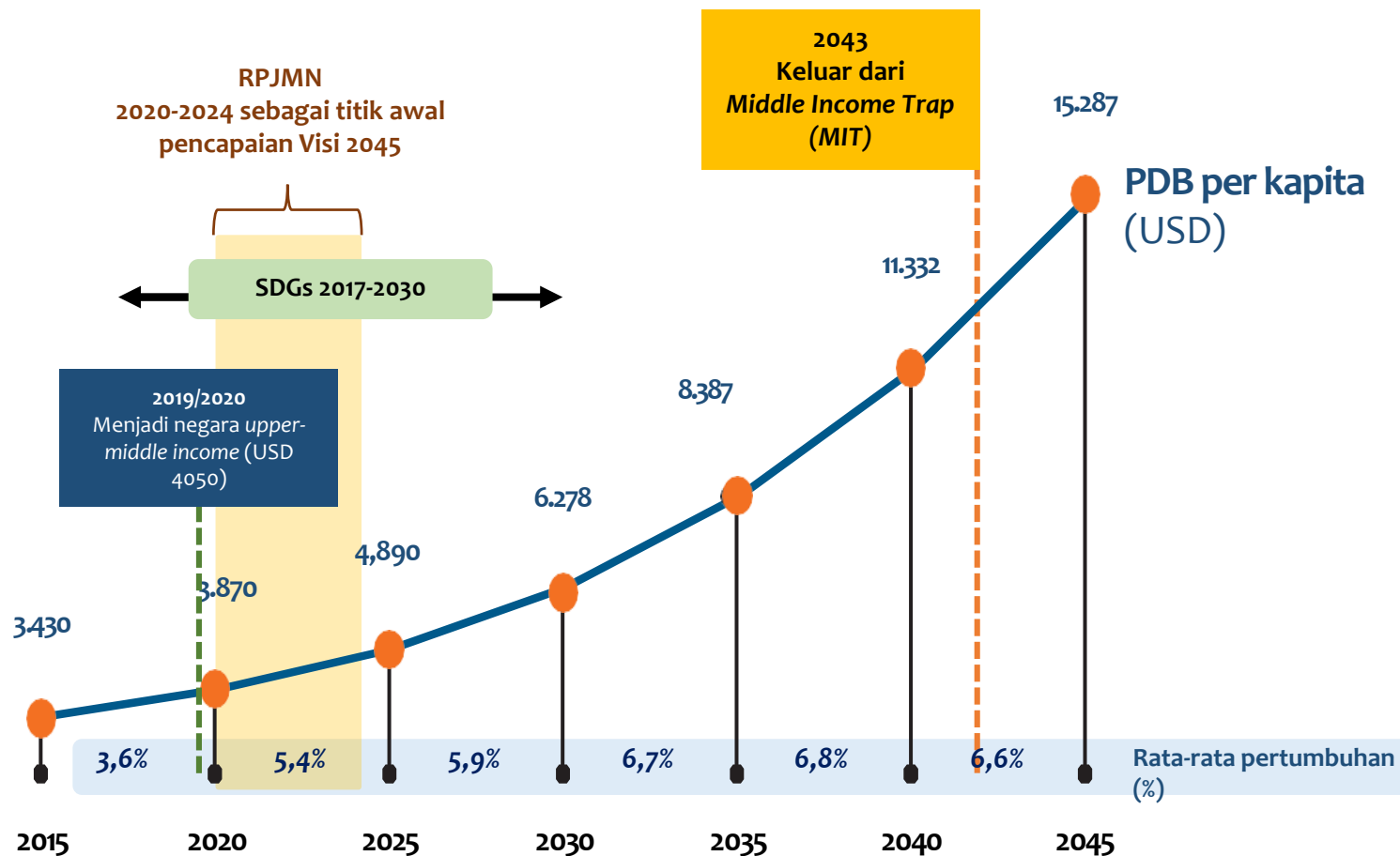


VISI
INDONESIA
2045

CATATAN PENUTUP: VISI 2045 DAN PEMERATAAN WILAYAH

MENGAPA PROVINSI HARUS TUMBUH TINGGI? MENCAPAI VISI 2045

Indonesia memiliki Visi menjadi negara maju pada tahun 2045, dengan PDB ke-7 tertinggi dunia dan peranan Kawasan Timur Indonesia (KTI) mencapai 25%. Dibutuhkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.



pada 100 tahun kemerdekaannya, Indonesia akan mencapai:

Negara Maju
dengan PDB Ke-7
Tertinggi

Peranan KTI terhadap
Ekonomi Nasional:
25%

4 Pilar Visi Indonesia Emas 2045



Pembangunan Manusia serta
Penguasaan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi



Pembangunan Ekonomi
Berkelanjutan



Pemerataan Pembangunan



Pemantapan Ketahanan
Nasional dan Tata Kelola
Pemerintahan

MENGAPA PROVINSI DI WILAYAH KTI HARUS TUMBUH TINGGI?

VISI INDONESIA 2045 FOKUS PADA PENGURANGAN KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH

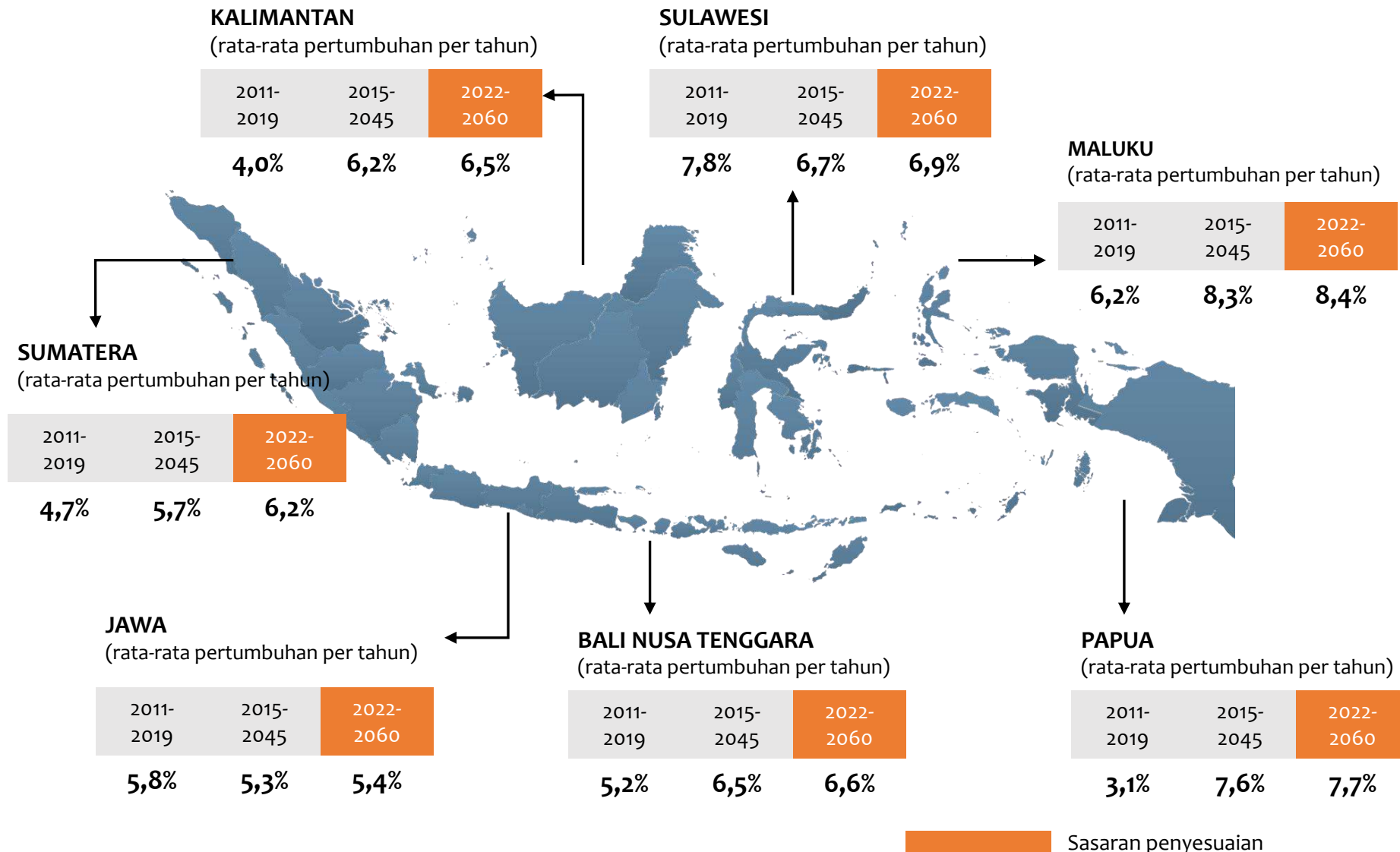
KONTRIBUSI WILAYAH

(persen terhadap PDRB total)

	2015	2045	2060
Jawa	58,3%	51,8%	47,7%
Luar Jawa	41,7%	48,2%	52,3%
KBI	80,5%	74,9%	73,9%
KTI	19,5%	25,1%	26,1%

Arah pengembangan wilayah:

- Sumatera: Basis Industri Baru dan Gerbang Kawasan Asia
- Jawa: Basis Perdagangan dan Jasa
- Kalimantan: Basis Industri Pengolahan dan Lumbung Energi Nasional
- Sulawesi: Basis industri pangan dan Gerbang KTI
- Bali, Nusa Tenggara dan Maluku: Basis wisata internasional dan perikanan
- Papua: Basis pangan dan sektor ekonomi berbasis SDA



CATATAN AKHIR

- 1 **Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.** Oleh karena itu, kualitas data dan informasi perlu menjadi perhatian. Jangan sampai terjadi “garbage in garbage out” dalam perencanaan pembangunan.
- 2 **Dokumen perencanaan pembangunan memiliki peran yang krusial.** Bappenas melakukan penyusunan rencana berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana sebelumnya juga berbagai masukan dari musyawarah baik dari provinsi maupun Kementerian/Lembaga teknis pelaksana.
- 3 **Dokumen perencanaan Daerah perlu dijaga konsistensinya dengan Dokumen perencanaan Nasional.** Hal ini telah tertuang dalam aturan perundang-undangan sehingga tujuan pembangunan nasional dapat tercapai didukung oleh peran daerah.
- 4 Dalam melakukan proyeksi untuk indikator-indikator baik ekonomi maupun indikator pembangunan lainnya, **perlu memperhatikan metadata (definisi, cara penghitungan) dan pemahaman** terkait indicator pembentuknya.

*Tanpa Data Berkualitas, Perencanaan Pembangunan Hanya Kata
Mari Tingkatkan Kualitas Data, untuk Evidence-Based Policy yang lebih Holistik, Integratif, Tematik, dan Spasial*

Terima Kasih

Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas
Gedung Wisma Bakrie 2, Lantai 5
ditpmas@bappenas.go.id



VISI
INDONESIA
2045



VISI
INDONESIA
2045

LAMPIRAN

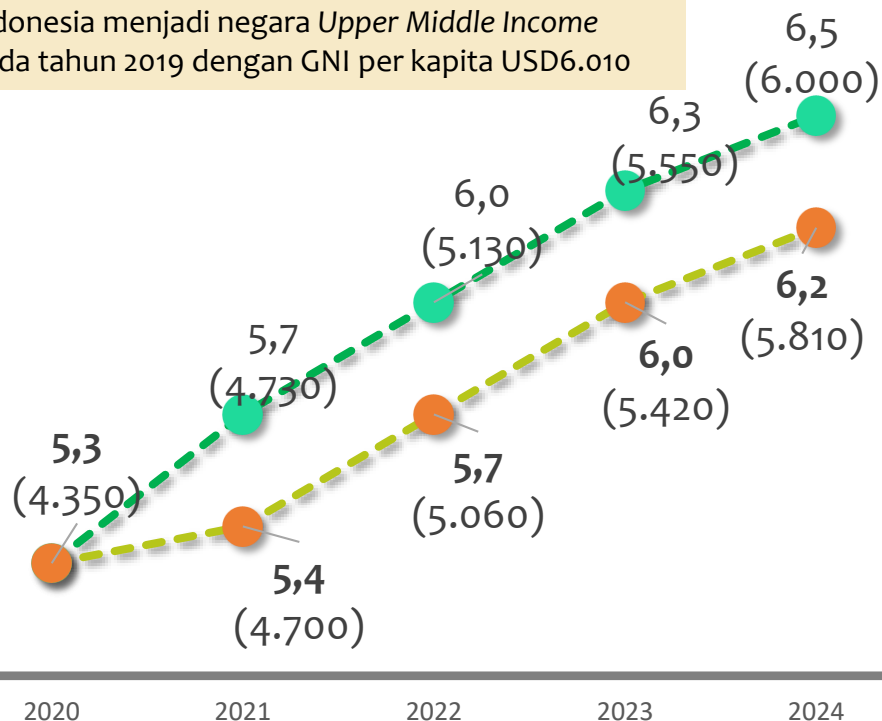
Skenario Pertumbuhan dalam RPJMN 2020-2024

Sasaran pertumbuhan tahun 2021 dan 2022 mengalami koreksi ke bawah akibat pandemi COVID-19, namun diharapkan akan kembali ke trajectory RPJMN 2020-2024 pada tahun 2023

Pertumbuhan Ekonomi, Persen

(GNI Per Kapita – USD Harga Berlaku Atlas Method²)

Indonesia menjadi negara *Upper Middle Income* pada tahun 2019 dengan GNI per kapita USD6.010



Rata-rata: 6,0

Rata-rata: 5,7

¹ Berdasarkan simulasi pertumbuhan potensial model Growth Accounting Bappenas

² Metode yang digunakan oleh Bank Dunia untuk menggolongkan suatu negara berdasarkan pendapatan

Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, pasal 6 ayat 3 menyatakan bahwa perubahan target dan kebutuhan pendanaan yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJMN dituangkan dalam RKP.

Sasaran Pertumbuhan RPJMN 2020-2024 (Persen)

Sasaran	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	5,40	5,50	5,70	5,90	6,00
Kalimantan Timur	5,80	6,70	7,10	8,00	8,50

Sumber: Lampiran I dan IV RPJMN 2020-2024

Updating Sasaran Pertumbuhan Nasional (Persen)

Sasaran	Outlook 2021	RKP 2022	RA RKP 2023
Nasional	3,80	5,20 – 5,50	5,30 – 6,10
Kalimantan Timur	3,11	5,30 – 5,50	5,57 – 6,03

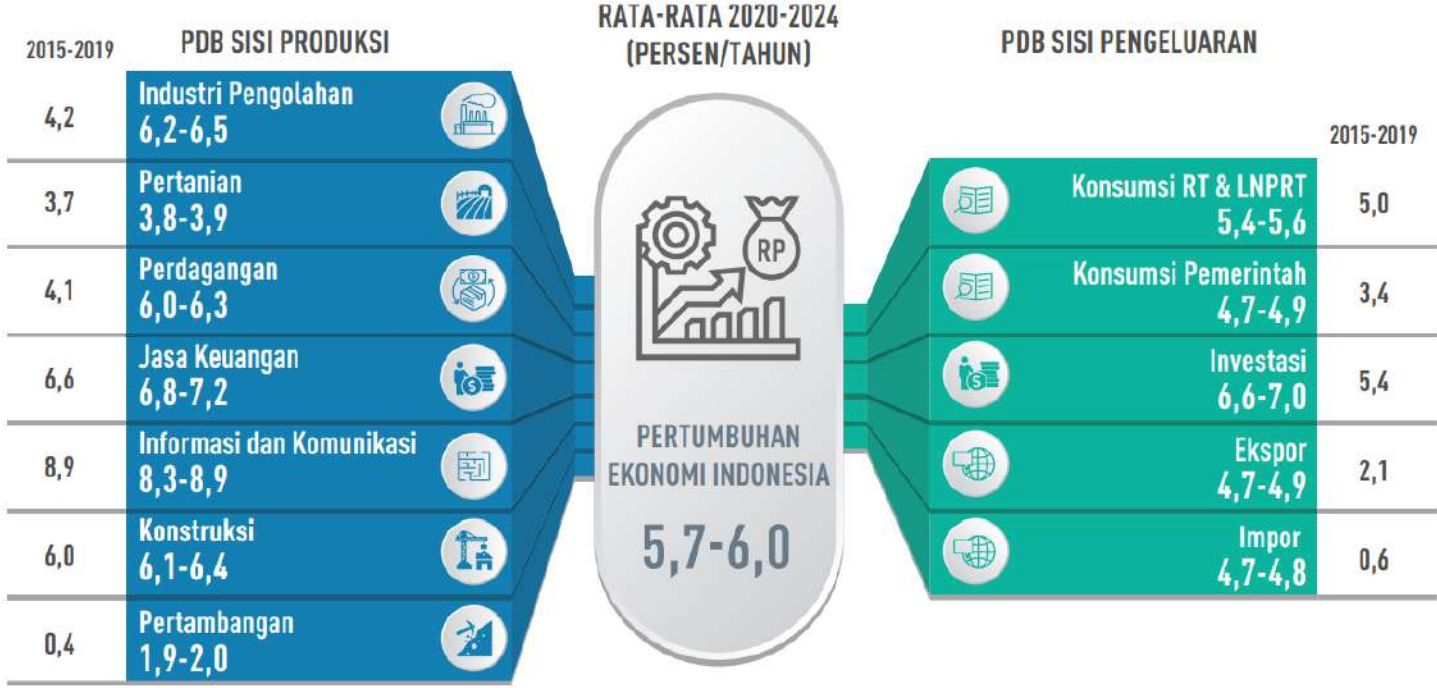
Sumber: Pemutakhiran RKP 2022 Perpres 115/2021, exercise internal dit. PMAS

Sasaran Pembangunan Kalimantan Timur (Persen)

Sasaran	2021	RKP 2022	RPJMN 2023
Tingkat Kemiskinan (Sep)	6,27	5,32 – 5,80	4,11
Tingkat Pengangguran (Agu)	6,83	5,93 – 6,79	5,40

Sumber: Pemutakhiran RKP 2022 Perpres 115/2021, Lampiran IV RPJMN 2020 - 2024

Sasaran Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024



Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2022

Pertumbuhan Ekonomi (persen)

5,2 - 5,5



Gini Rasio (indeks)

0,376 - 0,378



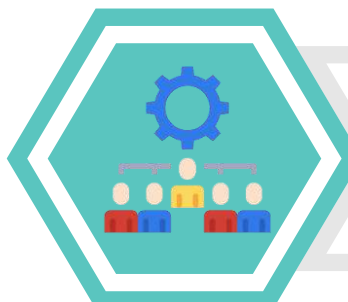
Tingkat Kemiskinan (persen)

8,5 - 9,0



Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) (nilai)

73,41 - 73,46



Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) (persen)

5,5 - 6,3



Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
(GRK) (persen)

26,87



INDIKATOR
PEMBANGUNAN:



Nilai Tukar Petani/NTP
(nilai)
103-105



Nilai Tukar
Nelayan/NTN (nilai)
104-106

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 115
Tahun 2021 tentang Pemutakhiran RKP
2022